

BAB I

IMPERIALISME DAN KOLONIALISME

I.1. Pendahuluan

I.1.1. Deskripsi Singkat

Pertemuan ini akan memberikan bekal kepada mahasiswa untuk dapat memahami pengertian dan ruang lingkup imperialisme dan kolonialisme di dalam perkembangan sejarah Indonesia

I.1.2. Manfaat

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan konsep tentang imperialisme dan kolonialisme . Selain itu perkuliahan ini juga akan mengantarkan kepada mahasiswa untuk dapat memahami dampak imperialisme dan kolonialisme pada rakyat Indonesia

I.2.3. Tujuan Instruksional Khusus

Pada akhir pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan:

1. Pengertian dan ruang lingkup kolonialisme dan imperialisme
2. Pentingnya pengetahuan tentang kolonialisme dan Imperialisme dalam perkembangan sejarah Indonesia
3. Dampak kolonialisme dan imperialisme bagi rakyat Indonesia
4. Bentuk-bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme dan Imperialisme

I.2. Penyajian

I.2.1. Materi

A. Pengertian Imperialisme dan Kolonialisme

A.1. Imperialisme

Istilah imperialisme yang diperkenalkan di Perancis pada tahun 1830-an , imperium Napoleon Bonaparte. Pada tahun 1830-an, istilah ini diperkenalkan oleh penulis Inggris untuk menerangkan dasar-dasar perluasan kekuasaan yang dilakukan oleh Kerajaan Inggris. Orang Inggris menganggap merekalah yang paling berkuasa (*Greater Britain*) karena mereka telah banyak menguasai dan menjajah di wilayah Asia dan Afrika. Mereka menganggap bahwa penjajahan bertujuan untuk membangun masyarakat yang dijajah yang dinilai masih terbelakang dan untuk kebaikan dunia.

Imperialisme merujuk pada sistem pemerintahan serta hubungan ekonomi dan politik negara-negara kaya dan berkuasa , mengawal dan menguasai negara-negara lain yang dianggap terbelakang dan miskin dengan tujuan mengeksploitasi sumber-sumber yang ada di negara tersebut untuk menambah kekayaan dan kekuasaan negara penjajahnya.

Imperialisme menonjolkan sifat-sifat keunggulan (hegemony) oleh satu bangsa atas bangsa lain. Tujuan utama imperialisme adalah menambah hasil ekonomi. Negara-negara imperialis ingin memperoleh keuntungan dari negeri yang mereka kuasai karena sumber ekonomi negara mereka tidak mencukupi. Selain faktor ekonomi, terdapat satu kepercayaan bahwa sebuah bangsa lebih mulia atau lebih baik dari bangsa lain yang dikenal sebagai *ethnosentrism*, contoh bangsa Jerman (Arya) dan Italia. Faktor lain yang menyumbang pada dasar imperialisme adalah adanya perasaan ingin mencapai taraf sebagai bangsa yang besar dan memerintah dunia, misalnya dasar imperialisme Jepang.

Dasar imperialisme awalnya bertujuan untuk menyebarkan ide-ide dan kebudayaan Barat ke seluruh dunia. Oleh karena itulah, imperialisme bukan hanya dilihat sebagai penindasan terhadap tanah jajahan tetapi sebaliknya dapat menjadi

faktor pendorong pembaharuan-pembaharuan yang dapat menyumbang kearah pembinaan sebuah bangsa seperti pendidikan, kesehatan, perundang-undangan dan sistem pemerintahan.

Sarjana Barat membagi imperialisme dalam dua kategori yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno adalah negara-negara yang berhasil menaklukan atau menguasai negara-negara lain, atau yang mempunyai suatu imperium seperti imperium Romawi, Turki Usmani, dan China, termasuk Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris dan Perancis yang memperoleh jajahan di Asia, Amerika dan Afrika sebelum 1870, tujuan imperialisme kuno adalah selain faktor ekonomi (menguasai daerah yang kaya dengan sumber daya alam) juga termasuk didalamnya tercakup faktor agama dan kejayaan .

Sedangkan Imperialisme modern bermula setelah Revolusi Industri di Inggris tahun 1870-an. Hal yang menjadi faktor pendorongnya adalah adanya kelebihan modal dan Barang di negara-negara Barat. Selepas tahun 1870-an , negara-negara Eropa berlomba-lomba mencari daerah jajahan di wilayah Asia, Amerika dan Afrika. Mereka mencari wilayah jajahan sebagai wilayah penyuplai bahan baku dan juga sebagai daerah pemasaran hasil industri mereka.

Dasar Imperialisme ini dilaksanakan demi agama, mereka menganggap bahwa menjadi tugas suci agama untuk menyelamatkan manusia dari segala macam penindasan dan ketidakadilan terutama di negara-negara yang dianggap terbelakang seperti para misionaris Kristen yang menganggap misi penyelamat ini sebagai *The White Man Burden*

Diantara faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya imperialisme adalah faktor dan ekonomi

A.2. Kolonialisme

Koloni merupakan negeri, tanah jajahan yang dikuasai oleh sebuah kekuasaan asing. Koloni adalah satu kawasan diluar wilayah negara asal atau induk. Tujuan utama kolonialisme adalah kepentingan ekonomi. Kebanyakan koloni yang yang

dijajah adalah wilayah yang kaya akan bahan mentah, keperluan untuk mendapatkan bahan mentah adalah dampak dari terjadinya Revolusi Industri di Inggris.

Istilah kolonialisme bermaksud memaksakan satu bentuk pemerintahan atas sebuah wilayah atau negeri lain (tanah jajahan) atau satu usaha untuk mendapatkan sebuah wilayah baik melalui paksaan atau dengan cara damai. Usaha untuk mendapatkan wilayah biasanya melalui penaklukan. Penaklukan atas sebuah wilayah bisa dilakukan secara damai atau paksaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada mulanya mereka membeli barang dagangan dari penguasa lokal, untuk memastikan pasokan barang dapat berjalan lancar mereka kemudian mulai campur tangan dalam urusan pemerintahan penguasa setempat dan biasanya mereka akan berusaha menjadikan wilayah tersebut sebagai tanah jajahan mereka. Negara yang menjajah menggariskan panduan tertentu atas wilayah jajahannya, meliputi aspek kehidupan sosial, pemerintahan, undang-undang dan sebagainya.

Sejarah perkembangan kolonialisme bermula ketika Vasco da Gama dari Portugis berlayar ke India pada tahun 1498. Diawali dengan pencarian jalan ke Timur untuk mencari sumber rempah-rempah perlombaan mencari tanah jajahan dimulai. Kuasa Barat Portugis dan Spanyol kemudian diikuti Inggris dan Belanda berlomba-lomba mencari daerah penghasil rempah-rempah dan berusaha menguasainya. Penguasaan wilayah yang awalnya untuk kepentingan ekonomi akhirnya beralih menjadi penguasaan atau penjajahan politik yaitu campur tangan untuk menyelesaikan pertikaian, perang saudara, dan sebagainya. Ini karena kuasa kolonial tersebut ingin menjaga kepentingan perdagangan mereka daripada pergolakan politik lokal yang bisa mengganggu kelancaran perdagangan mereka.

Kolonialisme berkembang pesat setelah perang dunia I. Sejarah kolonialisme Eropa dibagi dalam tiga peringkat. Pertama dari abad 15 hingga Revolusi industri (1763) yang memperlihatkan kemunculan kuasa Eropa seperti Spanyol dan Portugis. Kedua, setelah Revolusi Industri hingga tahun 1870-an. Ketiga, dari tahun 1870-an hingga tahun 1914 ketika meletusnya Perang Dunia I yang merupakan puncak pertikaian kuasa-kuasa imperialis

B. Perdagangan Asia dan Munculnya Imperialisme dan Kolonialisme Barat

Di zaman perekonomian Asia yang telah maju, perekonomian Eropa justru masih tertinggal jauh. Pusat perkembangan ekonomi dan politik dunia dalam abad ke-14 s/d abad ke-15 adalah dunia Islam, khususnya imperium Turki Usmani (Ottoman) yang telah menguasai wilayah-wilayah strategis yang semula dikuasai oleh Romawi-Byzantium. Penguasaan atas wilayah-wilayah itu sekaligus telah menyekat jalur perdagangan dari Timur ke Barat yang mengakibatkan barang-barang dagangan dari Timur seperti rempah-rempah menjadi langka dan harganya melambung tinggi.

Meskipun harganya relatif tinggi ternyata minat masyarakat Eropa waktu itu terhadap komoditi itu tidak menurun, bahkan cenderung meningkat. Oleh karena itu maka para penguasa dan pengusaha atau pedagang Eropa berupaya mencari jalan alternatif ke daerah penghasil komoditi tersebut.

Meningkatnya permintaan baik dari Eropa maupun dari tempat lainnya seperti India secara tidak langsung telah mendorong para produsen di kepulauan Nusantara, khususnya kepulauan Maluku memperluas tanaman ekspornya, terutama pala dan cengkeh. Selain adanya perluasan seperti pala dan cengkeh, juga di beberapa pulau, seperti di Sumatera dikembangkan pula komoditi lain yang juga sangat diminati orang-orang Eropa, yaitu lada. Walaupun harganya hanya separuh rempah-rempah, namun waktu itu lada sudah termasuk komoditi ekspor yang penting dari wilayah Nusantara, bahkan Asia Tenggara. Menurut beberapa sumber, tanaman ini mulanya merupakan barang dagangan dari Kerala, pantai Malabar di India barat daya, yang dikenal oleh orang-orang Arab dan Eropa sebagai “negeri lada”. Sejak kapan lada dibumidayakan oleh penduduk Sumatera tidak begitu jelas.

B.1. Emporium Malaka

Sejak runtuhnya Sriwijaya, kota pelabuhan terbesar yang patut disebut sebuah emporium adalah Malaka. Kota pelabuhan yang sekaligus menyandang nama kerajaan itu muncul pada ke-15 M. Kemunculannya sekaligus menggeser kedudukan Pasai dalam dunia perdagangan internasional. Secara geografis letak Malaka cukup

strategis dan lebih menguntungkan dibandingkan Pasai. Pendiri Malaka, yaitu Parameswara menyadari pentingnya jaminan keamanan bagi negerinya yang kehidupan ekonominya lebih banyak bertumpu pada perdagangan daripada pertanian. Agar kotanya tetap ramai, penguasa Malaka berusaha mengamankan jalur-jalur perdagangannya dari para bajak laut atau lanun yang berkeliaran di sekitar Selat Malaka. Di samping itu penguasa Malaka berupaya menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan sekitarnya, terutama Majapahit (Jawa), Siam dan Cina.

Malaka juga mengirimkan ekspedisi militernya ke negeri-negeri yang dianggapnya penting untuk dikuasai karena menghasilkan barang-barang yang sangat dibutuhkan Malaka. Misalnya Kampar di pantai timur Sumatera ditaklukkannya karena daerah ini merupakan penghasil lada dan merupakan pintu keluar emas dari daerah pedalaman Minangkabau. Kemudian Siak juga ditaklukan dan dikuasainya karena menghasilkan emas.

Keberhasilan Parameswara menjalankan kebijakan politiknya, ditambah dengan perbaikan sistem pergudangan dan perbengkelan kapal (doking), membuat kota Malaka berkembang menjadi sebuah emporium terbesar di Asia Tenggara. Apalagi setelah penguasa Malaka menjadi Islam pada tahun 1414, telah mendorong semakin banyak pedagang Islam dari Arab dan India yang *nota bene* menguasai jalur perdagangan dari Asia ke Timur Tengah, melakukan kegiatan bisnis-perdagangan di kota ini.

Menurut Tomé Pires, penulis Portugis, kebijakan yang ditempuh para raja Malaka adalah menumbuhkan sistem birokrasi yang dapat memenuhi tugasnya dalam mengatur perekonomian Malaka. Salah satu jabatan yang erat kaitannya dengan perdagangan di pelabuhan adalah Syahbandar. Di Malaka waktu itu ada empat orang syahbandar yang dipilih sendiri oleh para pedagang asing dari berbagai kelompok bangsa untuk mengurus kepentingan niaga mereka. Pertama, syahbandar yang mengurus para pedagang Gujarat; kedua, syahbandar yang mengurus para pedagang Keling, Bengali, Pegu, dan penduduk Pasai; ketiga, syahbandar yang menjaga kepentingan para pedagang Jawa, Maluku, Banda, Palembang, Kalimantan, dan Filipina (Sulu dan Mangindanau); dan keempat adalah syahbandar yang menjaga dan

mewakili para pedagang Cina dan kepulauan Liu-Kiu. Kedudukan Malaka seperti inilah yang mendorong Portugis berusaha menguasainya.

Bangsa Portugis telah mendengar informasi tentang kota Malaka dengan segala kekayaan dan kebesarannya itu dari pedagang-pedagang Asia. Atas dasar informasi itu Raja Portugal mengutus Diogo Lopes de Sequeira untuk menemukan kota tersebut, menjalin hubungan persahabatan dengan penguasanya dan menetap di sana sebagai wakil raja Portugal. Awalnya Sequeira disambut dengan senang hati oleh Sultan Mahmud Syah (1488-1528). Sikap Sultan kemudian berubah setelah komunitas dagang Islam internasional yang ada di bandar itu meyakinkannya bahwa Portugis merupakan suatu ancaman berat baginya. Oleh karena itu Sultan berusaha menangkap Sequeira dan anak buahnya. Empat kapal Portugis yang sedang berlabuh berusaha dirusak oleh pihak Sultan, namun gagal karena para kaptennya telah berhasil membayai kapal-kapal itu berlayar ke laut lepas. Penyerangan terhadap Portugis juga terjadi di tempat lainnya di barat. Dengan adanya kejadian seperti itu Portugis yakin bahwa untuk menguasai perdagangan hanyalah dengan cara penaklukan, sekaligus mengokohkan eksistensinya dalam dunia perdagangan Asia. Afonso d'Albuquerque, panglima Portugis yang mendapat tugas untuk merebut Malaka dengan satu perhitungan jika Malaka dapat dikuasai maka seluruh perdagangan rempah di Asia akan menjadi milik Portugis.

Sebelum sampai ke Malaka, Portugis telah menguasai Hormuz dan Sokotra di sekitar Teluk Persia dan Goa di pantai barat India yang kemudian dijadikan pangkalan tetap Portugis. Pada bulan April 1511, Albuquerque berlayar dari Goa menuju Malaka dengan membawa armada Portugis yang berkekuatan 1200 orang dan delapan belas buah kapal perang. Perang terjadi secara sporadis sepanjang bulan Juli dan awal bulan Agustus, yang akhirnya dimenangkan oleh Portugis.

B.2. Awal Kolonialisme Bangsa Barat

Di satu pihak jatuhnya Byzantium ke tangan Turki Usmani telah menyebabkan komoditi dari Asia Timur dan Asia Tenggara di Eropa langka dan walaupun adanya harganya sangat mahal. Namun di pihak lainnya peristiwa itu berdampak positif karena telah mendorong meningkatnya ilmu pengetahuan di dunia

Barat. Hal ini karena banyak ahli budaya-teknologi dari Byzantium yang lari ke Barat berhasil menularkan pengetahuannya di sana. Di Portugal misalnya, pengetahuan geografis dan astronominya meningkat semakin baik, sehingga orang-orang Portugis berhasil menjadi mualim-mualim kapal yang mahir dan tangguh. Kepandaian ini kemudian dipadukan dengan berkembangnya teknologi perkapalannya mulai dari penemuan sistem layar segitiga dengan temali-temali persegi, serta konstruksi kapal yang semakin baik sehingga kapal-kapal mereka lebih mudah digerakkan dan lebih layak dipakai untuk pelayaran samudra. Demikian pula teknologi persenjataan mereka berkembang sehingga mampu menciptakan meriam-meriam yang dapat ditempatkan di atas kapal-kapal mereka. Kapal-kapal perangnya lebih menyerupai panggung meriam di lautan daripada istana terapung bagi para pemanah atau geladak *balista* (alat pelontar) seperti pada kapal-kapal Romawi pada masa Julius Caesar dan Oktavianus Agustus. Penemuan-penemuan teknologi itulah yang kemudian mendorong mereka untuk mencari jalur baru ke India (dalam mitos masyarakat Eropa waktu itu, rempah-rempah berasal dari India, sehingga mereka berlayar ke timur termasuk ke benua Amerika, adalah untuk mencari India).

Namun perlu dikemukakan di sini, bahwa Portugis berlayar ke timur bukan semata-mata untuk mencari rempah-rempah, tetapi juga untuk mencari emas dan sekutu untuk melawan Turki dalam arti melanjutkan “perang salib”. Pencarian emas dan perak kemudian menjadi penting karena kedua logam mulia itu dijadikan semacam indikator kesuksesan satu negara, seperti dikemukakan oleh Antonio Serra bahwa kekayaan itu tiada lain adalah emas dan perak. Politik ekonomi ini dikenal di Eropa sebagai ekonomi Merkantilis. Paham ini mulai berkembang sekitar tahun 1500-an dan semakin berkembang setelah terbit tulisan-tulisan dari para pendukung paham ini, seperti Jean Colbert dari Perancis dan Thomas Mun dari Inggris.

Atas dorongan Pangeran Henry ‘Si Mualim’, Portugis memulai usaha pencarian emas dan jalan untuk mengepung lawan yang beragama Islam dengan menelusuri pantai barat Afrika. Mereka berusaha mencari jalan menuju Asia (India) guna memotong jalur pelayaran pedagang Islam, sekaligus untuk memonopoli perdagangan komoditi tersebut.

Pada tahun 1478, Bartolomeu Diaz sampai ke Tanjung Harapan di ujung selatan Benua Afrika. Kemudian pada tahun 1497 armada pimpinan Vasco da Gama sampai ke India. Pengalaman di India ini telah menyadarkan orang-orang Portugis bahwa barang-barang perdagangan mereka tidak dapat bersaing di pasaran India yang canggih dengan hasil-hasil yang mengalir melalui jaringan perdagangan Asia. Oleh karena itulah semboyan “God –Gold – Glory” bagi mereka menjadi relevan, karena tidak ada cara lain untuk menguasai perdagangan Asia selain melalui peperangan dan menjadikan daerah-daerah penghasil komoditi itu sebagai koloni.

B.3. Dampak dikuasainya Malaka oleh Portugis

Setelah Portugis berhasil menguasai Malaka, mereka menemukan kenyataan yang di luar perkiraannya. Kota pelabuhan itu bagaikan ayam dalam dongeng “ayam bertelur emas” yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Melayu. Seekor ayam yang setiap hari bertelur satu butir telur emas, yang kemudian disembelih oleh pemiliknya karena tidak sabar menunggu dan ingin segera mendapatkan telur-telur emas itu. Ternyata dalam tubuh ayam itu tidak ada telur emas. Portugis menemukan suatu kenyataan bahwa Malaka bukanlah produsen dari semua komoditi ekspor (khususnya merica) yang dicari-cari oleh para pedagang Barat. Kebesaran Malaka adalah karena perannya sebagai emporium, pelabuhan transit bagi para pedagang Asia. Dengan diterapkannya politik monopoli serta upaya kristenisasi oleh Portugis, peranan yang disebutkan terakhir justru terganggu. Para perdagangan Asia, khususnya pedagang Islam merasa tidak nyaman lagi berdagang di kota tersebut. Umumnya mereka berupaya menghindari kota emporium itu dan mencari jalan alternatif guna mencapai tempat-tempat atau pelabuhan-pelabuhan lain yang diduga dapat memenuhi kebutuhan dagangnya.

Jalur perdagangan di Asia Tenggara pun berubah, tidak lagi melalui Malaka tetapi melalui pantai barat Sumatera, lalu masuk selat Sunda untuk selanjutnya menelusuri pantai utara Jawa menuju kepulauan Indonesia bagian Timur yang menghasilkan banyak rempah-rempah. Di jalur perdagangan baru itu tumbuh pusat-pusat perdagangan baru, seperti Aceh, Banten, Semarang, Jepara dan Surabaya.

Sementara itu Malaka yang dihindari oleh para pedagang Islam kedudukannya semakin merosot dan tidak pernah meraih kembali kejayaan dan kebesarannya.

Portugis sendiri akhirnya menyadari bahwa pentingnya Malaka adalah peranannya sebagai pelabuhan emporium, pelabuhan transit. Guna mempertahankan fungsinya itu, kapal-kapal Portugis belayar ke Maluku untuk mengambil komoditi tersebut. Pada waktu itu di Maluku ada dua kesultanan Islam yang besar dalam kondisi sedang menurun dalam kekuasaan politiknya dan saling bermusuhan satu sama lain, yaitu Ternate dan Tidore.

Selain ke Maluku Portugis berusaha menjalin hubungan diplomatik dengan Pajajaran, satu kerajaan Hindu di Jawa Barat yang kedudukan politiknya juga sedang menurun. Namun kerjasama dengan kerajaan ini tidak sempat terwujud karena Pajajaran tenggelam oleh kekuatan Islam Demak - Banten.

Kenyataan ini telah memaksa Portugis untuk meninggalkan politik anti Islamnya (Perang Salib), dan berusaha mencari mitra kerja atau sekutu dagang dari kalangan Islam. Sebab, (1) Portugis harus menerima kenyataan bahwa kerajaan-kerajaan di sekitarnya adalah Islam, dan (2) perdagangan Islam di Asia Tenggara sampai Timur Tengah cukup didominasi.

C. Persaingan dan kemitraan

C.1. Portugis di Maluku

Setelah Portugis menyadari bahwa penghasil rempah-rempah bukanlah Malaka melainkan Maluku. Atas dasar kenyataan itu Portugis berlayar ke Maluku dan berupaya menanamkan pengaruhnya melalui persekutuan dengan Ternate. Atas persetujuan Sultan Ternate, pada tahun 1522 Portugis membangun sebuah benteng di sana. Pada awalnya persekutuan itu berjalan dengan baik. Hubungan itu mulai rusak setelah Portugis melakukan kristenisasi terhadap masyarakat Maluku, serta perilaku orang-orang Portugis sendiri dinilai tidak sopan. Akan tetapi karena kekuatan kerajaan Ternate ternyata tidak cukup kuat untuk mengusir orang-orang Portugis. Akibatnya yang terjadi menjadi kebalikannya, justru sultan Ternate, **Tabariji** diturunkan dari singgasananya oleh Portugis lalu dibuang ke Goa, India. Sekitar

empat puluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1575 giliran Portugis yang diusir oleh sultan Ternate, **Baabullah** (1570-1583). Dari Ternate orang-orang Portugis pindah ke Tidore dan membangun sebuah benteng di sana.

Meskipun gerakan kristenisasi tidak lagi sepenuhnya dijalankan oleh ‘pemerintah’ Portugis, namun tidak berarti upaya kristenisasi sama sekali berhenti. Karena masih ada orang Eropa yang meneruskan kegiatan itu di kepulauan Nusantara. Orang itu adalah **Santo Francis Xavier** (1506-1552), orang Spanyol, yang bersama-sama dengan **Santo Ignatius Loyola** mendirikan Ordo Jesuit. Pada tahun 1560-an di kepulauan Maluku diduga sudah ada sekitar 10.000 komunitas Katolik yang sebagian besar berdomisili di Ambon, dan pada tahun 1590-an terdapat sekitar 50.000 – 60.000 orang Katolik (Ricklefs, 2005). Menurut Ricklefs, kondisi ini telah memberi sumbangan yang besar pada rasa memiliki kepentingan yang sama dengan orang-orang Eropa, terutama di kalangan penduduk Ambon. Perasaan semacam itu tidak dialami oleh penduduk pribumi (Indonesia) di daerah-daerah lainnya.

Upaya kaum missionaris yang sungguh-sungguh ini terjadi justru pada waktu kegiatan penaklukan Portugis di kepulauan Indonesia telah terhenti. Pada waktu itu kepentingan utama Portugis telah bergeser dari Maluku ke perdagangan dengan Jepang yang dinilainya lebih menguntungkan. Setelah Portugis memperoleh Macao di tahun 1557, perdagangan dengan Cina juga semakin terbuka. Akhirnya kegiatan Portugis yang luas mulai lebih dipusatkan pada perdagangan gula Brazil dan budak-budak Afrika daripada terhadap wilayah timur Asia, terutama setelah Portugis terusir dari Malaka tahun 1641 oleh kekuatan gabungan VOC dan Johor. Dengan demikian kristenisasi dengan segala pengaruhnya di kepulauan Indonesia bagian timur lebih merupakan hasil jerih payah seorang Jesuit daripada hasil jerih payah kerajaan Portugal.

Selain agama, Portugis meninggalkan beberapa pengaruh budaya, seperti balada keroncong yang romantis, dan kosa kata yang terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti kata ‘pesta’, ‘sabun’, ‘sepatu’, ‘bendera’, ‘kemeja’, ‘meja’, ‘minggu’ dll. Hal ini membuktikan bahwa di samping bahasa Melayu yang menjadi

lingua franca, bahasa Portugis banyak pula dipergunakan di kepulauan Indonesia, paling tidak sampai akhir awal abad ke-19. Kini, di daerah kepulauan Maluku masih banyak nama keluarga yang berasal dari masa Portugis, seperti: *da Costa, Dias, de Fretes, Gonsalves, Mendoza, da Silva, dan Rodrigues*.

Perdagangan Portugis pada dasarnya bersifat semi-feodal dan terikat oleh raja Portugis beserta politiknya. Perdagangan resmi Portugis dapat dikatakan sebagai contoh dari seorang raja Eropah yang berdagang. Karena itu banyak yang menilai organisasi perdagangannya kurang efisien. Para pejabatnya di Asia bukanlah saudagar melainkan *hidalgo's* yang lebih menyukai perampokan daripada perdagangan resmi. Apalagi pada waktu itu bagi seorang prajurit, perampokan merupakan hak penakluk dari pihak yang menang perang, sehingga perampokan dianggap terhormat.

C.2. VOC sebagai Kekuatan Baru

Dibandingkan dengan Belanda (Ekspedisi pertama Belanda di bawah pimpinan **Cornellis de Houtman** tiba di Banten tahun 1596) dan Inggris (ekspedisi pertama Inggris di bawah pimpinan **Sir Francis Drake** yang singgah di Ternate, Sulawesi dan Jawa diakhir tahun 1579) yang baru datang ke wilayah ini menjelang akhir abad ke-16, maka organisasi perdagangan Portugis memang kelihatan kuno dan kurang efisien. Organisasi dagang yang dibentuk para pedagang dan penguasa Belanda, yaitu *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) mempunyai tujuan utama yang jelas, yaitu dagang. Ketegasan itu antara lain tercermin dari hirarkhi VOC itu sendiri. Jabatan “Eerste Koopman” misalnya, dalam hirarkhi VOC merupakan jabatan penting dan strategis. Pada zaman kejayaannya, hampir semua mantan pejabat “Eerste Koopman” menjadi gubernur jenderal.

Dalam menanamkan pengaruhnya di Nusantara, baik Portugis maupun Belanda banyak mempergunakan pola-pola konflik setempat. Disamping itu mereka juga membawa konflik-konflik mereka di Eropa ke wilayah ini, yang kemudian juga dipergunakan oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia. Sejak berdirinya, VOC sudah mempersiapkan diri untuk peperangan, terutama melawan musuh-musuhnya di

Eropa. Pertama melawan Portugis dan Spanyol, setelah itu EIC (Inggris). Permusuhan antar kekuatan Barat ini tidak saja karena pada dasarnya telah bermusuhan di Eropa, melainkan juga karena persaingan dagang di kepulauan Indonesia dan Semenanjung Melayu, di mana tiap-tiap pihak ingin memperoleh monopoli atas perdagangan tersebut.

C.3. Aceh dan kekuatan Barat

Seperti telah disebutkan bahwa penguasaan kota Malaka oleh Portugis telah mengacaukan struktur perdagangan di Asia Tenggara, khususnya kepulauan Indonesia dan Semenanjung Melayu. Banyak pedagang Asia yang menghindari kota Malaka yang telah dimonopoli Portugis yang secara tidak langsung membuat peranan Malaka sebagai pelabuhan transit semakin merosot. Sebaliknya di beberapa daerah, terutama yang di jalur perdagangan baru, tumbuh dan berkembang kota-kota dagang baru, yang beberapa di antaranya berkembang menjadi pusat kekuatan politik baru di wilayah ini.

Aceh misalnya, pada tahun 1511 di bawah kekuasaan Sultan Ali Mughayat masih merupakan satu pelabuhan kecil yang berada di bawah kekuasaan Pidie. Sewaktu Malaka direbut Portugis, sebagian besar komunitas dagang Asia berpindah ke Aceh. Penghidupan utama dari penduduknya adalah menangkap ikan (nelayan), dengan pekerjaan sampingan adalah merampok di laut, termasuk merampok kapal-kapal Portugis. Dengan kekuatan sekitar 30 kapal (*lankhara*), Aceh di bawah Sultannya yang pertama, Ali Mughayat (?1514-1530) berhasil menyergap kapal-kapal Portugis dan memperoleh meriam-meriam dari hasil rampokan tersebut. Dalam tahun 1530 diberitakan bahwa jumlah meriam yang dimiliki Aceh lebih banyak daripada yang meriam Portugis yang ada di benteng Malaka.

Dengan meningkatnya kekuatan dan persenjataan itu, Aceh menaklukkan Pidie yang sebelumnya merupakan tuannya. Setelah itu Aceh memperluas hegemoninya ke selatan, ke Deli dan Sumatera Barat. Pada tahun 1524 Pedir dan Pasai berhasil dikuasai Aceh, setelah pasukannya berhasil mengusir garnisun Portugis yang ditempatkan di daerah itu. Kemenangan Aceh atas Portugis ini dilengkapi lagi dengan keberhasilannya mengalahkan armada Portugis di Aru. Kemenangan demi

kemenangan itu telah memposisikan Aceh, tidak saja berhadapan dengan Portugis melainkan juga dengan Johor. Untuk sementara waktu Johor bersama-sama dengan Indrapura mampu manahan ekspansi Aceh. Johor berhasil memukul mundur pasukan Aceh dari Aru dan menguasainya sekitar empat puluh tahun berikutnya. Satu hal yang perlu dicatat, daerah-daerah yang ditaklukan Aceh, umumnya merupakan daerah penghasil merica, emas, lada, dan produksi lainnya yang laris di pasaran dunia waktu itu.

Kesultanan Johor adalah pusat kekuatan politik baru dinasti Melayu setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Kesultanan itu berhasil mempertahankan eksistensinya dan mampu mempertahankan perdagangan internasionalnya. Dalam perkembangannya nanti, Johor bersekutu dengan VOC, terutama dalam menghadapi tekanan dari Kesultanan Aceh yang bersekutu dengan Portugis yang bercokol di Malaka. Sampai pertengahan abad ke-17 perdagangan di Selat Malaka dimainkan oleh tiga kekuatan, yaitu Portugis, Aceh, dan Johor. Namun Aceh berkali-kali menyerang Johor, terutama untuk merebut Aru, seperti pada tahun 1564 dan 1565. Pada tahun-tahun itu, Aceh di bawah Sultan Alaudin Riayat Syah al-Kahar (1537-1571) menyerang dan merampok Johor serta menawan rajanya Sultan Alaudin Riayat Syah I dibawa ke Aceh dan kemudian dibunuh. Kemudian pada tahun 1613, kembali armada Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda (1607-1636) menyerang Johor dan menangkap rajanya Sultan Alaudin Riayat Syah II (1597-1613) dan keluarganya, serta sekelompok pedagang VOC dan membakar benteng VOC di kota tersebut

Sultan Iskandar Muda tercatat sebagai penguasa terbesar di antara penguasa-penguasa Aceh. Pada awal abad ke-17 ia berhasil membawa Aceh menjadi kerajaan maritim terbesar di wilayah Nusantara bagian barat. Kekuatan armada perangnya, serta armada dagangnya menjadikan mata uang mas Aceh (*dirham*) disukai dan diterima oleh komunitas pedagang Asia sebagai salah satu alat pembayaran yang sah dalam transaksi perdagangan di samping *Real Spanyol*, *Rijkasdaalder* Belanda atau *Keping Cina*.

Ofensif Aceh terhadap Malaka-Portugis dilakukan berkali-kali. Pada tahun 1614 armada Aceh berhasil mengalahkan armada Portugis di Bintan. Kemudian pada

tahun 1617 Aceh merebut Pahang dan menawan rajanya Sultan Ahmad Syah. Setelah itu pada tahun 1620 giliran Kedah ditaklukkannya dan tiga tahun kemudian, Aceh kembali merampok Johor. Namun baik Johor maupun Portugis tidak pernah menyerang balik ke Aceh. Ofensif militer Aceh baru terhenti setelah pada tahun 1629 armada lautnya menderita kekalahan besar di muka pelabuhan Malaka Portugis. Menurut laporan Portugis, Aceh kehilangan seluruh kapal perangnya berikut 19.000 prajuritnya (hilang dan tewas).

Setelah kekalahan itu, Iskandar Muda tidak pernah menyerang Malaka Portugis lagi. Dua kali ia mengirim ekspedisi lautnya, namun kedua-duanya hanyalah untuk menumpas pemberontakan di Pahang. Meskipun Iskandar Muda berhasil menjadikan Aceh negara terkuat di bagaian utara pulau Sumatera, namun dia tidak pernah mengirimkan ekspedisi untuk menaklukan Lampung, Sumatera bagian selatan, yang merupakan daerah penghasil lada. Waktu itu Sumatera bagian selatan berada di bawah pengaruh Kesultanan Banten.

Di pulau Sumatera Aceh secara terus menerus menentang kekuasaan Portugis dan Belanda. Oleh karena itu kesultanan itu dilihat oleh Portugis sebagai kekuatan Islam yang menentang kehadirannya. Satu fakta yang menunjang anggapan itu karena memang Aceh sering mengibarkan bendera Islam dalam peperangannya melawan Portugis dan VOC. Meskipun demikian tidak selamanya Aceh bertentangan dengan Portugis. Kadang-kadang Aceh juga mengadakan persekutuan dengan Portugis dalam menghadapi kesultanan Johor (yang Islam) atau persekutuan Johor-VOC. Pada dasarnya konflik maupun persekutuan seperti di atas adalah soal yang lazim, karena kepentingan-kepentingan tertentu, tidak semata-mata karena alasan politis melainkan juga ekonomi.

Kebesaran kesultanan Aceh tidak hanya terletak pada kekuatan militernya semata, melainkan karena kemampuannya untuk menjalin hubungan diplomatik dengan dunia Asia Barat, terutama Turki yang disebut oleh masyarakat Aceh sebagai *Raja Rum*. Dengan jatuhnya Aden ke tangan Turki Usmani di tahun 1538, penghidupan perdagangan merica ke Timur Tengah melalui Laut Merah yang sempat terhenti oleh kehadiran kekuatan maritim Portugis di Lautan Hindia, kembali

berkembang. Dari beberapa negara Nusantara yang, kemungkinan besar hanya Aceh yang mempunyai hubungan internasional. Duta-duta Aceh tidak hanya sampai ke Istanbul, Turki, tetapi juga mengunjungi raja-raja Eropa seperti Ratu Elizabeth dari Inggris, bahkan juga Pangeran Maurice dari Belanda. Di Asia sendiri duta Aceh antara lain berkunjung ke Moghul, India. Dari misi-misi diplomatik itu, hubungan dengan Turki yang paling membawa hasil yang tetap dan besar. Turki melihat kehadiran Aceh sebagai suatu kesempatan untuk memerangi Portugis-Spanyol di wilayah Timur atau dari belakang. Sebagai bukti dari perhatian itu, pada tahun 1567 Turki mengirimkan 500 orang pelatih artileri (meriam) ke Aceh beserta sejumlah meriamnya, antara lain meriam yang diberi nama “Lada sacupak” yang ukurannya sangat besar dan dianggap sebagai pusaka penting waktu itu. Di samping itu orang-orang Turki mengajarkan cara membuat meriam kepada orang-orang Aceh. Di duga bantuan-bantuan militer itu dibayar dengan hasil perdagangan merica atau lada yang merupakan hasil ekspor Aceh yang utama dan menguntungkan.

Ada satu faktor yang membuat Aceh tidak mampu mengembangkan dirinya menjadi kerajaan besar di Nusantara, yaitu intrik-intrik di dalam istananya sendiri, baik di kalangan elit-elit pusat maupun di daerah. Setelah Iskandar Muda meninggal, peranan Aceh dalam politik maupun perdagangan terus merosot, sehingga memberi kesempatan kepada Johor untuk membenahi dirinya. Johor kemudian berhasil menegakkan kembali pengaruhnya di semenanjung Malaya dan kawasan selat bagian selatan.

C.4. Raja-raja Jawa dan Kekuatan Barat

Jatuhnya kota Malaka ke tangan Portugis, menyebabkan kota-kota lama di pesisir utara Jawa seperti Sunda Kalapa, Cirebon, Jepara, Pati, Kudus, Tuban, Gresik dan Surabaya, ramai dikunjungi para pedagang manca negara. Bahkan di beberapa daerah tumbuh pula kota dagang baru, antara lain Banten.

Para penguasa di Jawa melihat Portugis sebagai saingan dan ganjalan dalam perdagangan mereka. Jepara misalnya, melihat Portugis sebagai saingan utama dalam perdagangan lada yang kedua-duanya mengambil barang dagangan itu dari Maluku. Kemudian Demak sebagai pengeksport beras ke Malaka, menjadi rugi setelah kota

tersebut jatuh ke tangan Portugis. Faktor-faktor inilah dan juga isu-isu perang agama yang mendorong Demak, Jepara dan Kudus bersatu untuk menyerang Malaka. Ekspedisi penyerangan dilakukan pada tahun 1513 di bawah Pati Unus. Konon ekspedisi ini terdiri dari 100 buah kapal perang serta membawa 5000 prajurit gabungan dari Jepara dan Palembang.. Namun ekspedisi itu dapat dikalahkan oleh Portugis. Kemudian pada tahun 1551 Jepara kembali mengirimkan ekspedisinya membantu Johor untuk menyerang Malaka Portugis yang juga berakhir dengan kegagalan. Pada tahun 1574 Jepara sekali lagi mengirimkan ekspedisinya mengepunga Malaka Portugis selama tiga bula. Namun juga tidak berhasil melumpuhkan kekuatan Portugis di kota pelabuhan itu.

Kegagalan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara untuk merebut Malaka pada dasarnya karena kekuatan Islam di kepulauan Nusantara tidak mau bersatu melawan Portugis maupun Belanda (VOC). Bahkan di antara mereka juga saling mencurigai. Malaka sendiri akhirnya jatuh oleh serangan gabungan antara Johor-VOC.

Eksistensi kerajaan-kerajaan maritim Jawa dengan kekecualian Banten, tidak bertahan lama. Kebesaran mereka sebagai kekuatan maritim terus merosot bukan karena dikalahkan oleh kekuatan Portugis atau pun VOC, melainkan oleh kekuatan baru yang muncul di pedalaman Jawa, yaitu Mataram. Kerajaan ini yang berdiri sejak tahun 1575 terus menerus melakukan ofensif terhadap kerajaan-kerajaan maritim, khususnya di pantai utara Jawa, bahkan sampai ke Batavia. Bayangan kejatuhan Majapahit yang menghantui para penguasa di Mataram membuat mereka berupaya mematikan sumber-sumber pendukung politik dan ekonomi kerajaan-kerajaan tersebut, yang secara tidak langsung mematikan perdagangan laut mereka.

Kedatangan pedagang baru, termasuk VOC dan EIC (Inggris) seringkali mendatangkan harapan-harapan baru bagi raja-raja di Nusantara. Demikian pula sewaktu Belanda dan Inggris datang di akhir abad ke-16 disambut dengan baik. Banten misalnya mengizinkan VOC dan EIC membuka kantor dagangnya di kota pelabuhannya. Demikian pula Pangeran Jayakarta mengundang masuk VOC untuk membuka kantor dagangnya di kotanya. Namun politik monopoli yang dikembangkan VOC membuat penguasa Jayakarta merasa dirugikan. Lalu Pangeran

Jayakarta bersekutu dengan EIC yang juga merasa dirugikan oleh VOC, untuk bersama-sama mengusir VOC. Di saat-saat kritis bagi kekuatan VOC di Jayakarta tertolong oleh tindakan raja Banten yang curiga atas tindakan Pangeran Jayakarta. Raja Banten menilai tindakan Pangeran Jayakarta membahayakan kedudukan Banten. Oleh karena itu Banten menangkapnya dan mengusir EIC dari Jayakarta. Dalam saat kekuatan Jayakarta kosong, armada VOC yang didatangkan dari Maluku datang menyerang Jayakarta. Kota itupun jatuh ke tangan VOC dan diubah namanya menjadi Batavia.

Setelah berhasil menguasai Batavia, J.P. Coen memindahkan kantor pusat dagang VOC dari Ambon ke Batavia. Namun untuk menguasai seluruh perdagangan di Nusantara, VOC harus menunggu waktu yang relatif lama. Di sebelah barat, Banten tampil sebagai salah satu kekuatan maritim di Jawa sekaligus sebagai saingan berat dalam perdagangan yang terus menerus menentang VOC seperti halnya Aceh terhadap Malaka-Portugis. Sementara tantangan dari kekuatan maritim di sebelah timur seperti, Surabaya, Pacitan, Pasuruan, Kudus, dan Demak relatif tidak ada karena kerajaan-kerajaan tersebut sedang menghadapi kekuatan Mataram.

C.4.1. Runtuhnya Mataram

Masa kejayaan Mataram terjadi pada masa kekuasaan Sultan Agung (1613-1646). Pada masa itu Mataram dua kali menyerang Batavia, yaitu: pada tahun 1628 dan tahun 1629. Atas kegagalan itu Sultan Agung telah menghukum mati para panglimanya.

Sejak keagalannya itu, Mataram mencoba mencari sekutu dengan mendekati Portugis dan India. Namun upaya itu dihentikan karena menurut penilaian Sultan Agung, kekuatan Portugis tidak akan mampu mengalahkan VOC. Setelah itu Mataram berbalik melakukan hubungan baik dengan VOC. Bagi VOC sendiri, berhubungan baik dengan Mataram jauh lebih menguntungkan daripada terus-terusan berperang. VOC memilih mengirimkan upeti ke istana Mataram sebagai tanda mengakui kebesaran Mataram di bawah Sultan Agung. Imbalannya armada Mataram menghentikan serangan-serangannya terhadap kapal-kapal dagang VOC.

Setelah Sultan Agung wafat, Mataram dikuasai oleh penguasa-penguasa yang lemah, bahkan kemudian sangat tergantung kepada VOC. Diawali oleh Amangkurat I dan Amangkurat II yang meminta bantuan VOC untuk menumpas perlawanan Trunojoyo. Ketergantungan pun semakin menjadi-jadi setelah kerajaan ini didera oleh intrik-intrik perpecahan di dalam istana serta pemberontakan dari pangeran-pangeran di negara-negara bawahannya. Pada tahun 1704 misalnya, VOC membantu Pangeran Puger yang berselisih dengan raja Mataram Sunan Amangkurat III (1703-1708) yang merupakan keponakannya sendiri. VOC membantu Puger karena jauh lebih menguntungkan daripada Amangkurat III yang politiknya mulai menjauhi VOC bahkan disebut-sebut ikut melindungi pemberontak Untung Surapati. Pasukan gabungan VOC dengan Puger akhirnya berhasil memenangkan peperangan. Amangkurat III ditangkap dan dibuang ke Sri Lanka.

Sebagai imbalan atas bantuannya, Puger yang kemudian bergelar Susuhunan Paku Buwono I (1704-1719) memberikan beberapa konsesi-konsesi seperti : (1) mengakui batas-batas Batavia, termasuk Priangan yang diajukan VOC, (2) menyetujui bahwa Cirebon merupakan daerah perwalian VOC, (3) mengakui kekuasaan VOC atas Semarang, (4) memberikan hak membangun benteng di mana saja di Jawa, dan (5) memberikan hak monopoli atas perdagangan candu dan tekstil.

Pertentangan antara Pangeran Puger dan Amangkurat III terbukti bukanlah intrik-intrik terakhir yang terjadi di istana Mataram. Pertentangan di kalangan istana kembali mengguncang istana Mataram sejak tahun 1740-an sampai tahun 1750-an, terutama antara pihak Paku Buwono II, Pangeran Mas Said, dan Pangeran Mangkubumi. Akhirnya berdasarkan perjanjian Gianti (13 Februari 1755) Mataram dipecah menjadi dua, yaitu Surakarta di bawah kekuasaan Paku Buwono dan Jogjakarta di bawah kekuasaan Mangkubumi yang kemudian menggunakan gelar Sultan Hamangkubuwono. Beberapa tahun kemudian sebagian dari Surakarta dipecah menjadi Mangkunegaran. Demikian juga sebagian Jogjakarta menjadi wilayah Pakualaman.

C.4.2. Runtuhnya Banten

Di ujung barat Jawa, kerajaan Banten pada dasarnya kekuasaannya jauh lebih kecil dibandingkan Mataram. Namun kekuatan armada dagangnya jauh lebih kuat dibandingkan Mataram. Pada masa Sultan Ageng (1651-1683) yang dikenal dengan sebutan Sultan Tirtayasa, Banten berhasil membangun armada dagang dengan menggunakan model Eropa. Kapal-kapalnya yang menggunakan surat jalannya melayari jalur-jalur perdagangan Nusantara. Bahkan dengan menjalin hubungan baik dengan Inggris, Denmark dan Cina, Banten dapat berdagang dengan Persia, India, Siam, Vitenam, Cina, Filipina, dan Jepang. Fakta ini sekaligus menunjukkan bahwa sampai menjelang akhir abad ke-17, Banten masih mampu melakukan perdagangan internasional jarak jauh, sekaligus mematahkan ambisi VOC yang ingin memonopoli perdagangan lada. Seperti halnya Mataram, kerajaan Banten mengalami kemunduran karena didera konflik dalam negeri, yang kemudian mengundang hadirnya VOC.

Putera Mahkota yang baru naik tahta yang kemudian bergelar Sultan Haji (1682-1687) ternyata memiliki kebijakan politik yang tidak sejalan dengan ayahnya. Jika ayahnya sangat anti VOC, sebaliknya ia ingin menjalin hubungan dengan kongsi dagang Belanda itu. Otomatis ayahnya dan para elit politik Muslim militan lainnya menentang keras kebijakan tersebut. Pertentangan ini akhirnya meledak menjadi konflik terbuka yang disertai tindakan kekerasan. Pada tahun 1680. Ageng Tirtayasa, yang masih diakui oleh sebagian masyarakat Banten sebagai sultan, mengumumkan perang terhadap VOC yang telah menganiaya para pedagang Banten. Sultan Haji yang kedudukannya terjepit karena dijauhi para elit politik dan elit agama Islam, akhirnya menerima semua prasyarat yang diajukan VOC sebelum membantunya. Tuntutan VOC itu antara lain:

- (1) semua budak-budak yang lari dari Batavia ke Banten harus dikembalikan walaupun sudah menjadi Islam,
- (2) Semua para perampok yang mengacaukan Batavia harus dihukum dan VOC diberi ganti rugi,

- (3) Banten harus menarik kembali dukungannya terhadap para pemberontak Mataram yang melawan VOC, dan
- (4) Banten tidak boleh lagi melakukan hubungan dagang dengan para pedagang lain, terutama pedagang Eropa, kecuali dengan VOC.

Pada bulan Maret 1682 sebuah armada dibawah pimpinan **François Tack** dan **Isaac de Saint-Martin** berlayar menuju Banten. Pada waktu itu kekuatan Sultan Haji dalam keadaan kritis, terkepung oleh kekuatan ayahnya. Datangnya bantuan itu menyelamatkannya dan kemudian dengan bantuan kekuatan VOC Sultan Haji berbalik mengusir kekuatan ayahnya ke daerah pedalaman. Usia yang cukup tua rupanya tidak cukup mendukung gerakan Sultan Tirtayasa. Akhirnya pada bulan Maret 1683 dia bersama Syaikh Yusuf ulama asal Makasar tertangkap. Sultan Tirtayasa dibawa ke Batavia, sementara Syaikh Yusuf dibuang ke Tanjung Harapan, Afrika. Tahun 1695 Sultan Tirtayasa meninggal dalam masa tahanannya. Kemenangan Sultan Haji dengan bantuan VOC ini sekaligus mengakhiri masa kejayaan dan kemerdekaan Banten.

Meskipun Sultan Haji telah menerima semua prasyarat VOC, namun para pendukung Sultan Tirtayasa masih terus melakukan perlawanan, antara lain dibawah pimpinan Kyai Tapa dan Ratu Bagus Buang (pewaris tahta Banten yang sempat dibuang VOC). Serangan-serangannya terhadap kepentingan VOC secara sporadis sangat menyulitkan VOC seperti terjadi di Selat Sunda, sekitar Bandung, Bogor (Buitenzorg), dan akhirnya melibatkan diri dalam pemberontakan di Mataram. Setelah itu dia menghilang beserta pengikutnya.

Dengan takluknya Mataram dan Banten, perdagangan di pulau Jawa praktis didominasi oleh VOC, terutama yang berkaitan dengan perdagangan internasional.

C.5. Supermasi VOC di Kep. Indonesia bagian Timur

Dalam menghadapi para penguasa-penguasa di kepulauan Indonesia bagian timur, VOC menjalankan politik dan taktik yang relatif sama dengan yang mereka praktikan di Jawa. Di kepulauan Maluku misalnya, VOC berusaha melumpuhkan perlawanan kaum Muslim Hitu di bawah pimpinan Kakiali yang bergelar *Kapitein*

Hitu (semula yang mendapat gelar ini adalah ayahnya yang pro VOC) dengan berupaya mendekati raja Ternate.

VOC menyatakan bersedia mengakui kedaulatan Ternate atas Seram dan Hitu serta menggaji raja Ternate sebesar 4.000 *Real* Spanyol setahun. Sebagai imbalannya, Ternate harus menghentikan semua penyelundupan perdagangan cengkeh dan diserahkan kepada VOC. Perjanjian ini menjadi tidak efektif karena Kakiali sebagai *kapitein Hitu* tidak bersedia mengikuti perjanjian itu. Namun ada satu hal yang menguntungkan VOC, yaitu Malaka telah berhasil mereka kuasai (1641) sehingga kekuatan lautnya bisa dipusatkan untuk menumpas perlawanan Kakiali dan kawan-kawannya. Akhirnya VOC berhasil membunuh Kakiali setelah terlebih dahulu berhasil membujuk seorang kebangsaan Spanyol yang menjadi pengikut Kakiali. Setelah Kakiali dibunuh, benteng pertahanan kaum Muslim Hitu berhasil direbut. Meskipun demikian orang-orang Hitu terus melakukan perlawanan secara sporadis dan berkali-kali membentuk komplotan anti VOC.

Kesempatan VOC untuk menguasai perdagangan di Maluku pun semakin terbuka, sewaktu raja Ternate Mandarsyah dikudeta oleh kalangan istana dan melarikan diri ke benteng VOC untuk minta bantuan. VOC mengabulkannya dengan menyodorkan berbagai persyaratan yang sangat menguntungkan VOC, antara lain mengenai monopoli perdagangan cengkeh. Setelah itu sejak tahun 1652 sampai 1658 terjadi peperangan di sekitar Hoamoal yang berakhir dengan kemenangan VOC. Penduduk Hoamoal yang tersisa yang masih anti VOC dibuang ke Ambon dan semua tanaman di daerah itu dimusnahkan. Hegemoni VOC di Maluku semakin lengkap setelah tahun 1663, Spanyol menyerahkan sisa-sisa pos mereka yang berada di Ternate dan Tidore. Kemudian Spanyol menarik semua kekuatannya ke Filipina.

Setelah Ternate dapat diatasi, untuk sementara waktu Maluku dianggap 'aman' oleh VOC, sehingga VOC mempunyai cukup waktu untuk memusatkan perhatiannya ke Makasar (Gowa-Tallo). Kerajaan ini menjadi satu-satunya kekuatan maritim di timur yang menjadi saingan VOC. Makasar dinilai oleh VOC menjadi pusat perdagangan rempah-rempah 'gelap' yang membahayakan. Pihak Belanda

masih melihat pedagang-pedagang Portugis masih aktif di sana sejak mereka kehilangan Malaka.

Namun untuk menundukkan Gowa bukan masalah kecil. Seperti juga di daerah-daerah lain, VOC baru mampu menundukkan lawannya, jika ada suatu kelompok berpengaruh di kerajaan tersebut yang mau bersekutu dengan pihaknya. Akhirnya VOC dapat menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis, La Tenriatta to Unru' (1634-1696), yang terkenal dengan nama Arung Palaka.

Penguasaan Gowa atas kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan lainnya memang masih memberikan otonomi yang cukup luas bagi penguasa setempat. Namun bagaimanapun tindakan penguasa Gowa atas mereka tetap menimbulkan rasa benci. Pada tahun 1660 sekitar 10.000 orang Bugis dari Bone (termasuk Arung Palaka) pernah melakukan pemberontakan, namun gagal. Dari sekian orang yang berhasil lolos, lalu pergi ke pulau Butung meminta bantuan VOC. Kesempatan ini dipergunakan dengan baik oleh VOC. Pada tahun 1667 kekuatan gabungan antara VOC dan Bone berhasil mengalahkan Makasar. Sultan Hasanuddin sebagai Sultan Makasar terpaksa harus menandatangani perjanjian Bongaya (18 November 1667) yang sangat merugikan, terutama bagi perkembangan ekonomi masyarakat di Makasar dan Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin mencoba melawan kembali mulai bulan April 1668 sampai Juni 1669. Namun kekuatan Makasar kembali mengalami kekalahan yang lebih menentukan, sehingga Makasar benar-benar harus melaksanakan perjanjian Bongaya.

Setelah Makasar runtuh, secara teori tidak ada lagi kekuatan maritim di kepulauan Nusantara yang mampu mengadakan perlawanan terhadap VOC. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Sultan Tidore, Jamaludin yang naik tahta tahun 1757, mulai menunjukkan perlawanan. Ia tidak puas dengan perjanjian yang telah disepakati penguasa Tidore sebelumnya, yang dinilai sangat memberatkan masyarakat dan pemerintahan Tidore. Ia menolak membayar utang dan pajak-pajak tertentu. Alasannya penghasilan Tidore sendiri menurun terutama karena gangguan para bajak laut. Sultan atas desakan putranya *Kaicil Syaifudin* (lebih dikenal dengan sebutan *Kaicil Nuku*) menolak meratifikasi perjanjian yang memberatkan Tidore,

terutama bagian yang mengharuskan menyerahkan wilayah Seram ke pihak VOC. Akibat pembangkangannya itu pada tahun 1779 ia ditangkap dan dibuang ke Sailan.

C.6. Runtuhnya VOC dan Perlawanan ‘Prins Rebel’ Nuku.

Pada dasarnya, sejak tahun 1760-an masa kejayaan VOC sebagai kongsi dagang dunia sudah mulai meredup. Keterlibatannya dalam berbagai konflik lokal dan penguasaan teritorial yang semakin luas, membuat keuntungan dagangnya terkuras. Kondisi ini diperparah oleh korupsi yang merajalela di kalangan para pejabat VOC, sehingga sejak pertengahan abad ke-18 VOC tidak lagi mengirimkan keuntungan ke negeri induknya, tetapi sebaliknya, justru mengutang. Akhirnya pemerintah Belanda mengambil alih semua utang-piutang VOC. Namun sebelum raja Belanda bertindak, pada bulan Desember 1794-Januari 1795 Perancis menyerbu Belanda dan memaksa raja Oranje lari ke Inggris.

Sejak tahun 1796 nama VOC sudah tidak ada lagi di Eropa. Namun di Hindia Timur nama itu diputuskan oleh penguasa baru Belanda untuk tetap dipakai sampai dengan berakhirnya oktroi VOC sampai bulan Desember 1799. Untuk mengawasi kegiatan di daerah koloni seperti Hindia Timur, kemudian dibentuk Kementrian Perdagangan Jajahan yang kemudian berubah menjadi Kementrian Urusan Jajahan (*Ministerie van Koloniën*).

Dalam ‘masa transisi’ ini, barangkali satu-satunya kerajaan di Nusantara yang mampu memanfaatkannya adalah Nuku dari Tidore. Sebenarnya perlawanannya terhadap VOC telah diperlihatkan sejak pertengahan tahun 1798. Pada bulan Desember 1798 benteng Teluko, Ternate direbut oleh Nuku. Akan tetapi ia terpaksa menahan kemarahannya terhadap VOC karena ayahnya menasehati agar dia tidak mengangkat senjata, sebelum berhasil melakukan reorganisasi pemerintahan. Ia pun terpaksa menahan kegeramannya melihat ayahnya dihukum dan dibuang ke Sailan pada tahun 1799.

Sikap Nuku berubah setelah VOC secara sewenang-wenang mengangkat Patra Alam sebagai Sultan Tidore yang baru, yang sekaligus telah melanggar tradisi dan hukum adat setempat. Patra Alam bukan keturunan Sultan Jamaludin, sultan

Tidore yang sah; namun dikenal sangat setia kepada VOC. Secara hukum tradisi dan hukum adat, *Kaicil* Nuku lah yang berhak menjadi Sultan Tidore.

Pihak VOC awalnya menilai akan mudah memadamkan perlawanan Nuku. Ternyata Nuku yang digelar nama *Prins Rebel alias Pengeran Pemberontak* sangat cerdas, baik dalam siasat perang maupun diplomasi. Ia dapat memanfaatkan kekurangan yang ada pada sistem pemerintahan VOC di kepulauan Maluku yang terdiri dari tiga gubernuran yang masing-masing berpusat di Ternate, Ambon dan Banda. Ia mampu pula mengadu domba para pejabat VOC. Sebagai contoh Gubernur Ambon, Bernardus van Pleuren tidak pernah memberi otorisasi atau izin kepada Gubernur Ternate Carnabè untuk memasuki wilayah Ambon guna mengejar atau memerangi Nuku di Seram. Bahkan terjadi sesuatu yang aneh, sewaktu Carnabè dan Patra Alam giat memerangi Nuku, justru van Pleuren mengirim tekstil dan beras serta sebetuk cincin bertatahan batu Sulaiman kepada musuh besar Kompeni itu. Selain memecah kekuatan VOC, Nuku juga berhasil menjalin hubungan baik dengan EIC, saingan dagang VOC dari Eropa yang masih berdiri tegak di wilayah India sampai Asia Tenggara.

Berkali-kali armada militer Carnabè terkecoh oleh laporan-laporan palsu yang sengaja disebar luaskan oleh Nuku. Sebaliknya, beberapa wilayah di Maluku Utara yang semula berada di bawah pengaruh VOC, satu persatu dapat direbut oleh Nuku dan menyatakan setia kepadanya.

Seperti biasa VOC selalu berusaha mencari orang-orang dari pihak lawan yang dapat dibelinya, agar menjadi kaki tangannya. Upaya VOC itu memang berhasil. Salah seorang saudara kandung Nuku yaitu *Kaicil* Hasan, berhasil dibujuknya untuk mengkhianati Nuku. Namun siasat dan taktik yang dikembangkan oleh Nuku berhasil meredam kekuatan para pengkhianat itu.

Nuku diakui oleh para pengikutnya sebagai Sultan Tidore dengan gelar *Sri Paduka Maha Tuan Sultan Saidul Jihad Muhamad Aminudin Syah Kaicil Paparangan*. Pada 14 November 1805 yang bertepatan dengan tanggal 21 Syahban 1220 meninggal dunia dalam usia 67 tahun.

D. Pembentukan Pemerintahan Kolonial

D.1. Pemerintahan VOC.

Pada masa *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC), gubernur jenderal merupakan penguasa tertinggi di Hindia. Ia mempunyai kekuasaan yang nyaris tak terbatas seperti halnya seorang raja absolut karena tidak ada undang-undang yang khusus mengatur hak-hak dan kewajibannya. Demikian pula dengan struktur pemerintahannya di Asia, khususnya Hindia Timur juga tidak ditentukan. Salah satu pasal yang penting dari *oktroi* VOC adalah hak monopolinya, sehingga dengan haknya itu VOC merupakan satu-satunya badan dari Belanda yang boleh mengirimkan kapal-kapal ke daerah sebelah timur Tanjung Harapan.

Dalam melaksanakan pemerintahannya, gubernur jenderal didampingi oleh *Raad van Indië* (dalam prinsipnya terdiri atas enam orang anggota dan dua anggota luar biasa, di mana gubernur jenderal merangkap sebagai ketua). Laporan-laporan mengenai aktivitas VOC secara berkala dikirimkan ke dewan *Heeren XVII*, yang merupakan pimpinan pusat VOC yang berkedudukan di Amsterdam.

Dalam menangani wilayah kekuasaannya, VOC lebih banyak melakukannya melalui pemerintahan tidak langsung. Hanya daerah-daerah tertentu saja, seperti Batavia, yang diperintah secara langsung oleh VOC. Dalam sistem seperti ini, kaum pribumi nyaris tidak terlibat dalam struktur kepegawaian VOC. Meskipun kaum elit pribumi terlibat dalam pemerintahan, tetapi status mereka bukan pegawai VOC dan tidak digaji secara tetap oleh kongsi dagang tersebut. Para elit pribumi lebih banyak diperlakukan sebagai mitra kerja demi kepentingan VOC. Hal ini terlihat jelas di daerah-daerah yang diperintah secara tidak langsung. Di daerah semacam itu, VOC membiarkan struktur lama (tradisional) tetap berdiri. Melalui para elit tradisional inilah kepentingan VOC disalurkan, antara lain dalam hal penarikan-penarikan wajib hasil produksi serta pajak-pajak yang dikenal dengan sistem *leverantie* dan *contingenten* (leveransi dan kontingensi).

D.2. Masa Peralihan (Proses menuju Hindia Belanda)

Pemerintahan Daendels. Seperti telah disebutkan sebelumnya, sebenarnya VOC sudah tidak ada sejak tahun 1796. Akan tetapi, baru pada tanggal 1 Januari 1800—setelah masa berlaku *oktroi*-nya berakhir—pembubaran VOC secara resmi diumumkan. Berkenaan dengan hal itu, semua utang-piutang kongsi dagang itu menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Demikian pula dengan daerah kekuasaannya.

Peralihan kekuasaan dari VOC ke pemerintah Belanda sendiri tidak membawa dampak yang cukup berarti bagi wilayah Hindia Timur. Hal ini antara lain karena di Negeri Belanda sendiri masih terjadi kekacauan setelah **Napoleon Bonaparte** dari Prancis menyingkirkan **Raja Willem van Oranje** dan mendudukkan saudaranya, **Louis Napoleon**, sebagai raja baru Belanda.

Dalam masa peralihan ini, pemerintah Belanda yang baru belum memperhatikan daerah koloninya sehingga para pejabat di wilayah Hindia Timur masih dipegang orang-orang lama. Akan tetapi, para pejabat Belanda di Hindia sendiri dilanda kebingungan setelah adanya surat edaran dari Raja Willem yang meminta agar wilayah Hindia diserahkan kepada Inggris. Akibatnya, mereka bingung untuk memilih menuruti perintah raja Belanda yang baru (Louis Napoleon) atau raja Belanda yang lama (Raja Willem).

Dilema yang dihadapi oleh para pejabat Belanda di Hindia tidak berlangsung lama karena pada tahun 1808 Louis Napoleon mengirimkan **Marsekal Herman Willem Daendels** ke Batavia untuk menempati posnya sebagai Gubernur Jenderal Hindia Timur. Daendels (yang berkuasa antara tahun 1808-1811) dapat dikatakan sebagai Gubernur Jenderal pertama yang mewakili raja Belanda dan sekaligus pula sebagai pemerintahan kolonial pertama di Hindia (**sebagai catatan:** VOC merupakan kongsi dagang yang berada di bawah Heeren XVII). Daendels sendiri dikenal sebagai sosok pemuja prinsip-prinsip pemerintahan yang revolusioner, perpaduan antara semangat pembaruan dan metode-metode kediktatoran.

Tugas utama Daendels adalah melakukan reorganisasi pemerintahan serta mempertahankan wilayah ini dari kemungkinan datangnya serangan Inggris. Sebenarnya, pada saat itu secara militer kondisi tentara kolonial Hindia Timur yang menggantikan VOC tidak terlalu besar. Sebagai contoh, ketika Daendels tiba di Jawa, garnisun Belanda di Yogyakarta hanya berjumlah sekitar 89 orang serdadu. Kebanyakan di antara mereka masih sangat muda atau terlalu tua, dengan disiplin yang relatif rendah. Sebaliknya, pada saat yang sama Kerajaan Yogyakarta mempunyai 1.765 orang prajurit reguler, yang sewaktu-waktu dapat ditingkatkan jumlahnya hingga 100.000 prajurit. Akan tetapi karena kerajaan-kerajaan di Jawa saling curiga sementara di istana mereka terdapat berbagai intrik dan kepentingan politik, keunggulan tersebut sama sekali tidak dimanfaatkan untuk membebaskan dirinya dari cengkeraman Belanda.

Di Yogyakarta Sultan Hamangkubuwono II bertengkar dengan saudara-saudaranya, terutama Pangeran Natakusuma yang cerdas, cakap, dan berpengaruh di istana. Kondisi ini diperburuk lagi oleh tindakan Sultan yang mengganti para pejabat lama dengan orang-orang yang disukainya, walaupun orang itu kurang cakap. Para mantan pejabat yang dongkol ini kemudian berkomplot dengan sebuah kelompok istana yang berada di sekeliling putra mahkota.

Pada masa Daendels, pemerintahan di Jawa dipusatkan dan langsung berada di bawah kekuasaannya. Salah satu tuntutan Daendels yang paling menyakitkan raja-raja Jawa adalah tuntutan agar para penguasa di Surakarta dan Yogyakarta memperlakukan utusan-utusan dari pemerintah Hindia Timur sebagai wakil pemerintahan Eropa sehingga mereka harus diperlakukan sederajat dengan raja-raja Jawa sendiri. Tentu saja hal itu merupakan pelanggaran terhadap tradisi yang ada, yang telah disepakati pula oleh VOC. Pada masa VOC, para utusannya diperlakukan sebagai duta-duta dari sekutu kepada sekutu lainnya, yang berarti kedudukannya tidak sederajat dengan raja. Susuhan Pakubuwono IV menerima perubahan ini, sementara Sultan Hamangkubuwono II menolaknya.

Daendels bertindak tegas terhadap pembangkangan ini. Dia datang ke Yogyakarta dengan membawa 3.200 serdadu (sebagain besar adalah orang pribumi)

dan memaksa Sultan Hamangkubuwono II turun dari takhtanya. Kemudian ia menunjuk putera mahkota sebagai gantinya dengan gelar Sultan Hamangkubuwono III (1810-1811, 1812-1814). Selain itu, Daendels memperoleh 500.000 gulden sebagai pampasan dari Yogyakarta.

Sebelum kedatangan Daendels, pasukan Inggris (dalam rangka perang melawan Napoleon) sebenarnya telah menguasai beberapa wilayah Hindia Timur. Pada tahun 1795, pasukan Inggris menduduki Padang dan Malaka dan tahun berikutnya, pasukan Inggris merebut Ambon. Selain itu, armada laut Inggris juga memblokir Batavia sehingga mengacaukan pendapatan pemerintah Belanda. Ancaman pasukan Inggris terhadap Pulau Jawa sendiri semakin kuat setelah pangkalan Perancis di Mauritius jatuh ke pihak mereka pada tahun 1810.

Politik Daendels pada dasarnya hanya memprioritaskan pertahanan di pulau Jawa. Untuk keperluan mobilitas pasukannya, dia membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan, yang terkenal sebagai jalan pos besar (*het grote postweg*). Namun sebelum serangan Inggris tiba, Daendels ditarik ke Eropa dan kedudukannya sebagai gubernur jenderal digantikan oleh **Jan Willem Janssens**, yang sebenarnya mempunyai reputasi buruk dalam peperangan. Ia telah dikalahkan Inggris di Tanjung Harapan pada tahun 1806.

Pemerintahan Janssens di Hindia hanya bertahan beberapa bulan saja. Pada Agustus 1811, armada Inggris mendaratkan pasukan di Batavia. Janssens mundur ke Semarang dan bergabung dengan Legium Mangkunegara dan prajurit-prajurit Yogyakarta dan Surakarta. Akhirnya, seperti di Tanjung Harapan, pada 18 September 1811, Janssens menyerah kepada pihak Inggris di Kalituntang, Salatiga.

Pemerintahan Raffles. Setelah Janssens menyerah, Gubernur Jenderal Inggris di India, **Lord Minto**, menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jawa (1811-1816). Pada awalnya, raja-raja Jawa menaruh harapan dan merasa senang atas perubahan pemerintahan dari Belanda ke Inggris.

Penguasa lokal yang paling antusias menyambut pemerintahan Inggris adalah Hamangkubuwono II. Setelah merebut kembali takhta Kerajaan Yogyakarta dari

tangan anaknya, dia memerintahkan untuk membunuh Patih Danureja II. Hamengkubuwono II berani bertindak demikian, karena menurut penilaiannya, Raffles sebagai musuh Belanda, tentu akan berpihak kepadanya. Meskipun Raffles adalah musuh 'Revolusi Perancis', namun dia juga seorang 'liberalis'. Seperti halnya Daendels, dia membenci sifat-sifat feodalistik yang sangat menonjol dalam diri Sultan Hamengkubuwono II.

Raffles menganggap Sultan Hamengkubuwono II sangat berbahaya dan sulit diajak untuk bekerja sama. Posisinya berlainan dengan Pakubuwono IV dan Mangkunegara yang dinilai lebih supel dan mudah diajak kerja sama. Oleh karena itu, pada bulan Juni 1812, Raffles mengirimkan pasukan ke Yogyakarta yang terdiri dari 1.200 prajurit kebangsaan Eropa dan India, yang didukung oleh 800 prajurit Legiun Mangkunegara. Istana Yogyakarta digempur dan dirampoknya. Perpustakaan dan arsip-arsip kerajaan dirampas, di samping sejumlah besar uang. Hamengkubuwono II kembali diturunkan dari tahtanya dan kemudian dibuang ke Pulau Penang. Kedudukannya digantikan kembali oleh putranya, Sultan Hamengkubuwono III.

Akan tetapi kemenangan Raffles tersebut menimbulkan perselisihan antara dirinya dengan sekutu Jawanya, Pakubuwono IV. Penguasa Surakarta yang menghendaki hancurnya Yogyakarta, kecewa dengan kebijakan yang diambil Raffles untuk tetap mempertahankan eksistensi Yogyakarta. Kekecewaan itu semakin bertambah ketika penguasa Inggris mengambil alih tanah-tanah *apanase* milik Surakarta serta mengambil alih hak pengelolaan atas cukai lalu lintas dan pasar-pasar.

Selama pemerintahannya, Raffles masih sempat memperkenalkan satu sistem perpajakan baru, khususnya pajak tanah (*landrent*). Di samping itu, Raffles yang menyukai sejarah dan budaya, berhasil menulis sebuah buku tentang Jawa yang berjudul *History of Java*. Masa pemerintahan Inggris di Hindia Timur tidak berlangsung lama. Sesuai Perjanjian London bulan Maret 1814 yang disepakati pemerintah Inggris dengan Raja Willem van Oranje dari Belanda, pada tahun 1816 wilayah Hindia Timur dikembalikan kepada Belanda.

D.3. Pemerintahan Kolonial Belanda

Setelah Napoleon dikalahkan oleh pasukan koalisi, Willem van Oranje kembali menjadi raja di negerinya. naik tahta sebagai *Souverein vorst* (1814), kemudian sebagai raja (1815). Berdasarkan *Grundwet* (konstitusi Kerajaan Belanda), kekuasaan tertinggi atas wilayah jajahan berada di tangan raja. Demikian pula dengan kekuasaan undang-undang. *Staten Generaal* (parlemen) sama sekali tidak diikutsertakan di dalamnya.

Dengan kekuasaannya itu Raja menunjuk tiga orang *Commissaris Generaal*, yaitu **C.Th. Elout**, **G.A.G. Ph. Baron van der Capellen**, dan **A.A. Buyskes**, untuk mengambil alih jajahan Belanda di Asia dari tangan Inggris. Mereka diberikan kekuasaan besar mewakili Pemerintahan Agung (Raja). Sejak masa *Commissaris Generaal* inilah, sebutan *Oost Indië*, atau Hindia Timur, berganti menjadi *Nederlandsch Oost Indië* (Hindia Belanda Timur). Akan tetapi tidak lama kemudian nama tersebut berubah kembali menjadi *Nederlandsch Indië* (Hindia Belanda), seperti terlihat dalam *Staatsblad* (Lembaran Negara) tahun 1816.

Tugas pokok yang dibebankan kepada van der Capellen dan kawan-kawan adalah membangun kembali sistem pemerintahan yang baik di Hindia. Tujuannya agar daerah koloni ini segera dapat memberikan keuntungan kepada negeri induknya, yang sudah banyak terlibat utang, termasuk utang-utang VOC. Akan tetapi kondisi politik di Hindia Belanda yang belum sepenuhnya aman sejak ditinggalkan Daendels.

Perlu diketahui bahwa wilayah yang tercakup dalam negara kolonial Hindia Belanda itu pada awalnya hanya mencakup wilayah-wilayah taklukan VOC atau yang diklaim sebagai taklukan VOC. Kerajaan Aceh, Bangka dan Belitung misalnya, tidak termasuk Hindia Belanda, karena bukan taklukan VOC. Akan tetapi Singapura dan Malaka termasuk Hindia Belanda karena bekas taklukan VOC. Namun dalam perkembangannya kemudian wilayah Hindia Belanda mengalami banyak perubahan.

Pada saat *Commissaris Generaal* memulai tugasnya, ada beberapa daerah taklukkan VOC yang menyatakan tidak terikat lagi oleh perjanjian dengan VOC yang telah runtuh. Sikap tersebut secara otomatis menyatakan bahwa mereka juga tidak terikat dengan negara kolonial Hindia Belanda. Dalam dua dasawarsa pertama pendirian negara kolonial Hindia Belanda, paling tidak ada tiga perlawanan atau pemberontakan yang dinilai sangat mengganggu kewibawaannya, yaitu perlawanan Pattimura di Maluku; perlawanan Diponegoro (*de Java oorlog*) di Jawa; dan perlawanan kaum Padri di Sumatera Barat.

Ada pun yang menjadi landasan operasional di Hindia Belanda diatur berdasarkan *Regeering Reglement* (Peraturan Pemerintah, disingkat RR). Menurut peraturan ini, dalam menjalankan tugasnya gubernur jenderal (anggota *Commissaris Generaal*) didampingi oleh *Raad van Indië* yang beranggotakan empat orang. Gubernur jenderal bersama *Raad van Indië* inilah yang disebut sebagai **Pemerintahan Agung** di Hindia Belanda. Sejak tahun 1816, ada dua instansi yang membantu pekerjaan Pemerintahan Agung di Batavia ini, yaitu *Generale Secretarie* (sekretaris umum) untuk membantu *Commissaris General* dan *Gouvernement Secretarie* (sekretaris pemerintahan) untuk membantu Gubernur Jenderal. Namun kedua lembaga itu berumur pendek dan dihapuskan pada tahun 1819. Kedudukannya kemudian digantikan oleh *Algemene Secretarie*, yang bertugas membantu gubernur jenderal (terutama memberikan pertimbangan keputusan).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam hal-hal tertentu, struktur birokrasi pemerintahan Hindia Belanda sama dengan pemerintahan VOC. Adapun perbedaan yang cukup mencolok di antara keduanya berkaitan dengan kewenangan gubernur jenderal. Apabila pada masa VOC tidak ada aturan khusus yang mengatur kewenangan gubernur jenderal, sehingga dia dapat berimprovisasi sendiri dalam menjalankan pemerintahannya, maka pada masa Hindia Belanda terdapat peraturan yang mengatur kewenangan gubernur jenderal yang tertuang dalam RR. Begitu pula dalam hal pertanggungjawaban, apabila pada masa VOC gubernur jenderal memberikan laporannya kepada *Heeren XVII*, maka pada masa Hindia Belanda dia bertanggung jawab langsung kepada raja, melalui menteri jajahan.

Dalam tata pemerintahan kolonial, Gubernur Jenderal didampingi oleh *Direksi* atau departemen-departemen, yang namanya kemudian menjadi *Departementen van Algemeen Bestuur*. Dalam perkembangannya, lembaga ini seringkali mengalami perubahan, baik dalam susunannya maupun hierarkinya, akibat keadaan di Hindia Belanda sendiri maupun di Eropa (termasuk Negeri Belanda). Salah satu peristiwa yang membawa dampak cukup besar pada tata pemerintahan Hindia Belanda adalah revolusi yang terjadi di Eropa pada tahun 1848. Sejak revolusi itu, dapat dikatakan bahwa di Eropa Barat tidak ada lagi raja yang berkuasa mutlak. Sebaliknya, para penguasa itu kini dibatasi oleh konstitusi. Dalam kasus raja Belanda, kekuasaannya dibatasi oleh *Groundswet* (konstitusi) tahun 1848.

Penerapan *Groundswet* 1848 menyebabkan RR di Hindia Belanda berubah dengan terbitnya RR baru tahun 1864. Berdasarkan RR baru ini, *Direksi* yang berada di bawah gubernur jenderal dibubarkan dan diganti dengan departemen-departemen baru, yang masing-masing berdiri sendiri. Pada tahun 1933, terdapat enam departemen, yaitu sebagai berikut:

- Departemen van Justitie
- Departemen van Financien
- Departemen van Binnenland Bestuur
- Departemen van Onerwijs en Eredeinst
- Departemen Economische Zaken
- Departemen Verkeer en Waterstaat.

Selain keenam departemen sipil di atas, terdapat dua departemen militer, yaitu departemen peperangan dan marine (angkatan laut). Direktur dari departemen-departemen sipil diangkat oleh gubernur jenderal sedangkan panglima angkatan darat dan laut diangkat oleh raja.

Meskipun ada upaya untuk melakukan modernisasi struktur birokrasi pemerintahan Hindia Belanda, namun dalam batas-batas tertentu struktur politik sebelumnya masih tetap dipertahankan, demi mempertahankan loyalitas, khususnya loyalitas para elit pribumi. Hal ini terlihat jelas dari struktur dan jabatan dalam organisasi pemerintahannya. Jabatan-jabatan teritorial di atas tingkat kabupaten tetap

dipegang oleh orang-orang Eropa/Belanda. Jabatan tertinggi yang dipegang oleh orang pribumi adalah kepala kabupaten, yaitu bupati. Bupati ini dibantu oleh seorang patih. Di bawah tingkat kabupaten terdapat kewedanaan yang dijabat oleh seorang wedana. Kecamatan, yang dikepalai seorang camat, merupakan wilayah di bawah kewedanaan. Sedangkan jabatan kepala desa pada dasarnya tidak termasuk dalam struktur birokrasi pemerintah kolonial sehingga bukan merupakan anggota korp pegawai dalam negeri Hindia Belanda.

Korps pegawai dalam negeri Hindia Belanda (*Departemen van Binnenland Bestuur*), terdiri atas pegawai bangsa Eropa dan pribumi. Korp pegawai Eropa disebut *Eropees bestuur* sementara korps pegawai negeri pribumi disebut *inland bestuur*. Kedua korp pegawai ini secara umum disebut *binnenland bestuur* (BB). Dalam bahasa pribumi BB ini disebut *Pangreh Praja* (Pemangku Kerajaan). Para pejabat pribumi inilah yang disebut kaum *priyayi*, suatu istilah yang sebelumnya dipakai di kerajaan Jawa.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, kepala desa tidak termasuk kategori priyayi karena tidak termasuk ke dalam barisan BB. Oleh karena itu, kepala desa tidak diangkat maupun digaji oleh pemerintah. Mereka dipilih langsung oleh rakyat dan digaji oleh rakyat pula, yaitu melalui tanah desa yang diserahkan kepadanya selama dia menjadi kepala desa. Tanah jabatan atau tanah gaji ini di beberapa daerah di Jawa disebut *tanah bengkok*.

Ketika wilayah Hindia Belanda menjadi lebih luas akibat kebijakan politik pasifikasi dan pemantapan (*pax nederlandica*), kebutuhan tenaga kerja untuk mengelola administrasi negara semakin meningkat. Dalam hal ini tenaga-tenaga pribumi semakin banyak terserap ke dalam birokrasi pemerintahan. Selain itu, pengawasan pemerintah pun semakin menukik ke bawah. Meskipun jabatan teritorial dari tingkat kabupaten ke bawah masih tetap dipegang kaum pribumi, namun dengan alasan untuk mendampingi para pejabat itu maka diadakan jabatan-jabatan non teritorial setingkat kabupaten, kewedanaan dan akhirnya juga kecamatan. Apabila di tingkat kabupaten ada jabatan *asisten residen*, maka untuk tingkat kecamatan ada jabatan *controleur*, sementara di bawahnya lagi ada jabatan *aspirant control*

E. Pemerintah Pendudukan Jepang

Kedatangan pasukan Jepang di Indonesia, pada umumnya disambut oleh masyarakat Indonesia sebagai pahlawan pembebas daripada sebagai pasukan agresor. Bahkan di beberapa tempat di luar Jawa, tidak sedikit kalang nasionalis pribumi yang membentuk perlawanan terhadap Belanda menjelang datangnya serangan Jepang. Di Aceh misalnya, para ulama Islam Aceh yang tergabung dalam “Persatuan Ulama-ulama Seluruh Aceh” (PUSA-dibentuk tahun 1939) di bawah pimpinan *Tengku Mohammad Daud Beureu'eh* (1899-1987) telah menghubungi Jepang untuk membantu serangan Jepang terhadap Belanda. Di Minangkabau, para ulama secara tidak langsung juga membantu pihak Jepang dan berharap dapat menyaksikan terdepaknya para *penghulu* dari kekuasaannya.

Sebagai balasannya, pada awal kekuasaannya, pemerintah Jepang banyak memberikan keleluasaan kepada kaum pribumi, seperti mengibarkan bendera merah putih, menyanyikan lagu *Indonesia Raya*, dan mengambil alih tanah-tanah perkebunan milik pengusaha Belanda. Sedangkan untuk memusnahkan pengaruh Barat, Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris, serta berupaya memajukan pengajaran bahasa Jepang. Selain itu, kalender Jepang juga diberlakukan menggantikan kalender Masehi.

Akan tetapi dalam situasi peperangan, Jepang harus memilih prioritas-prioritas tertentu. Mereka cepat melakukan reorganisasi pemerintahan setempat dan memadamkan benih-benih revolusi yang muncul di beberapa daerah seiring dengan runtuhnya Hindia Belanda. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Jepang terpaksa harus bersandar kepada para *ambtenar* dari masa kolonial Belanda seperti; *ulebalang*, di Aceh, *penghulu* di Sumatera Barat, para raja di Sumatera Timur, dan kaum *priyayi* di pulau Jawa.

Sebagai catatan, Jepang telah membentuk tiga tentara wilayah, satu untuk Birma (Myanmar), dua untuk Indonesia dan Malaya. Tentara ke-14 di Filipina dan

Tentara Garnisun di Muangthai langsung di bawah Panglima Tentara Selatan. Tentara-tentara di wilayah Indonesia disusun sebagai berikut:

1. Pulau Sumatera di bawah Tentara Angkatan Darat (Rikugun) ke-25 yang bermarkas di Bukittinggi, Sumatera Barat
2. Pulau Jawa dan Madura di bawah Tentara Angkatan Darat ke-16, yang bermarkas di Jakarta. Kedua wilayah ini berada di bawah komando Angkatan Darat Wilayah ke-7 dengan markas besarnya di Singapura.
3. Kalimantan dan Indonesia bagian Timur lainnya berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut (*Kaigun*) Armada Selatan ke-2 yang bermarkas besar di Makasar. Dengan adanya pembagian ini tidak berarti bahwa di bagian Indonesia Timur tidak ada pasukan *Rikugun*. Di Maluku misalnya ditempatkan Tentara ke-19 dan di Irian Utara ditempatkan Tentara ke-2. Namun berbeda dengan Tentara ke-16 atau ke-25, Tentara angkatan darat di daerah ini tidak mempunyai tugas administratif, karena tugas itu dipegang oleh angkatan laut.

Pada masing-masing wilayah tersebut dipimpin oleh kepala staf tentara/armada sebagai seorang gubernur militer (*gunseikan*). Kantornya disebut *Gunseikanbu*. Banyak orang Indonesia yang diangkat menjadi pegawai pemerintah untuk mengisi tempat yang ditinggalkan oleh pejabat-pejabat Belanda, baik karena ditawan atau melarikan diri. Kebanyakan dari pejabat baru adalah berkebangsaan Jepang. Sedangkan bangsa Indonesia yang menjadi pejabat baru bangsa, umumnya mantan guru, termasuk guru agama Islam. Bahkan Jepang pernah mengangkat seorang kyai tradisional dari pesantren Gunung Puyuh, Sukabumi, yaitu *Kyai Haji Ajengan Ahmad Sanusi* sebagai wakil residen Bogor. Menurut sejarawan *Harry J. Benda*, hal itu merupakan satu fenomena yang menarik, yang belum pernah terjadi sebelumnya, seorang pribumi menduduki jabatan lebih tinggi dari jabatan bupati (Benda 1980). Hal ini menunjukkan bahwa Jepang mempunyai harapan khusus terhadap para ulama Islam, terutama dalam memobilisasi masyarakat Indonesia, yang diyakininya beragama Islam. Untuk keperluan itulah pada akhir Maret 1942, Jepang mendirikan sebuah kantor urusan agama (*Shumubu*) di Jawa.

Meskipun para ulama atau para mantan guru itu dinilai loyalitasnya cukup tinggi daripada para *priyayi*, *uleebalang* atau *penghulu*, namun umumnya mereka tidak mempunyai kemampuan dan pengalaman apa-apa dalam birokrasi

pemerintahan. Akhirnya para pejabat lama terpaksa direkrut kembali untuk menduduki jabatan lamanya.

Kebijakan di antara ketiga wilayah pemerintahan militer itu sangat berbeda. Umumnya Jawa dianggap sebagai wilayah yang secara politik dinilai paling maju dan dayanya yang utama adalah manusia. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan Jepang di wilayah ini dapat membangkitkan kesadaran nasional yang jauh lebih mantap dibandingkan dengan kedua wilayah lainnya. Meskipun demikian, secara ekonomi Jawa nilainya kurang penting, dibandingkan wilayah Sumatera dan Kalimantan yang kaya akan minyak dan beberapa sumber pertambangan lainnya yang sangat dibutuhkan industri perang Jepang. Akan tetapi karena pentingnya arti perkembangan masa depan, maka Jawa mendapat perhatian ilmiah yang lebih besar daripada pulau-pulau lainnya. Sementara wilayah di bawah angkatan laut, secara politik dianggap terbelakang walaupun mempunyai arti ekonomi yang tinggi. Pemerintahan militer di wilayah ini cenderung bersifat sangat menindas dibandingkan di wilayah Jawa.

Salah satu upaya yang ditempuh pemerintahan Pendudukan Jepang untuk mencari dukungan sekaligus melibatkan bangsa Indonesia dalam peperangannya adalah melalui propaganda. Untuk keperluan itu maka pada bulan Agustus 1942 Jepang membentuk Departemen Propaganda (*Sendenbu*). Secara resmi disebutkan bahwa lembaga ini merupakan organ yang terpisah dari Seksi Penerangan Angkatan Darat. Namun dalam praktiknya lembaga ini selalu dipimpin oleh para perwira Angkatan Darat, seperti: Kolonel Machida Keiji (Agustus 1942 – Oktober 1943), Mayor Adachi Hisayoshi (Oktober 1943 – Maret 1945), dan Kolonel Takanashi Koryo (April 1945 – Agustus 1945). Di bawah lembaga ini kemudian dibentuk “Gerakan Tiga A” di bawah pimpinan Mr. Syamsuddin, kemudian “Poetera” di bawah “empat serangkai”, dan “Jawa Hokokai” serta “Sumatera Hokokai”. Organisasi propaganda yang disebut terakhir ini mempunyai alat organisasi sampai tingkat desa yang disebut *tonarigumi* (Rukun Tetangga yang berkembang sampai sekarang). Melalui *tonarigumi* inilah dilakukan pengorganisasian, mobilisasi, indoktrinasi dan pelaporan rakyat Jawa atau Sumatera. Sejak bulan Februari 1944,

para kepala desa menjalani kursus-kursus indoktrinasi. Melalui *tonarigumi* pula terjadi pengerahan para “pahlawan pekerja”, yang lebih dikenal dengan nama *romusha*.

Lembaga *Sendenbu* ini mempunyai 3 seksi, yaitu: (1) Seksi Administrasi, (2) Seksi Berita dan Pers, dan (3) Seksi Propaganda. Pada tahun 1943 lembaga ini membantu terbentuknya *Keimin Bunka Shidosho* (Lembaga Kebudayaan).

Keimin Bunka Shidosho dibentuk pada 1 April 1943. Peresmian dilakukan oleh *Gunseikan* tanggal 18 April 1943. Dalam kesempatan itu ia menyebutkan bahwa tujuan Pusat Kebudayaan itu antara lain: (1) menghapus kebudayaan Barat termasuk paham kesenian yang tidak cocok dengan sikap ketimuran, (2) membangun kebudayaan Timur untuk dijadikan dasar bagi memajukan bangsa Asia Timur (Raya), dan (3) menghimpun para seniman untuk membantu tercapainya kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya. Untuk yang disebut terakhir, pemerintah Jepang memenga merekrut para seniman, termasuk para pelukis. Bahkan menerbitkan karya-karya mereka.

Berdasarkan pernyataan itu, seolah-olah pemerintah Jepang menginginkan terpeliharanya dan sekaligus berkembangnya kebudayaan asli Indonesia dengan cara melenyapkan pengaruh Barat. Namun di sisi lain tersirat bahwa Jepang akan berusaha untuk menanamkan dan menyebarkan seni dan budaya Jepang, terutama dalam materi pendidikan dan kursus-kursus pelatihan guru (*Syotah Kyohin Rensei*) yang didirikan pada bulan Juni 1942. Dalam perkembangannya Pusat Lembaga Kebudayaan itu juga seperti *Volkslectuur* di zaman Hindia Belanda, yaitu berfungsi sebagai alat sensor terhadap karya-karya para seniman Indonesia. Buku-buku yang diterbitkan oleh lembaga itu hanyalah karya yang sesuai dengan kepentingan perang Jepang. Beberapa karya mencerminkan hal ini, misalnya karya: A. Kartahadimadja berjudul “Sebuah Bingkisan” yang dimuat dalam *Djawa Baroe*. Kemudian karya Soetomo Djauhar Arifin “Pemuda Pantjaroba” dan karya Karim Halim, “Arus Mengalir” yang juga dimuat dalam media yang sama.

Pilih Jawaban yang paling tepat dan benar

1. Pada abad ke-15 M, Malaka merupakan *emporium* terbesar di jalur sutra Asia Tenggara. Faktor yang mendukung kota Malaka menjadi *emporium* terbesar di Asia Tenggara adalah:
 - A. Politik ekonomi pemerintah
 - B. Syahbandar yang kompeten
 - C. Sistem pergudangan yang baik
 - D. A, B, dan C benar
 - E. A dan B benar; C salahKunci: D
2. Tujuan utama Jepang masuk dan menguasai kepulauan Indonesia adalah karena faktor
 - A. Letaknya yang strategis
 - B. Tanahnya subur
 - C. Minyak
 - D. Batubara
 - E. Bijih besiKunci: C
3. Dalam melakukan propaganda perangnya, Jepang membentuk organisasi pelaksana sampai ke tingkat desa. Di tingkat desa organisasi yang berfungsi melakukan indoktrinasi, mobilisasi sekaligus sebagai pelapor adalah:
 - A. Seimin bunka shidosho
 - B. Sendenbu
 - C. Meigeri
 - D. Tonarigumi
 - E. GunseikanbuKunci: D
4. Peraturan yang berfungsi semacam undang-undang dasar di Hindia Belanda disebut
 - A. Konstitusi
 - B. Groundwet
 - C. Regeerings Reglement
 - D. Regeeringsalmanak
 - E. ConstitutieKunci: C
5. “Prins rebel” adalah gelar yang diberikan VOC kepada
 - A. Pangeran Dipenogoro
 - B. Pangeran Antasari
 - C. Nuku
 - D. Baabullah

E. Ageng Tirtayasa

Kunci: C

6. VOC lebih berhasil dalam bisnis-perdagangannya jika dibandingkan dengan Portugis yang lebih dahulu menguasai jalur perdagangan ke Asia Tenggara. Faktor utama dari keberhasilannya itu ialah:
- A. Kapal dagang VOC lebih canggih daripada milik Portugis
 - B. VOC tidak menjalankan kristenisasi dalam bisnis-perdagangannya
 - C. VOC lebih dahulu mengenal pusat rempah-rempah
 - D. Portugis harus berperang melawan Spanyol
 - E. VOC mendapat bantuan Spanyol

Kunci: B

7. Kerajaan maritim terakhir di Jawa yang menjadi pesaing VOC adalah
- A. Mataram
 - B. Surabaya
 - C. Banten
 - D. Semarang
 - E. Tuban

Kunci C

8. Tugas utama Herman W. Daendels dikirim ke Jawa adalah
- A. Mengambil alih semua asset milik VOC
 - B. Mempertahankan semua warisan VOC dari serangan Inggris
 - C. Membangun jalan raya besar Anyer-Panarukan
 - D. Melakukan reorganisasi pemerintahan di Hindia Timur
 - E. Semuanya salah

Kunci: B

8. Para pedagang Eropa, seperti Inggris, Portugis, Spanyol, dan Belanda mencari kepulauan Indonesia sekitar abad ke-15 dan ke-16 M karena
- A. Minyak
 - B. Batubara
 - C. Rempah-rempah
 - D. Tembakau
 - E. Gula

Kunci: C

9. Berdasarkan Regeering Reglemen tahun 1816, yang disebut sebagai "Pemerintahan Agung" di Hindia Belanda ialah
- A. Gubernur Jenderal
 - B. Algemeen Secretarie
 - C. Raad van Indië
 - D. A dan B benar
 - E. A dan C benar

Kunci: E

10. Dalam upaya mengajar serta bangsa Indonesia untuk berperang melawan Sekutu, Perdana Menteri Jepang menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari. Janji itu disebut
- A. Janji Tojo
 - B. Janji Maeda
 - C. Janji Yamamoto
 - D. Janji Koiso
 - E. Janji Taiso

Kunci: D

BAB II

PERLAWANAN DAN GERAKAN SOSIAL

II.1. Pendahuluan

II.1.1. Deskripsi Singkat

Dalam pertemuan ini mahasiswa akan memperoleh pemahaman tentang dampak dari kolonialisme yaitu munculnya perlawanan terhadap kolonialisme dan munculnya gerakan-gerakan sosial . Selain itu mahasiswa juga akan berdiskusi tentang bentuk-bentuk perlawanan dan tipe-tipe gerakan sosial .

II.1.2. Manfaat

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa dapat memahami secara garis besar tentang berbagai macam perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia dan mengetahui serta memahami apa yang dimaksud dengan gerakan sosial dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

II.1.3. Tujuan Instruksional khusus

Pada akhir pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan:

1. Reaksi rakyat Indonesia terhadap kolonialisme
2. Bentuk-bentuk perlawanan terhadap kolonialisme
3. Faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya perlawanan

II.2. Penyajian

II.2.1. Materi

A. Perlawanan menghadapi Penetrasi Belanda

Perlu diketahui bahwa wilayah yang tercakup dalam negara kolonial Hindia Belanda pada awalnya hanya mencakup wilayah-wilayah taklukan VOC atau yang diklaim sebagai taklukan VOC. Kerajaan Aceh, Bangka dan Belitung tidak termasuk Hindia Belanda, karena bukan taklukan VOC sedangkan Singapura dan Malaka termasuk Hindia Belanda karena bekas taklukan VOC. Namun dalam perkembangannya kemudian wilayah Hindia Belanda mengalami banyak perubahan.

Pada saat *Commissaris Generaal* memulai tugasnya di awal abad ke-19, ada beberapa daerah taklukan VOC yang menyatakan tidak terikat lagi oleh perjanjian dengan VOC, sekaligus tidak terikat pula oleh negara kolonial Hindia Belanda. Peristiwa-peristiwa inilah antara lain yang mendorong pemerintah kolonial Hindia Belanda melakukan politik pasifikasi, terutama ke daerah luar Jawa. Dalam dua dasawarsa pertama pendirian negara kolonial Hindia Belanda, paling tidak ada tiga perlawanan atau pemberontakan yang dinilai sangat mengganggu kewibawaannya, yaitu perlawanan Pattimura di Maluku; perlawanan Diponegoro (*de Java oorlog*) di Jawa; dan perlawanan kaum Padri di Sumatera Barat.

A.1. Perlawanan Pattimura.

Perlawanan rakyat Maluku terjadi tahun 1817 di bawah pimpinan **Thomas Matulesya** (Matulesy), mantan sersan mayor yang mendapat status *burger* dari pemerintah Inggris. Penyebab pemberontakannya adalah karena rakyat Maluku diperlakukan tidak adil oleh Belanda. Selama VOC berkuasa, para petingginya tidak ada sedikitpun upaya untuk memajukan budaya setempat. Yang terjadi justru merusak tata ekonomi dan niaga setempat yang berakibat semakin merosotnya kesejahteraan penduduk

Kondisi ini berbeda sewaktu Maluku berada di bawah kekuasaan Inggris. Meskipun Raffles pada dasarnya melanjutkan monopoli VOC, tetapi pemerintahannya lebih lunak dan bijaksana, dalam arti mereka tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga memperbaiki keadaan setempat. Sebagai contoh, Raffles masih memperhatikan tingkat kemakmuran rakyat dengan menghapus kerja rodi, membayar kekurangan gaji para guru yang terhutang sejak masa VOC, membeli rempah-rempah dengan tunai, dan dalam ukuran tertentu memberi kebebasan kepada penduduk untuk berniaga. Oleh karena itu tidak mengherankan selama masa Inggris, Maluku tumbuh menjadi pusat penimbunan bagi perdagangan kepulauan Nusantara bagian timur.

Ketika Belanda kembali berkuasa, kondisi yang sudah membaik itu kembali dirusak. Rakyat kembali dibebani berbagai kewajiban yang memberatkan yang menimbulkan perasaan tidak puas, seperti kerja rodi dan keharusan untuk menjual ikan asin untuk keperluan angkatan laut Belanda. Ketidakpuasan itu akhirnya meledak menjadi satu bentuk perlawanan terbuka yang disertai tindak kekerasan. Dalam satu pertemuan yang terjadi atas inisiatif dari tokoh-tokoh di Saparua, pada bulan Mei 1817, secara aklamasi Thomas Mattulesya alias Pattimura diangkat pemimpin mereka untuk melawan Belanda. Awal perlawanan terjadi dengan perampasan perahu pos yang ada di pelabuhan Porto. Keesokan harinya Pattimura memimpin para pengikutnya menyerbu benteng *Duurstede*. Residen Saparua **Van den Berg** beserta keluarganya (kecuali seorang anak kecil) dibunuh, sehingga menimbulkan kemarahan pihak Belanda. Setelah kabar jatuhnya benteng *Duurstede* itu sampai ke Batavia, maka dengan segera pemerintah di Batavia mengirimkan bala bantuan ke Saparua. Pada tanggal 1 Agustus 1817, 45 kapal perang Belanda membuang sauh di teluk di depan benteng *Duurstede* yang ternyata telah ditinggalkan oleh Pattimura.

Dengan maksud agar masyarakat di Saparua mau membantu Belanda, maka pihak Belanda menjanjikan akan memberi hadiah sebesar 1.000 gulden bagi siapa saja yang berhasil menyerahkan Pattimura dan 500 gulden lagi bagi setiap kepala para pimpinan di bawahnya. Akhirnya pemberontakan Pattimura dapat diatasi. Pada

bulan Desember 1817, Thomas Matulesya alias Pattimura dihukum gantung bersama tiga orang lainnya.

A.2. Perlawanan Diponegoro (1825-1830)

Ketika Sultan Hamengku Buwono III wafat pada tahun 1816 terjadi kericuhan di istana Yogyakarta berkenaan dengan penggantinya. Putra tertua sultan, **Pangeran Diponegoro**, tidak terpilih untuk menggantikannya karena dia anak dari istri samping. Ketika putra mahkota kemudian wafat juga, tahta jatuh ke tangan anak laki-laki putra mahkota yang masih berusia dua tahun. Pangeran Diponegoro amat marah dengan kebijakan tersebut. Namun dia kemudian disingkirkan dari istana oleh para bangsawan yang pro-Belanda dan akhirnya menetap di Tegalrejo.

Kegeramannya atas perlakuan tersebut akhirnya meledak saat tanahnya di Tegalrejo, tanpa pembicaraan terlebih dahulu, dipatok untuk dijadikan jalan umum oleh orang-orang suruhan **Patih Danureja** (1813-1847) yang pro-Belanda. Konflik pun terjadi antara para pengikut pengikut Diponegoro dengan pengikut Danureja yang didukung Belanda. Ketika perundingan antara kedua belah pihak menghadapi jalan buntu, residen Belanda mengirim pasukan untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Akan tetapi Diponegoro berhasil meloloskan diri dan kemudian mencanangkan panji pemberontakan. Sejak itu Perang Jawa (1825-1830) pun dimulai.

Perlawanan Diponegoro dengan cepat menyebar ke seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan pusatnya di kawasan Yogyakarta. Lima belas dari dua puluh sembilan pangeran Yogyakarta dan dua puluh empat dari delapan puluh delapan bupati ikut bergabung dengan Diponegoro. Selain itu, pemberontakannya juga didukung kaum ulama, seperti **Kiai Maja**.

Sementara itu pihak Surakarta yang menjadi saingan Yogyakarta bersikap melihat dan menunggu perkembangan untuk ikut pihak yang mana. Apabila pemberontakan Diponegoro tersebut menunjukkan akan berhasil, maka di kalangan istana akan mendukungnya. Meskipun demikian, pihak Surakarta tidak berani

menolak ketika **Jenderal H. M. de Kock** menjadikan wilayah mereka sebagai pusat komandonya dalam menghadapi Diponegoro.

Pada awalnya, Diponegoro berhasil mengalahkan pasukan de Kock dengan taktik pukul lari dan menjadikan daerah Surakarta sebagai ‘perangkap’ pihak lawannya. Akhirnya salah seorang perwira de Kock menemukan cara untuk menghadapi strategi dan taktik lawannya, yaitu dengan menerapkan **sistem benteng** (*bentengstelsel*). Taktik ini banyak dipengaruhi kemenangan Perancis dalam menghadapi pemberontakan petani di *Vendée*, Perancis Selatan. Penerapan sistem benteng ini adalah dengan cara membangun rangkaian benteng kecil yang saling berhubungan serta diadakan patroli secara teratur untuk mencegah dan mempersempit ruang gerak gerilyawan Diponegoro.

Sistem benteng segera membawa hasil, satu persatu daerah pertahanan Diponegoro jatuh ke tangan de Kock. Kedudukan Diponegoro semakin lemah ketika dia ditinggalkan oleh pembantunya, baik karena gugur maupun menyerah kepada Belanda. Di antara pembantunya yang menyerah terdapat Kyai Maja, Pangeran Notoprojo, Pangeran Mangkubumi, dan Sentot Alibasyah Prawirodirjo. Meskipun demikian Diponegoro tetap tidak mau menyerah. Pengaruhnya di kalangan rakyat, termasuk di daerah yang sudah dikuasai pihak Belanda masih tetap besar. Faktor semacam ini cukup menyulitkan pihak Belanda.

Untuk menghindari perang yang berkepanjangan, pihak Belanda menempuh cara diplomasi dengan menawarkan satu perundingan. Pihak Belanda mengirimkan dua orang utusan yang keduanya bekas kepercayaan Diponegoro. Oleh karena itu Diponegoro setuju untuk berunding walaupun dia mengetahui banyak pengikutnya yang tidak setuju. Sebagai langkah awal pada 16 Februari Diponegoro bertemu dengan **Kolonel Cleerens** yang mewakili de Kock di Remokawal. Di tempat itu disetujui bahwa pertemuan berikutnya dengan Jenderal de Kock akan diadakan di Magelang.

Rombongan Diponegoro tiba di Magelang pada 25 Februari 1830, menjelang masuknya bulan suci Puasa (Ramadhan). Oleh karena itu Diponegoro menolak untuk mengadakan perundingan selama bulan puasa. Kondisi ini dilaporkan oleh de Kock

kepada Gubernur Jenderal dengan sengaja memanipulasi penolakan Diponegoro itu sebagai unsur penting untuk menangkap tokoh tersebut. Dengan cara itu dia mendapat 'restu' dari Gubernur Jenderal untuk menangkap Diponegoro. De Kock berhasil menipu Diponegoro. Di saat pembicaraan berlangsung, pihak Belanda melucuti para pengawal Diponegoro dan melarang Diponegoro meninggalkan tempat.

Diponegoro yang sadar dirinya ditipu sempat emosional dan akan membunuh de Kock di tempat perundingan. Meskipun awalnya ia menolak untuk menyerah dan menyatakan lebih baik mati, namun akhirnya ia pasrah terhadap takdir (*angur sun sumendhetakdir*). Kesadaran ini pula yang mendorongnya untuk meninggalkan tanah Jawa (Diponegoro dibuang ke Makassar dan meninggal dunia di kota itu pada 8 Januari 1855). Pertama, karena menurutnya tidak ada lagi yang memilikinya; dan kedua, untuk menghormati mereka yang gugur dalam peperangan karena membela dan melaksanakan perintahnya.

Perang Diponegoro menyebabkan kerugian besar bagi Belanda. Secara keseluruhan, Belanda kehilangan 15.000 prajuritnya, termasuk 8.000 orang Eropa. Selain itu Belanda harus menanggung beban biaya yang amat besar. Dalam kondisi ekonomi yang morat-marit, pemerintah Hindia Belanda mau tidak mau harus menjalankan program penghematan. Untuk membiayai perang dengan sistem benteng itu, dengan cerdik Du Bus de Gisignies membebankannya kepada Sultan Yogyakarta (Hamangkubuwono II), termasuk tanah milik kesultanan di Jabarangkah secara penuh menjadi milik pemerintah Hindia.

A.3. Perlawanan Padri (1821-1838)

Awal perlawanan Kaum Padri sebenarnya adalah pertentangan paham antara Kaum Adat dan Kaum Padri dalam masalah praktik keagamaan. Gerakan kaum Padri sudah ada sejak awal abad ke-19, yang bertujuan untuk memurnikan Islam dari praktik-praktik sinkretisme, yaitu adat istiadat setempat yang justru bertentangan dengan ajaran Islam. Istilah Kaum Paderi kemungkinan berasal dari kata *padre* (bahasa Portugis) suatu istilah untuk menyebut orang suci atau ulama yang berpakaian putih.

Dalam kenyataannya para ulama Paderi, seperti: Tuanku Kota Tua (daerah Cangking, Empat Angkat), Tuanku nan Renceh (muridnya), Haji Sumanik (dari Delapan Kota), Haji Miskin (dari Pandai Sikat) dan Piobang (dari Tanah Datar), semuanya suka berpakaian serba putih. Keadaan ini sangat kontras dengan pakaian kaum adat yang berpakaian serba hitam. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa gerakan itu disebut Padri karena pemimpinnya adalah *orang Pidari*, orang Pedir yang telah pergi ke Mekah melalui pelabuhan Pedir, Aceh.

Pada masa itu di Sumatera Barat masih berdiri Kerajaan Minangkabau yang berpusat di Pagaruyung. Raja Pararuyung dibantu oleh empat pembantu yang disebut *Basa Ampek Balai*. Sebagai lambang Kerajaan Minangkabau, raja dihormati namun dalam praktiknya tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Kekuasaan yang sebenarnya berada di tangan para penghulu (kepala suku), yang membentuk Dewan Penghulu atau Dewan Nagari. Raja dan Dewan Nagari inilah yang menjalankan peranan penting dalam pemerintahan adat.

Di bawah pemerintahan adat, banyak kebiasaan yang bertentangan dengan hukum Islam dibiarkan begitu saja, bahkan seperti dilegalisasi dengan banyaknya para pembesar yang ikut dalam kebiasaan buruk tersebut. Adapun kebiasaan-kebiasaan yang ditentang kaum Padri itu meliputi masalah perjudian, sabung ayam, dan beberapa aspek hukum yang didasarkan garis ibu (matrilineal). Perbedaan pendapat itu akhirnya pecah menjadi konflik bersenjata, ketika Haji Miskin yang membakar balai tempat menyabung ayam di Pandai Sikat setelah seruannya tidak digubris oleh penduduk.

Kekuatan kaum Padri semakin bertambah terutama setelah mendapat dukungan dari pimpinan adat tertinggi di Alahan Panjang, yaitu **Datuk Bandaro**. Dengan adanya dukungan itu kaum Padri mendirikan benteng pertahanan di Bonjol. Sewaktu Datuk Bandaro meninggal, pimpinan digantikan oleh **Peto Syarif** yang kemudian bergelar **Tuanku Imam Bonjol**.

Pada masa awal munculnya gerakan pembaruan Islam oleh kaum Padri, kaum Adat pernah meminta bantuan Inggris yang membuka kantor di Air Bangis, Padang dan pulau Cinkuk. Pada bulan Juli 1818, Raffles sempat mengunjungi Padang Darat

dan bertemu dengan kedua belah pihak yang bertikai. Raffles ternyata tidak bisa berbuat banyak karena harus menyerahkan kembali semua bekas taklukan VOC kepada Belanda. Akhirnya pada 10 Februari 1821, **Tuanku Suruaso** dan 14 penghulu yang mewakili kerajaan Minangkabau (kaum Adat) datang menghadap Residen Padang **Du Puy** untuk mengadakan perjanjian.

Seminggu kemudian Belanda menduduki Simawang dengan membawa dua buah meriam dan seratus orang serdadu. Sejak 18 Februari 1821, mulailah babak baru 'perang Padri', yaitu berperang melawan Belanda. Dalam periode 1821-1825 semangat perang kaum Padri semakin meningkat, karena tujuan perang mereka tidak semata-mata untuk mematahkan kekuasaan kaum Adat, melainkan juga untuk mengusir Belanda yang akan menjajah mereka. Bagi mereka, kaum Adat hanya sekedar anjing pesuruh Belanda saja.

Pada mulanya, ekspedisi militer Belanda berhasil menembus kawasan pegunungan Sumatra Barat, yang menjadi basis kaum Padri, dan membangun benteng Fort Van der Cappelen di Batusangkar. Gerak maju militer Belanda kemudian tersendat dan perang menjadi berlarut-larut. Akhirnya, pada tanggal 26 Januari 1824, Letnan Kolonel **Raaff** yang menggantikan Du Puy sebagai Residen Padang, mengajak kaum Padri untuk berunding dan diterima baik oleh kaum Paderi di Alahan Panjang dan Bonjol. Meskipun isi perjanjian itu banyak merugikan kaum Padri,

Akan tetapi baru sebulan setelah perjanjian itu ditandatangani pihak Belanda telah menyerang Guguk Sigundang dan Kota Lawas. Dengan penyerangan Kota Lawas itu, kaum Paderi, terutama kaum Paderi Bonjol tidak lagi percaya kepada Belanda. Demikian pula kaum Adat yang meminta bantuan untuk mengalahkan kaum Padri menjadi kecewa. Mereka melihat kepentingan Belanda lebih dikedepankan daripada kepentingan kaum Adat. Apalagi setelah mereka melihat perilaku Belanda yang menyakitkan melalui beberapa kerja paksa, penarikan cukai yang dirasakan memberatkan rakyat. Simpati kaum Adat pun banyak yang berpindah kepada kaum Padri, sehingga perlawanan di Sumatera Barat tidak lagi sebagai perlawanan Padri semata, melainkan perlawanan rakyat Sumatera Barat.

Pihak Belanda untuk sementara waktu tidak dapat berbuat banyak guna menghentikan gerak maju kaum Padri karena sedang sibuk menghadapi perang di Jawa yang dikobarkan Pangeran Diponegoro. Setelah berhasil memadamkan perlawanan Diponegoro, Belanda mengirimkan bantuan lebih banyak ke Sumatera Barat. Di antara kontingen militer Belanda itu terdapat pasukan Jawa pimpinan Sentot Ali Basya, salah seorang pengikut Diponegoro yang membelot.

Untuk mematahkan perlawanan kaum Padri, pihak Belanda menutup daerah pesisir barat dan timur Sumatera, yang merupakan pintu gerbang perdagangan Minangkabau. Di samping itu, Belanda membujuk para pemimpin kaum Paderi, seperti Tuanku Imam Bonjol, untuk menyerah sementara mengancam rakyat dengan hukuman berat agar tidak membantu kaum Padri.

Dalam kampanye militernya, Belanda menerapkan sistem benteng sehingga kaum Padri kesulitan ruang gerak. Pada 16 Agustus 1837 kota Bonjol yang berbenteng akhirnya dapat direbut pihak Belanda. Pada bulan Oktober 1837 Belanda mengundang Imam Bonjol untuk berunding di Palupuh. Pemimpin kaum Padri itu menerimanya dan datang ke Palupuh. Namun, seperti halnya Pangeran Diponegoro, dia ditangkap ketika perundingan mengalami jalan buntu. Imam Bonjol kemudian dibuang ke luar tanah kelahirannya, di mana dia meninggal di Manado pada tahun 1864.

Setelah tertangkapnya Imam Bonjol, sejumlah pemimpin Padri masih melakukan perlawanan terhadap Belanda. Di antara mereka terdapat **Haji Saleh** dan **Tuanku Tambusei**. Pihak Belanda sendiri terus berusaha menaklukkan kubu-kubu kaum Padri. Akhirnya, pada tanggal 28 Desember 1838, pertahanan terakhir kaum Padri jatuh ke tangan Belanda. Akan tetapi Haji Saleh dan Tuanku Tambusei tidak bisa ditangkap. Kedua tokoh itu menghilang ke dalam hutan melalui sungai.

A.4. Ekspedisi Militer ke Bali dan Nusa Tenggara

Pada tahun 1841, pihak Belanda berhasil meyakinkan para raja Bali untuk masuk ke dalam lingkungan Hindia Belanda (*Pax Nederlandica*) dengan jaminan bahwa kedaulatan dalam negeri mereka tidak akan dibatasi. Sebagian raja Bali menerima

tawaran itu dengan harapan pihak Belanda mau membantu mereka menaklukkan Mataram dan Lombok. Sebagian lagi seperti Raja Buleleng dan Karangasem menolak meratifikasi perjanjian tersebut. Perlawanan kedua raja itu mendapat dukungan dari raja Klungkung, yaitu **Dewa Agung**. Pembangkangan ini menyebabkan Belanda mengirimkan tiga ekspedisi militer ke Bali, yaitu pada tahun 1846, 1848, dan 1849.

Meskipun Belanda berhasil mengalahkan raja-raja Bali, akan tetapi hingga tahun 1853 mereka tidak pernah ikut campur dalam urusan intern kerajaan-kerajaan di pulau tersebut. Campur tangan Belanda dalam urusan istana baru terjadi setelah pecahnya pemberontakan di Buleleng pada tahun 1853. Sejak itu Belanda menempatkan para pegawainya di Bali Utara dan Barat (Buleleng dan Jembrana).

Keadaan *status quo* itu berakhir setelah terjadinya perampasan terhadap sebuah kapal yang terdampar pada tahun 1904. Peristiwa tersebut dijadikan alasan oleh Belanda untuk mengirimkan pasukan militernya. Satu persatu kerajaan Bali dipaksa untuk menyerah. Perlawanan terakhir terjadi pada tahun 1908, ketika penguasa Kerajaan Klungkung, Dewa Agung, beserta pengikutnya melakukan perang habis-habisan (*puputan*). Tewasnya Dewa Agung dan para pengikutnya menandai berakhirnya kemerdekaan Bali.

Setelah Bali ditaklukkan, Belanda mengarahkan perhatiannya ke sebelah timur. Mereka kemudian bergerak menguasai Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Savu, Roti dan Timor. Perlawanan yang cukup berarti terjadi di Lombok, di mana pada tahun 1894 ekspedisi Belanda sempat dikalahkan oleh sebuah kerajaan Hindu yang berpusat di Mataram. Akan tetapi perlawanan mereka akhirnya dapat dipatahkan Belanda.

A.5. Perlawanan Rakyat Sulawesi dan Papua

Perluasan wilayah Belanda di selatan Sulawesi ditentang oleh mantan sekutu utama VOC, yaitu Bone yang telah tumbuh menjadi satu kerajaan yang terkuat di wilayah ini. Sejak Belanda dikalahkan Inggris, banyak tokoh Bone menilai Perjanjian

Bongaya (1667) tidak mengikat lagi dan menganggap bahwa hubungan mereka dengan Belanda telah putus.

Pada tahun 1824, Gubernur Jenderal Van der Capellen mengunjungi daerah ini dan membujuk kerajaan-kerajaan di Sulawesi selatan untuk memperbaharui Perjanjian Bongaya, tapi Bone menolaknya. Setelah Van de Capellen pergi, Ratu Bone memimpin negara Bugis menyerang garnisun Belanda dan merebut wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda. Untuk menindas pemberontakan ini, Belanda bergabung dengan musuh lama Bone, Makassar. Pada tahun 1825 pasukan gabungan Belanda dan Makassar berhasil mengalahkan Bone. Akan tetapi, pecahnya perang Diponegoro membuat pasukan Belanda terpaksa ditarik ke Jawa. Akibatnya, Bone kembali melanjutkan perlawanannya.

Setelah perang di Jawa berakhir Belanda mengirimkan kembali pasukan ke Sulawesi selatan dan pada tahun 1838 raja Bone dipaksa memperbaharui kembali isi Perjanjian Bongaya. Meskipun demikian, supermasi Belanda di daerah ini tidak dapat ditegakkan dengan mudah. Munculnya konflik intern di Bone sendiri menyebabkan pihak kerajaan yang tunduk kepada Belanda tidak mampu mengontrol rakyatnya sementara di Makassar tetap banyak pihak yang menentang Perjanjian Bongaya. Oleh karena itu, antara tahun 1858-1860, Belanda kembali mengadakan serangan besar-besaran. Namun penaklukan yang sungguh-sungguh terhadap perlawanan Bugis dan Makassar baru terjadi pada tahun 1905-6. Setelah itu, Belanda memperluas kekuasaannya atas rakyat Toraja di Sulawesi Tengah yang masih animis dan dikenal sebagai suku bangsa pengayau.

Sementara itu, setelah berhasil memantapkan kekuasaannya di Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara, Belanda memalingkan perhatiannya ke Papua (Irian Jaya). Pada tahun 1828, Belanda mendirikan Benteng Du Bus di Lobo, sebagai bukti eksistensi mereka di sana, sekaligus untuk mencegah masuknya kekuatan Eropa lainnya ke wilayah itu. Namun setelah mengamati wilayah ini, untuk sementara waktu Belanda menilai daerah ini kurang menarik secara ekonomi. Masyarakatnya masih hidup di “zaman batu” sementara nyamuk malaria banyak mengambil korban di kalangan anggota garnisun Benteng Du Bus, sehingga pada tahun 1836 benteng

tersebut terpaksa ditinggalkan. Meskipun demikian Belanda tidak meninggalkan pulau ini. Malahan pada tahun 1898 wilayah ini secara permanen dimasukkan ke dalam lingkungan Hindia Belanda. Di kemudian hari, ganasnya wilayah Papua menyebabkan Belanda menjadikannya sebagai tempat pembuangan para tokoh pergerakan kebangsaan Indonesia.

A.6. Perlawanan rakyat Kalimantan

Kalimantan merupakan satu-satunya pulau besar di kepulauan Nusantara yang menjadi ajang persaingan antara Belanda dan Inggris dalam memperluas wilayahnya. Bagi Inggris, Kalimantan dinilai memiliki letak yang strategis karena letaknya mengapit jalur perdagangan dari Cina ke India. Karena itulah Inggris tidak mentolelir kemungkinan adanya kekuatan Eropa lainnya yang bercokol di daerah itu, khususnya Kalimantan Utara dan Barat. Sebaliknya, kepentingan Belanda terhadap Kalimantan lebih bersifat penjajahan. Belanda melihat Kalimantan sebagai sarang bajak laut dan orang-orang Cina yang anti-Belanda. Meskipun sumber daya alam di pedalaman pulau ini tidak dikenalnya, namun demi keamanan, Belanda berminat menguasai pesisir selatan dan barat pulau ini.

Langkah pertama, Belanda menawarkan kepada raja-raja di Kalimantan untuk hidup secara damai di bawah lingkungan Hindia Belanda. Pada dasawarsa 1820-an dan 1830-an, pemerintah kolonial Belanda berhasil mengadakan perjanjian dengan Pontianak, Mempawah, Sambas dan negeri-negeri kecil di pesisir barat lainnya. Di Banjarmasin dan Kalimantan Tenggara, Belanda tidak usah memeras keringat karena sultan Banjarmasin masih menghormati perjanjiannya dengan VOC.

Hingga tahun 1840, kepentingan Belanda di daerah Kalimantan dapat dikatakan hanya terbatas pada daerah-daerah pesisir. Perhatian itu kemudian berubah setelah James Brooke memasuki Serawak dan diangkat sebagai raja muda oleh Sultan Serawak. Hal ini menyebabkan pemerintah kolonial Belanda khawatir dengan kemungkinan masuknya kekuatan Eropa lainnya ke Kalimantan. Oleh sebab itu Belanda memandang perlu untuk menghadirkan kekuatannya di pulau tersebut sekaligus memperluas wilayah jajahannya. Perhatian Belanda terhadap Kalimantan

menjadi semakin kuat, terutama setelah tahun 1846 ditemukan batubara, sehingga wilayah ini mempunyai nilai ekonomi yang lebih besar bagi pemerintah kolonial Belanda.

Kebijakan baru Belanda itu tentu saja ditentang para raja di Kalimantan, termasuk yang terikat perjanjian dengan Belanda sebelumnya. Perlawanan yang cukup besar terjadi antara tahun 1859-1863, yang dikenal sebagai Perang Banjarmasin. Konflik ini berawal dari campur tangan Belanda dalam proses penggantian Sultan Banjarmasin. Setelah **Sultan Adam** meninggal tahun 1857, pihak istana menghendaki **Pangeran Hidayatullah**, naik takhta sebagai pengganti Sultan Adam. Akan tetapi Belanda menunjuk **Pangeran Tamjidillah**, yang tidak disukai karena terkenal sebagai pemabuk, menjadi sultan yang baru. Dukungan Belanda sendiri dikarenakan Tamjidillah telah menjanjikan konsesi yang lebih besar daripada yang dijanjikan Pangeran Hidayatullah kepada Belanda. Tindakan sewenang-wenang Belanda itu akhirnya menimbulkan keresahan dan ketidakpuasan di kalangan para bangsawan pendukung Hidayatullah serta masyarakat Banjarmasin.

Pada bulan April 1859, seorang bangsawan Banjarmasin bernama **Pangeran Antasari**, bekerjasama dengan pemimpin petani bernama **Panembahan Aling** dan anaknya yang bernama **Sultan Kuning**, melancarkan perlawanan. Mereka menyerang pertambangan batu bara milik Belanda dan pos-pos misionaris serta membunuh orang-orang Eropa yang mereka jumpai. Pihak Belanda terpaksa mendatangkan bala bantuan dari daerah lain untuk memadamkan perlawanan itu.

Pada tahun 1860 pemerintah Belanda mengumumkan penghapusan Kesultanan Banjarmasin dan menempatkan daerah ini langsung di bawah Hindia Belanda. Namun perlawanan rakyat itu sendiri baru dapat diatasi pada tahun 1863, setelah para pemimpinnya meninggal (seperti Pangeran Antasari) dan ditangkap (seperti Pangeran Hidayat). Akan tetapi perlawanan sporadis masih tetap terjadi hingga tahun 1906.

A.7. Perlawanan Rakyat Palembang dan Jambi

Selain Minangkabau, di beberapa daerah di Sumatera yang pernah terikat perjanjian dengan VOC, juga melakukan perlawanan terhadap Belanda. Salah satu di antaranya terjadi di Palembang di bawah pimpinan **Sultan Mahmud Badaruddin**. Ketika Inggris menyerbu Jawa pada tahun 1811, Sultan Badaruddin mempergunakan kesempatan itu untuk menyerang dan membantai garnisun Belanda yang berada di Palembang. Sikap keras Sultan Badaruddin ini juga diperlihatkan kepada Inggris sehingga pada tahun 1812 Inggris menyerang dan merampok istana Palembang dan melantik adik Badaruddin sebagai raja dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin.

Ketika Belanda kembali ke Nusantara, pada tahun 1818 mereka mengirimkan ekspedisi militer ke Palembang dan menangkap Najamuddin, yang kemudian diasingkan ke Batavia. Mereka kemudian menunjuk Badaruddin untuk menggantikannya. Akan tetapi, kemudian terjadi bentrokan antara Belanda dan Sultan Badaruddin. Pada tahun 1819 Belanda mengirimkan ekspedisi militer ke Palembang untuk menaklukkan kerajaan itu namun berhasil dipukul mundur oleh Badaruddin. Baru pada tahun 1823 kekuatan Badaruddin dapat dikalahkan dan Belanda menempatkan Palembang di bawah kekuasaan langsung Batavia.

Selain Palembang, Jambi juga dikenal sebagai daerah yang sudah lama menjalin hubungan dengan VOC. Ketika Belanda kembali ke daerah ini, Sultan Jambi **Muhammad Fakhruddin** (1833-41) bersedia bekerjasama dengan Belanda, bahkan meminta bantuan Belanda untuk menumpas para bajak laut di wilayahnya. Akan tetapi, ketika kesultanan berada di tangan **Ratu Taha Saifuddin** (1855-58) keadaan berubah. Ratu tidak mau meneruskan kerja sama dengan Belanda sehingga pada tahun 1858 Belanda menyerang Jambi. Ratu Taha berhasil meloloskan diri ke pedalaman dan terus mengadakan perlawanan hingga terbunuh pada tahun 1904.

Pada tahun 1899, Sultan Jambi terakhir yang diakui Belanda, yaitu **Ahmad Zainuddin** (1885-1899), mengundurkan diri. Oleh karena Belanda kesulitan mencari penggantinya maka pada tahun 1901 kesultanan Jambi diserahkan penanganannya

kepada residen Belanda di Palembang. Tindakan Belanda ini menimbulkan perlawanan yang tidak dapat diatasi hingga tahun 1907.

A.8. Perlawanan rakyat Batak (Si Singamangaraja), 1878-1907

Sewaktu terjadi perlawanan kaum Padri, pengaruh Belanda juga menembus wilayah Batak yang terletak di sebelah utara Minangkabau. Pasukannya bergerak menduduki Mandailing, Angkola, Padang Lawas, Sipirok, Tapanuli dan sekitarnya. Kaum Padri telah membantu penyebaran agama Islam di kalangan rakyat Batak, dan sejak tahun 1850-an Belanda membantu kristenisasi dengan mengirimkan Dr. N. Van der Tuuk. Kedatangannya disambut dengan penuh kebencian oleh rakyat, sehingga ia hampir terbunuh oleh rakyat. Namun dengan cara mengaku sebagai keturunan Si Singa Mangaraja X yang tewas dalam Perang Padri, ia berhasil membebaskan dirinya, bahkan pada tahun 1853 ia diterima oleh Si Singa Mangaraja XI di Bakara.

Sejak tahun 1860 misi Kristen mulai banyak memasuki Silindung dan Toba, pos-pos zending juga mulai berdiri di daerah tersebut. Sejalan dengan itu pemerintah kolonial mengerahkan ekspedisi militernya ke daerah Barus dan Singkel dan kemudian memasuki daerah pedalaman Aceh.

Dalam keadaan seperti itu, Si Singa Mangaraja XI meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya, **Patuan Bosar Ompu Pulo Batu dengan gelar Si Singa Mangaraja XII**. Berbeda dengan ayahnya, Si Singa Mangaraja XII memandang gerakan kristenisasi akan membahayakan tanah Batak dan menggoyahkan kedudukannya.

Sekitar tahun 1877 Si Singa Mangaraja mengadakan kampanye keliling daerah untuk mengajak rakyat mengusir zending-zending Kristen dan mencegah kegiatan mereka. Sejalan dengan itu terdengar isu bahwa Si Singa Mangaraja XII dengan bantuan Sultan Aceh merencanakan penyerangan ke zending di Silindung, dan mempersenjatai rakyatnya dengan 50 pucuk senjata. Isu itu akhirnya terdengar oleh garnisun militer Belanda di Sibolga, sehingga pada tanggal 8 Januari 1878 tentara di pos Sibolga diperintahkan untuk berjaga-jaga di daerah Silindung dan mempersiapkan diri menghadapi serangan Si Singa Mangaraja. Masuknya militer

Belanda ke Silindung segera dijawab oleh Si Singa Mangaraja XII dengan pernyataan perang.

Pada waktu itu rakyat Batak tidak memiliki organisasi politik yang lebih tinggi kecuali kesetiaan tertentu terhadap seorang raja yang diperdewakan yang bernama Si Singamangaraja di Bangkara. Oleh karena itu perlawanannya terhadap tentara kolonial menjadi tidak padu. Kondisi ini diperparah oleh persenjataannya yang masih tradisional dibandingkan dengan pasukan Belanda. Namun karena semangat mempertahankan tradisi dan kemerdekaannya membuat pihak Belanda sangat sulit mematahkan perlawanan itu dengan cepat.

Dengan memanfaatkan benteng alam dan juga beberapa benteng buatan, beberapa kali pasukan Si Singa Mangaraja berhasil mematahkan serangan Belanda. Dan untuk menghindari sergapan Belanda, berkali-kali Si Singa Mangaraja memindahkan pusat pertahanannya. Sampai akhir abad ke-19 Si Singa Mangaraja XII masih terus melakukan perlawanan. Barulah pada awal tahun 1907 pasukan Belanda mampu memotong hubungan Si Singa Mangaraja dengan Aceh dan membatasi ruang gerak pasukan Si Singa Mangaraja di sekitar Barus-Sidikalang dan Singkel.

Akhirnya pada bulan Juni 1907, berkat laporan penduduk yang pro-Belanda, pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten **Hans Christoffel** berhasil menemukan Si Singa Mangaraja di dekat Aik Sibulbulon, daerah Dairi. Dalam kondisi terkepung dan sangat lemah, Si Singa Mangaraja beserta pengikutnya tetap melakukan perlawanan. Dalam pertempuran itu Si Singa Mangaraja beserta dua orang puteranya, Sutan Nagari dan Patuan Anggi serta seorang puterinya Lopian termasuk orang-orang yang gugur bersama para pengikut lainnya. Istrinya dan anak-anaknya yang lain yang masih hidup kemudian ditangkap dan ditawan yang kemudian dibuang ke luar daerah Batak. Semua harta pusaka Si Singa Mangaraja dirampas oleh Belanda.

A.9. Perang Belanda di Aceh (1873-1912)

Berdasarkan Perjanjian London, Belanda tidak boleh mengganggu kedaulatan Aceh. Akan tetapi, perkembangan di Aceh antara dasawarsa 1850-an dan 1860-an membuat

pemerintah kolonial Belanda menjadi cemas dan tidak bisa membiarkan Aceh tetap merdeka. Di antara perkembangan tersebut adalah adanya unsur kesengajaan dari Aceh untuk membiarkan pihak-pihak luar (seperti Amerika Serikat, Turki, dan kekuatan Eropa lainnya selain Inggris dan Belanda) ikut campur di wilayah ini. Atas dasar itu pada tahun 1857 Belanda kembali menghidupkan perjanjian dengan Sultan Siak dan memasukkan kesultanan ini sebagai wilayah Belanda. Perjanjian ini jelas melanggar yurisdiksi Aceh, karena batas-batas Siak ditarik sampai ke Alas dan Langkat, yang termasuk wilayah hukum Aceh.

Inggris pun marah atas tindakan Belanda itu sehingga mengirimkan kapal perangnya ke pelabuhan-pelabuhan lada di wilayah Alas dan Langkat. Akan tetapi sikap Inggris kemudian berubah dan ‘mengizinkan’ Belanda untuk meneruskan ekspedisinya ke wilayah Aceh. Salah satu faktor yang mendorong perubahan sikap itu adalah terjadinya persaingan di antara kekuatan Eropa (termasuk Amerika Serikat) dalam memperluas daerah jajahan. Menurut pertimbangan Inggris, akan lebih baik apabila Aceh berada di bawah kekuasaan Belanda daripada jatuh ke tangan Perancis atau Amerika Serikat. Pada November 1871 Inggris dan Belanda mengadakan suatu kesepakatan di mana Belanda mendapatkan kebebasan mutlak di Sumatra. Sebagai gantinya, Belanda menyerahkan Pantai Emas di Afrika, memperbolehkan Inggris mengirim kuli-kuli India ke Suriname (jajahan Belanda di benua Amerika), serta memberikan hak yang sama kepada Inggris dalam perdagangan dari Siak ke utara.

Pada awal tahun 1873 konsul Amerika di Singapura mengadakan pembicaraan dengan utusan Aceh mengenai kemungkinan terwujudnya suatu perjanjian Aceh-Amerika Serikat. Situasi seperti itu telah mendorong Belanda untuk segera masuk ke Aceh. Pada bulan Maret 1873, Belanda menyerang Kutaraja dan mendaratkan pasukan berkekuatan 168 perwira dan 3.200 orang prajurit. Akan tetapi serangan itu berhasil dipukul mundur pasukan Aceh di bawah pimpinan **Teuku Imam Lueng Bata**. Bahkan panglima ekspedisi itu, yaitu **Mayor Jenderal J.H.R. Kohler**, terbunuh. Oleh karena penyebab perang ini adalah Belanda, maka orang-orang Aceh waktu itu menyebutnya “Perang Belanda di Aceh”.

Belanda berusaha menebus kekalahan itu dengan mengirimkan ekspedisi kedua yang berkekuatan tiga kali lipat dari ekspedisi yang pertama. Selain itu, angkatan laut Belanda melakukan blokade terhadap perairan Aceh, terutama jalur-jalur yang menghubungkan Aceh dengan tetangganya di Semenanjung Malaya, seperti Penang. Sasaran utama penyerangan Belanda adalah istana kesultanan karena mereka percaya bahwa jatuhnya istana akan menghentikan perlawanan Aceh.

Setelah melalui pertempuran sengit, pada tanggal 24 Januari 1874, pasukan Belanda berhasil menduduki istana Kutaraja. Akan tetapi **Sultan Mahmudsyah** dan kerabatnya berhasil meloloskan diri. Meskipun demikian, panglima Belanda, **Letnan Jenderal J. van Swieten**, mengumumkan bahwa kerajaan Aceh telah berhasil ditaklukkan dan daerah Aceh Besar dinyatakan sebagai milik pemerintah Hindia Belanda.

Jatuhnya istana Kutaraja dan penghapusan kesultanan Aceh oleh Belanda ternyata tidak menyurutkan perlawanan Aceh. Rakyat tetap mengakui keberadaan kesultanan Aceh. Perlawanannya pun tidak lagi sekedar perlawanan kerajaan tetapi telah menjadi perlawanan rakyat Aceh. Kebencian rakyat Aceh terhadap orang-orang Belanda yang dinilai sebagai orang kafir telah mengobarkan semangat perang jihad di kalangan rakyat Aceh. Dalam perkembangannya, sejak tahun 1881 terjadi pergeseran kepemimpinan dalam perlawanan rakyat Aceh. Apabila sebelumnya perlawanan terutama dipimpin oleh para bangsawan atau petinggi istana, maka kini pimpinan perlawanan didominasi oleh para alim-ulama. Salah satu tokoh ulama yang terkenal adalah **Tengku Cik di Tiro** (1836-1891). Perlawananpun telah berubah menjadi perang suci, perang *fisabilillah*.

Dalam situasi seperti itu akhirnya Belanda menemukan pemecahan dalam kebijakan yang diajukan oleh **Dr. Christiaan Snouck Hurgronje** (1857-1936) dan **Johannes Benedictus van Heutsz** (1851-1924). Snouck Hurgronje adalah seorang ilmuwan Belanda yang ahli tentang Islam. Sejak tahun 1891 hingga 1906 dia menjadi penasihat utama pemerintah kolonial dalam masalah Islam dan penduduk asli. Menurutnya untuk melawan rakyat Aceh fanatik di bawah pengaruh para ulama, tiada jalan lain kecuali menumpasnya. Namun di samping itu kekuatan mereka dapat

dipecah melalui pendekatan kepada para *uleebalang* yang dinilai lebih sekuler (semacam para *priyayi* di Jawa atau *penghulu* di Minangkabau). Adapun van Heutsz adalah seorang jenderal yang sudah lama berpengalaman dalam perang Aceh, yang kemudian diangkat sebagai Gubernur Aceh (1898-1904).

Berdasarkan nasehat Snouck Hurgronje inilah pihak Belanda melakukan pendekatan kepada para *uleebalang* dan upaya itu secara berangsur-angsur membuahkan hasil. Banyak kaum *uleebalang* yang mau berkompromi yang nantinya berbuah perpecahan di kalangan masyarakat Aceh.

Sekitar tahun 1903 dibentuk suatu pemerintahan yang benar-benar stabil berdasarkan hasil persekutuan dengan para *uleebalang* yang mau berkompromi. Pada tahun itu pula *Sultan Tuanku Daud Syah* menyerah karena mendapat ultimatum dari pihak Belanda yang akan membunuh anak dan isterinya yang telah tertangkap pada bulan November 1902. Meskipun demikian dia tetap menjalin hubungan dengan para gerilyawan. Bahkan pada tahun 1905 dia berusaha menjalin hubungan dengan konsul Jepang di Singapura untuk merencanakan serangan terhadap garnisun Belanda di Banda Aceh. Tapi upaya itu gagal dan Sultan diasingkan. Dalam tahun 1903 pula *Panglima Polem Muhammad Daud*, pemimpin militer utama dalam tahun-tahun terakhir, juga menyerah.

Sejak Sultan menyerah dalam periode 1903-1912 justru terjadi kericuhan sosial. Pada masa ini Van Heutsz diangkat menjadi Gubernur Jenderal (1904-1909). Kedudukannya sebagai Gubernur Aceh digantikan oleh Letnan Kolonel G.C.E. van Daalen, yang menjalankan pemerintahannya secara kejam. Banyak ulama terkemuka Aceh yang mati syahid. Menurut *kolonial verslag* tahun 1908 tindakan van Daalen yang bertujuan agar Aceh aman, justru mendorong semakin bertambahnya perlawanan yang dilakukan secara sistematis. Pihak Belanda menilai banyak perlawanan itu karena rakyat mendapat dukungan Sultan, yang berarti Sultan telah melanggar perjanjian.

Meskipun perang Aceh dianggap berakhir pada tahun 1912 dan pejuang Aceh berangsur-angsur menyerah, namun serangan terhadap orang-orang Belanda di sana-sini masih tetap berlangsung. Sejak tahun 1910 hingga 1921 tercatat ada 79 kali

pembunuhan terhadap orang-orang Belanda. Dan perlawanan terakhir yang cukup besar terjadi tahun 1927 di Bakongan.

B. Gerakan Sosial

Sejak Zaman Ekonomi Liberal, penetrasi sekaligus dominasi ekonomi Barat masuk hingga ke tingkat desa. Akibatnya, hal tersebut tidak saja membawa perubahan dalam masalah ekonomi saja tetapi juga dalam bidang sosial budaya. Penetrasi tersebut banyak menimbulkan kekacauan pada pranata dan struktur sosial setempat, baik dari segi nilai, norma ataupun fungsinya. Bahkan banyak lembaga-lembaga atau pranata sosial yang sebelumnya sering dijadikan tempat untuk menyalurkan perasaan ketidakpuasan, tidak berfungsi lagi.

Dalam perkembangannya, penetrasi asing ke dalam kehidupan desa itu bukan hanya menimbulkan keresahan namun juga konflik berdarah. Adapaun konflik tersebut dimotori oleh kelompok-kelompok pedesaan yang merasa tertindas atau kesulitan untuk mengimbangi dampak yang ditimbulkan penetrasi Barat ke wilayahnya. Pemerintah kolonial banyak memberikan istilah terhadap gerakan-gerakan itu, seperti “huru-hara”, “kerusuhan”, “gerakan Ratu Adil”, “gerakan Imam Mahdi”, “gerakan rohaniawan”, atau memberi nama sesuai dengan ideologinya atau nama pemimpin gerakan tersebut, seperti “gerakan Madrais”, “Gerakan Samin”, dan sebagainya. Sementara para ahli sejarah dan ilmu sosial menyebut gerakan-gerakan ini sebagai gerakan sosial.

Daerah yang paling banyak terjadi huru-hara atau pemberontakan adalah daerah tanah partikelir, yang banyak terdapat di wilayah Jawa Barat (termasuk provinsi Banten). Hal ini terjadi dalam kepemilikan tanah partikelir, para pemiliknya yang disebut sebagai tuan tanah tidak hanya diberi kekuasaan untuk memilik bidangnya saja, melainkan juga penduduk yang ada di atasnya. Di samping itu para tuan tanah diberikan hak istimewa yang dilindungi undang-undang. Dengan hak istimewanya itu para tuan tanah mempunyai keleluasaan dalam mengeksploitasi tanah miliknya, dan banyak di antaranya melakukan eksploitasi secara berlebihan, sehingga menimbulkan kesengsaraan bagi penduduk setempat. Adapun

pemberontakan petani yang terjadi di daerah ini antara lain: di Cirebon (1811), Ciomas, Bogor (1886), Bekasi (1913) dan Tanjung Oost (di kalangan masyarakat Betawi dikenal dengan sebutan pemberontakan *Entong Gendut* tahun 1916).

Setelah munculnya organisasi-organisasi sosial dan politik yang didirikan orang-orang pribumi, pengaruhnya terlihat pula dalam beberapa gerakan sosial. Tahun 1918 misalnya, terjadi satu gerakan pembangkangan oleh keluarga Haji Hasan dari Cimareme, Garut (Keresidenan Priangan) terhadap tuntutan pemerintah kolonial. Haji Hasan menolak menjual padinya kepada pihak pemerintah dengan jumlah dan harga yang telah ditentukan pihak pemerintah. Akibatnya, pemerintah menyerbu rumahnya, sehingga Haji Hasan beserta sebagian besar keluarganya tewas di tempat. Menurut pihak pemerintah, Haji Hasan adalah anggota *Sarekat Islam (SI) afdeling-B*. Dalam tahun yang sama di Toli-Toli, juga terjadi pembangkangan petani terhadap tuntutan pihak pemerintah kolonial, yang juga oleh pihak pemerintah dikatakan dihasut oleh SI afdeling-B.

Di samping itu, penetrasi ekonomi kapitalisme juga telah mendorong munculnya beberapa gerakan sektarian. Yang dimaksud dengan gerakan sektarian di sini adalah beberapa gerakan keagamaan yang muncul sebagai reaksi terhadap kepercayaan atau agama besar yang ada, yang dinilai sudah tidak mampu menjawab tantangan zaman, atau menjadi penyebab terpuruknya kesejahteraan mereka. Misalnya ada gerakan *Syahadat Kalimusada*, *Mad Rais* dan *Kaum Wira'i*.

Secara garis besar gerakan-gerakan sosial di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam enam kategori, yaitu perbanditan, protes, revivalistis, nativistis, messianistis-millenaristis, perang suci atau perang sabil.

Perbanditan adalah suatu gerakan yang bersifat bertentangan dengan pihak yang berkuasa atau bertentangan dengan tata tenteram masyarakat, seperti perampokan, penyamunan. Sebagai contoh gerakan dibawah pimpinan Mas Jakaria di Banten, pemberontakan Bagus Sunda dan Bagus Jabin di daerah Cirebon (1816). Kemudian di Surakarta sekitar tahun 1870 dikacaukan oleh gerombolan kecu di bawah pimpinan Jadangsa dari Sragen. Selain itu pada tahun 1876 daerah utara Madiun mendapat gangguan keamanan dari gerombolan R. Tirtadireja. Termasuk

dalam kategori ini adalah kegiatan mengambil “paksa” harta benda orang-orang kaya yang kikir atau pejabat pemerintah yang korup atau otoriter, untuk dibagi-bagikan hartanya kepada rakyat miskin. Para bandit seperti ini disebut oleh Eric J. Hobsbawm sebagai “bandit sosial”.

Gerakan protes adalah aksi kolektif menentang ketidakadilan atau merusak peraturan yang dirasakan tidak adil. Sebagai contoh, pada tahun 1839 rakyat Karawang menuntut agar wedana yang ada waktu itu diganti karena tidak termasuk keluarga bupati daerah tersebut; di Banyumas pada tahun 1850 penduduk menolak untuk bekerja tanpa dibayar di bangunan-bangunan pertahanan yang ada di Cilacap; kemudian dalam tahun yang sama, para petani dari bagian utara Demak beramai-ramai datang ke Semarang untuk menuntut agar pembayaran pajak tanah dapat dilakukan secara natural yaitu dengan menyetor padi; dan pada tahun 1853 para petani Pasuruan datang ke Surabaya untuk menyatakan penolakannya terhadap kewajiban penanaman tembakau.

Gerakan nativistis adalah semacam gerakan protes karena merasa tidak puas, namun di dalamnya terkandung tujuan (isu-isu) untuk menegakkan kembali kerajaan kuno yang diyakini merupakan “masa kejayaan” mereka. Gerakan nativistis ini misalnya menegakkan kembali kesultanan Banten; lalu gerakan Raksa Praja di Priangan tahun 1841 yang ingin menegakkan kerajaan Sunda; dan gerakan Nurhakim tahun 1871 yang ingin menegakkan kembali kerajaan Jawa.

Gerakan revivalistis yaitu kegiatan yang bertujuan untuk membangkitkan kembali nilai-nilai atau norma-norma lama; dan menuntut agar masyarakat lebih rajin menjalankan syariat agamanya. Mereka yakin dengan tindakan itu kehidupan mereka akan lebih tenteram dan sejahtera. Gerakan semacam ini antara lain terlihat dari gerakan tarekat-tarekat seperti terjadi di Banten dalam gerakan tarekat Kadiriyah; gerakan tarekat Naksabandiyah di Priangan Barat; dan gerakan tarekat Satariyah di Banyumas.

Gerakan messianistis adalah gerakan yang memuat harapan kedatangan Ratu Adil atau Imam Mahdi yang diyakini akan membawa perubahan kearah kehidupan yang lebih adil dan sejahtera. Peristiwa yang terjadi di Cilegon, Srikaton,

dan peristiwa Jasmani yang ketiganya terjadi pada tahun 1888 termasuk ke dalam kategori gerakan messianistis.

Perang suci atau **perang sabil** adalah gerakan sosial yang dijiwai oleh semangat perang di jalan agama seperti yang terjadi di Bandung pada tahun 1885, peristiwa Gedangan, Sidaarja pada tahun 1904, peristiwa Pak Jebrak di Brangkal tahun 1919 dan peristiwa Cimareme di bawah pimpinan Haji Hasan yang terjadi juga pada tahun 1919.

Sebagai catatan berdasarkan hasil studinya yang lebih mutakhir, Sartono Kartodirdjo membagi gerakan-gerakan sosial itu ke dalam empat kelompok, yaitu gerakan anti pemerasan (*anti-extortion movement*), gerakan messianistis, gerakan revivalistis dan sectarian; serta gerakan Sarekat Islam Lokal.

Seperti halnya perlawanan-perlawanan lainnya, gerakan-gerakan sosial tersebut yang semula banyak dipimpin oleh para pemimpin tradisional local yang mengandalkan kharismanya, sejak munculnya organisasi-organisasi “kebangsaan” yang relative modern, maka pimpinan gerakan-gerakan sosial yang menuntut keadilan itu banyak berpindah kepada para pemimpin organisasi kebangsaan. Munculnya Sarekat Islam sendiri pada awalnya adalah sebagai respon terhadap ketidakadilan dalam bidang ekonomi perdagangan, yang membuat para pedagang Cina dapat mendominasi perdagangan batik pada khususnya. Demikian pula gerakan-gerakan pemogokan, baik yang dikordinir oleh para pemimpin SI atau pun oleh Sarekat Rakyat atau PKI, pada dasarnya merupakan kelanjutan dari gerakan protes seperti yang pernah terjadi pada abad ke-19.

Setelah Indonesia merdeka, gerakan-gerakan sosial juga sering terjadi walaupun sifatnya agak berlainan dengan yang terjadi pada masa kolonial. Pola ideologinya memang ada yang hampir sama seperti gerakan revivalistis atau gerakan protes lainnya. Namun jika ditelusuri secara lebih mendalam, penyebabnya relative sama pula, yaitu munculnya rasa tidak puas atas peraturan atau pun perlakuan yang dinilai tidak adil dan membebani kehidupan mereka.

Pilihlah jawaban paling benar

1. Semua nama di bawah ini merupakan contoh pemberontakan melawan penjajahan Belanda, kecuali
- A. Perang Dipenogoro
 - B. Perang Padri
 - C. Perang Puputan Bali
 - D. Perang Aceh
 - E. Benar semua

Kunci: D

2. Semua faktor di bawah ini merupakan penyebab terjadinya perlawanan Patimura tahun 1819, kecuali
- A. Belanda kembali menerapkan kerja rodi terhadap rakyat Maluku
 - B. Belanda kembali melakukan monopoli perdagangan
 - C. Belanda memaksa rakyat untuk menjual produksi ikan asin kepada Belanda
 - D. Belanda mencabut kembali tunjangan kepada para pegawai yang semula diberikan oleh Inggris
 - E. Belanda menurunkan pangkat Thomas Matulesi menjadi sersan

Kunci: E

3. Penyebab utama terjadinya perlawanan rakyat Batak di bawah pimpinan Sisingamangaraja XII adalah
- A. Gerakan pasifikasi Belanda dinilai membahayakan kedudukan Si Singamangaraja
 - B. Gerakan Kristenisasi dinilai membahayakan kedudukan tanah Batak
 - C. Pemerintah Belanda telah membebani kehidupan penduduk Batak
 - D. Keluarga Si Singamangaraja telah sepakat bergabung dengan kelompok Padri
 - E. Semua jawaban salah

Kunci: B

4. Perlawanan Aceh terhadap Belanda melemah setelah hubungan antara kaum ulama dengan kaum *uleebalang* terpecah. Konseptor pemecah belah struktur kekuasaan Aceh itu adalah
- A. Christiaan Snouck Hurgronje
 - B. Johannes Benedictus van Heutsz
 - C. Van der Plass
 - D. Van der Capellen
 - E. Van Daalen

Kunci: A

5. Meskipun sebagian besar bangsawan dan rakyat Banjarmasin mendukung Pangeran Hidayatullah, namun Belanda lebih menyukai Pangeran Pangeran Tamjidillah sebagai pengganti Sultan Adam, sebab

- A. Tamjidillah adalah putra mahkota yang sudah mempunyai pengalaman dibandingkan Hidayatullah
- B. Tamjidillah seorang Islam ortodok yang tidak mempunyai pengalaman dalam masalah politik sehingga mudah dipengaruhi
- C. Tamjidillah memberikan konsesi lebih menguntungkan kepada Belanda daripada Hidayatullah
- D. Hidayatullah sudah terkenal anti Belanda
- E. Semuanya benar

Kunci: C

6. Pada tahun 1830 secara resmi pemerintah Belanda melaksanakan sistem perkebunan (*cultuurstelsel*) untuk meningkatkan ekspor pertanian dari pulau Jawa ke pasaran Eropa. Jenis tanaman yang diunggulkan antara lain:
- A. Rempah-rempah
 - B. Biji Pala dan bunga pala
 - C. Kelapa sawit
 - D. Tebu
 - E. Karet

Kunci: D

7. Salah satu faktor yang menjadi penyebab langsung terjadinya aksi-aksi kolektif Petani yang disertai tindak kekerasan sepanjang abad ke-19 M, adalah tingginya pungutan cukai (*cuke*). Beberapa aksi seperti itu antara lain:
- A. Perlawanan Petani Ciomas tahun 1886
 - B. Pemberontakan Petani Banten tahun 1888
 - C. Perlawanan Mad Rais
 - D. Pemberontakan Bagus Sunda tahun 1816
 - E. Pemberontakan Bagus Jabin tahun 1816.

8. Pemerintah Hindia Belanda sering kali menuduh ajaran tarekat sebagai biang keladi meningkatnya fanatisme radikal Islam. Adapun tarekat-tarekat itu antara lain:

- A. Satariah, Kadiriah dan Muhammadiyah
- B. Kadiriyah, Muhammadiyah, dan Ahmadiyah
- C. Naqsabandiyah, Satariah dan Ahmadiyah
- D. Naqsanadiyah, Kadirian dan Ahmadiyah
- E. Kadiriah, Satariah dan Naqsabandiah

Kunci: E

9. Perlawanan Petani terhadap Belanda di mana salah satu tujuannya untuk menegakkan struktur lama atau kerajaan lama, disebut
- A. Gerakan nativisme
 - B. Gerakan revivalisme
 - C. Gerakan mellinarisme
 - D. Gerakan messianisme
 - E. Gerakan sektarianisme

Kunci: A

10. Di bawah ini adalah perlawanan pribumi yang dapat dikalahkan oleh Belanda setelah adanya pihak intern yang berhasil “dibeli” oleh Belanda, kecuali
- A. Perang Aceh
 - B. Perlawan Diponegoro
 - C. Perlawanan Kaum Padri
 - D. Perlawanan Nuku
 - E. Perlawanan Bone
- Kunci: D

Bab III

Perang Kemerdekaan dan diplomasi

III.1.1.Deskripsi singkat

Mahasiswa akan memperoleh pemahaman mengenai kondisi politik dan keamanan negara setelah proklamasi kemerdekaan.

Mahasiswa akan memperoleh pemahaman mengenai peran diplomasi dalam revolusi kemerdekaan Indonesia.

III.1.2.Manfaat

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa dapat menjelaskan kondisi politik dan keamanan negara setelah proklamasi kemerdekaan.

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa dapat memperoleh manfaat berupa pemahaman mengenai sejarah Indonesia dalam perspektif politik internasional atau hubungan internasional.

III.1.3. Tujuan Instruksional Khusus

Pada akhir pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan:

1. Perang Kemerdekaan Indonesia yang terjadi dari tahun 1945-1949
2. Perjuangan militer dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia
3. Perjuangan Diplomasi untuk mendapatkan pengakuan internasional

III.1. Penyajian

III.2.1. Materi

A.Perjuangan mempertahankan kemerdekaan 1945-1949

Perjanjian Potsdam (salah satu kota di Jerman) tahun 1945 memberi kekuasaan pada sekutu dalam mengembalikan wilayah-wilayah negara-negara mereka yang sebelumnya diambil alih oleh negara-negara porors axis (Jerman, Jepang dan Italy). Berdasarkan perjanjian Potsdam, Belanda yang berkeinginan kembali menguasai Indonesia, menyatakan bahwa Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 adalah suatu negara “boneka” bentukan Jepang. Belanda menyatakan

bahwa rakyat Indonesia sangat menderita waktu dijajah Jepang, sehingga rakyat Indonesia membenci Jepang dan kolaboratornya (pendukung proklamasi). Rakyat Indonesia menginginkan untuk segera dibebaskan dari Jepang dan menunggu Tentara Sekutu untuk membebaskan Indonesia.

Negara sekutu yang dibebani menerima kekuasaan atas Indonesia berdasarkan perjanjian Potsdam adalah Inggris. Gambaran Indonesia yang diberikan oleh Belanda mengenai kebencian rakyat Indonesia terhadap Jepang dan kolaboratornya ternyata tidak terbukti. Ketika Inggris tiba di Indonesia (di Jakarta pada 29 September 1945) justru melihat bahwa rakyat Indonesia mengibarkan merah putih di mana-mana dan sangat mendukung Soekarno (menurut Belanda adalah kolaborator Jepang). Rakyat Indonesia bahkan menentang rencana kembalinya kekuasaan Belanda di Indonesia.

Melihat fenomena yang terjadi di Indonesia, Panglima Sekutu untuk Asia Tenggara Admiral Mountbatten memutuskan bahwa kewajiban sekutu di Indonesia hanya dilaksanakan di daerah-daerah kota pantai saja. Letjen Christison, panglima sekutu di Indonesia kemudian berunding dengan pihak Indonesia mengeluarkan suatu pernyataan:

The Republic of Indonesia will not be expelled and will be expected to continue those civil administration in this area outside those occupied by British Forces. We intend to see the leaders of various movements and shall tell them what we are coming for. I intend to bring Dutch representatives and Indonesian leaders together at a round table conference which the Dutch have steadfastly refused to do hiterto.¹

Indonesia menganggap pernyataan di atas sebagai pengakuan de facto atas kemerdekaan Indonesia. Apalagi Letjen Christison menegaskan bahwa sekutu (Inggris) tidak akan mencampuri urusan yang menyangkut status kenegaraan Indonesia. Pernyataan Letjen Christison tersebut bernuansa politis, sebab situasi dan kondisi yang dihadapi oleh tentara Inggris di Indonesia dalam posisi yang terjepit. Antara kepentingan Belanda dan kenyataan yang dihadapi bahwa Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaannya. Tentara Inggris memandang bahwa yang paling aman bagi tentara Inggris untuk bertugas di Indonesia dalam melucuti tentara Jepang adalah bekerjasama dengan pihak Indonesia.

¹ Suli Suleiman. "Politik Luar Negeri RI: Dari Masa ke Masa". Pusdiklat DEPLU. Jakarta 1987.

Pernyataan Letjen Christison tersebut menyebabkan kedatangan sekutu ke Indonesia diterima oleh pejabat-pejabat Indonesia yang menghormati sekutu. Letjen Christison bertemu dengan Soekarno pada 25 Oktober 1945. Pada pertemuan tersebut Presiden Soekarno menyatakan bahwa Indonesia bersedia berunding dengan pihak-pihak yang berkepentingan atas dasar pengakuan hak rakyat Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri.

Sementara pada pihak lain, Belanda mengajukan protes kepada Pemerintah Inggris di London atas tindakan Mountbatten dan Christison yang hakekatnya berarti memberi pengakuan de facto kepada Indonesia. Sikap Belanda tersebut disampaikan berdasarkan alasan bahwa antara Belanda dan Inggris terdapat perjanjian "*Civil Affairs Agreement*". Perjanjian tersebut berisi bahwa tentara Inggris akan memegang kekuasaan di Indonesia atas nama Pemerintah Belanda dan kemudian kekuasaan itu akan diserahkan kepada Kerajaan Belanda.

Belanda tidak memahami kondisi yang dihadapi tentara Inggris di Indonesia. Pasukan Belanda sering mengadakan patroli dengan alasan mengamankan situasi dari "gerombolan penjahat". Akan tetapi, patroli tersebut pada dasarnya untuk mencari pejuang-pejuang Indonesia. Sehingga patroli Belanda sering menggeledah rumah-rumah rakyat Indonesia tanpa alasan yang jelas, menyeret beberapa anggota keluarga atau seluruhnya. Aktivitas Belanda tersebut dimaksudkan untuk memancing keributan dengan rakyat Indonesia sehingga Inggris akan menambah kekuatan tentaranya di Indonesia.

Aktivitas Belanda tersebut menimbulkan spontanitas di kalangan pemuda Indonesia untuk memberikan perlawanan. Pada 29 Agustus 1945, Pemerintah Indonesia mulai mengorganisasi suatu angkatan perang. Berdasarkan unit-unit Peta (pembela tanah air) yang dipersenjatai dan dari jenjang beberapa organisasi pemuda dibentuklah BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang bermarkas di Jakarta. Unsur pokok BKR merupakan unit-unit yang otonom, yang berbasis pada wilayah dan sangat tergantung dari kuat dan tidaknya tingkat pengawasan dari pusat. Sejak 5 Oktober 1945 nama BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Unit-unit yang menjadi unsur pokok kemudian diawasi secara lebih ketat meskipun kurang efektif. Unit-unit yang otonom tersebut secara spontan melibatkan diri dalam

perlawanan terhadap Belanda. Bersamaan dengan perlawanan terhadap Belanda, unit-unit otonom tersebut berupaya mengusir orang Jepang dan merebut senjatanya.

Melihat situasi tersebut tentara Sekutu berupaya memulihkan keamanan dan ketertiban di bawah kekuasaan Inggris di kota-kota besar dan pelabuhan-pelabuhan di Jawa dan Sumatera. Sekutu bahkan menggunakan tentara Jepang untuk menyerang dan merebut kembali kota-kota yang telah dikuasai unit-unit pejuang Indonesia. Dengan dipakainya tentara Jepang, telah menghadapkan pejuang-pejuang Indonesia kepada tentara Belanda, Sekutu, dan Jepang sekaligus. Kebijakan sekutu juga telah memperkuat dugaan bahwa Indonesia akan diserahkan kepada Belanda setelah situasi aman. Pertempuran meluas hampir di seluruh pulau Jawa, Sumatera, dan Bali.

Pertempuran pada paruh pertama bulan Nopember di Surabaya memperlihatkan semangat keberanian dan pantang menyerah bangsa Indonesia. Pertempuran selama sepuluh hari terjadi antara pejuang-pejuang Indonesia yang terdiri dari para pemuda berjuang dengan pasukan sekutu (Inggris dan India). Pertempuran tersebut banyak memakan korban jiwa dari para pejuang Indonesia. Dengan persenjataan lengkap seperti pesawat terbang dan meriam, sekutu akhirnya berhasil menguasai kota Surabaya. Meskipun demikian sekutu mulai menyadari bahwa kemerdekaan Indonesia didukung oleh rakyat Indonesia secara aktif.

Pertempuran-pertempuran yang terjadi menyebabkan munculnya dua pilihan bagi sekutu, pertama, mereka harus mendatangkan pasukan-pasukan yang lebih besar apabila ingin tetap mempertahankan kebijakannya terhadap Indonesia. Kedua, meninggalkan kebijakan-kebijakannya terhadap Indonesia. Inggris juga mulai memperlihatkan ketidaksenangan mereka terhadap Belanda yang tidak mau mengadakan perundingan dengan Indonesia.

Pertempuran-pertempuran antara pihak pejuang kemerdekaan Indonesia dan pihak sekutu beserta Belanda terus berlangsung, meskipun sejak tahun 1946 Belanda pada akhirnya bersedia melakukan perundingan dengan pihak Indonesia. Pertempuran-pertempuran dengan intensitas yang berkurang dibandingkan sepuluh minggu terakhir pada akhir tahun 1945. Di pulau Jawa dan Sumatera, Inggris kemudian diikuti oleh Belanda membatasi ruang operasinya hanya pada daerah-daerah yang mereka kuasai sekitar Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya,

Padang, Medan, dan Palembang. Di beberapa wilayah lainnya, pasukan Australia telah berhasil melucuti Jepang dan kemudian diambil alih oleh Belanda. Wilayah-wilayah tersebut antara lain Kalimantan, Sulawesi Selatan, Maluku dan Sunda Kecil.

Sementara itu di Bali, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat Daya pertempuran antara pihak Indonesia dan Belanda berjalan terus. Di Sulawesi Barat Daya, karena kekuatan pihak Indonesia yang cukup kuat, maka Belanda mendatangkan Kapten Raymond Westerling untuk menumpas perjuangan pihak Indonesia. Westerling merupakan suatu sejarah kekejaman Belanda di Indonesia. Menurut pihak Indonesia Westerling telah membantai 30.000 orang sementara menurut sumber tidak resmi militer Belanda dinyatakan telah membunuh 3.000 orang. Di Sulawesi Utara perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh serdadu-serdadu KNIL yang membelot.

Pertempuran-pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan antara tahun 1945-1949 berpengaruh terhadap perundingan-perundingan pihak Indonesia dan Belanda. Ada beberapa periode yang dapat dikatakan bahwa pertempuran relatif berhenti, yaitu pada beberapa bulan sebelum pasukan Inggris menarik diri pada tahun akhir November 1946, satu dua bulan setelah perjanjian Linggarjati. Di luar periode damai tersebut, pertempuran-pertempuran tetap terjadi.

B. Menuju Perundingan

Alasan Belanda menolak untuk mengadakan kontak dengan pihak Indonesia karena menganggap bahwa pihak yang berkuasa di Indonesia adalah kolaborator Jepang. Untuk itu Esler Dening, penasehat Laksamana Mounbatten, memberitahu Soekarno bahwa di mata Sekutu kabinet Soekarno tidak dapat diterima untuk berunding dengan Belanda karena Soekarno dianggap sebagai kolaborator Jepang. Suatu perubahan kepemimpinan sangat diperlukan agar wakil Indonesia akan dilihat sebagai orang-orang yang tidak mempunyai kaitan dengan Jepang.

Tokoh yang dianggap paling tepat sesuai dengan nasehat Esler Dening adalah Sutan Sjahrir. Seorang yang dikenal anti fasis dan aktif dalam perlawanan bawah tanah terhadap penjajahan Jepang. Mengingat hal itu, maka kemudian Soekarno menunjuk Sjahrir sebagai Perdana Menteri dan melantiknya pada 14 Nopember 1945.

Kebijakan Soekarno tersebut mendatangkan hasil, setelah dilantik menjadi Perdana Menteri, pada 17 Nopember 1945 Sjahrir mulai melakukan pertemuan dengan pihak Belanda yang dihadiri oleh pihak Inggris. Dalam perundingan tersebut pihak Indonesia meminta agar perundingan-perundingan selanjutnya dengan Belanda ditengahi oleh Inggris². Untuk itu pemerintah Inggris menunjuk Sir Archibald Clark Kerr sebagai ketua dalam perundingan Indonesia-Belanda.

Pada pertemuan dengan pihak Belanda pada 10 Februari 1946, van Mook dari pihak Belanda menyampaikan rencananya kepada Sjahrir mengenai persemakmuran Indonesia yang terdiri atas kesatuan-kesatuan yang mempunyai otonomi dari berbagai tingkat. Negara persemakmuran tersebut akan menjadi bagian dari Kerajaan Belanda. Bentuk politik ini hanya berlaku untuk waktu yang terbatas, setelah itu anggota dalam Kerajaan dapat menentukan apakah hubungannya akan dilanjutkan berdasarkan kerja sama yang bersifat sukarela atau tidak sama sekali.

Setelah terbentuk Kabinet Sjahrir II, Sjahrir membuat usul balasan yang terdiri dari:

- a. Republik Indonesia harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas Hindia-Belanda.
- b. Pinjaman-pinjaman Belanda sebelum tanggal 8 Maret 1942 menjadi tanggungan pemerintah Republik Indonesia.
- c. Federasi Indonesia-Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu, dan mengenai urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada suatu badan federasi yang terdiri atas orang-orang Indonesia dan Belanda.
- d. Tentara Belanda segera ditarik dari Indonesia dan jika perlu diganti oleh Tentara Republik Indonesia.
- e. Pemerintah Belanda harus membantu pemerintah Indonesia untuk dapat diterima sebagai anggota Perserikatan Bangsa-bangsa.
- f. Selama perundingan berlangsung, semua aksi militer harus dihentikan dan pihak Republik akan melakukan pengawasan terhadap pengungsian tawanan-tawanan Belanda dan interniran lainnya³.

Pihak Belanda menolak usul dari pihak Indonesia. Van Mook secara pribadi kemudian mengusulkan Republik Indonesia diakui sebagai wakil Jawa untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pembentukan negara federal yang bebas dalam

²Oey Hong Lie, *War and Diplomacy in Indonesia 1945-50*. Townsville: Comitee of South East Asian Studies James Cook University of North Queensland. 1981 hal 47.

³Marwati Djoened Poepongoro dan Nugroho Notosutanto. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka. 1990 hal 125.

lingkungan Kerajaan Belanda. Wakil semua bagian Hindia Belanda dan wakil semua golongan minoritas akan berkumpul untuk menetapkan struktur negara Indonesia di masa depan. Selanjutnya tentara Belanda akan menggantikan tentara Serikat.

Pada akhir Maret 1946, Sjahrir memberikan jawaban yang meminta Belanda mengakui kedaulatan de facto Republik Indonesia atas Jawa dan Sumatra serta meminta kerjasama dalam membentuk RIS.

Permintaan atau usul Sjahrir tersebut nampaknya sesuai dengan keinginan Belanda, sehingga kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perundingan lanjutan. Pada pertemuan Sjahrir dan van Mook tanggal 30 Maret 1946, van Mook menegaskan kembali bahwa usulan-usulannya dalam beberapa kali pertemuan dengan Sjahrir merupakan gagasannya secara pribadi dan tidak mendapat mandat dari pemerintah Belanda. Kemudian van Mook menyatakan bahwa hasil-hasil pertemuannya dengan Sjahrir yang mewakili pihak Republik Indonesia akan dilaporkan kepada pemerintah Belanda.

Pada 14 – 24 April 1946 terjadi pertemuan yang merupakan kontak pertama secara resmi antara Indonesia-Belanda. Pertemuan tersebut terjadi di Hoge Veluwe, Belanda dengan disaksikan oleh wakil Inggris Sir Archibald Clark Kerr. Utusan Indonesia ke perundingan Hoge Veluwe adalah Mr. Suwandi, dr. Sudarsono, dan Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, sementara delegasi Belanda terdiri dari Dr. Van Mook, Prof. Logemann, Dr. Idenburgh, Dr. Van Royen, Prof. Asbeck, Sultan Hamid II dari Pontianak, dan Surio Santoso.

Dalam pertemuan tersebut pihak Belanda menyatakan akan mengakui kedaulatan Indonesia dalam pengertian masih berada di lingkungan Kerajaan Belanda. Wilayah Indonesia yang akan diakui adalah wilayah di luar daerah-daerah yang telah dikuasai Belanda seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bandung. Sikap pihak Belanda tersebut tentu saja membuat kecewa pihak Indonesia.

Perundingan Hoge Veluwe gagal mencapai kesepakatan disebabkan oleh kondisi dalam negeri masing-masing. Di Belanda, pemerintah Belanda kurang mendukung perundingan tersebut disebabkan sedang menghadapi pemilihan umum. Sementara di Indonesia, terdapat kelompok-kelompok yang menentang perundingan

tersebut. Bahkan Sjahrir diculik oleh kelompok yang menentang perundingan tersebut. Sehingga kabinet Sjahrir II jatuh.

Pada 2 Oktober 1946 Sjahrir kembali ditunjuk menjadi perdana menteri dan membentuk Kabinet Sjahrir III. Kabinet tersebut diberi mandat oleh Presiden untuk mewujudkan Indonesia merdeka penuh. Sjahrir kemudian membentuk suatu delegasi untuk berunding dengan Belanda yang terdiri dari Sjahrir, Amir Syarifudin, Moh Roem, A.K. Gani, Leimena, Sudarsono, Susanto, dan Ali Budiardjo sebagai sekretaris. Di Belanda situasinya mengalami perubahan, karena perdana menteri Schermerhon diganti oleh I.J.M. Beel. Perdana menteri yang baru kemudian membentuk suatu Komisi Jendral (*Commissie-General*) yang terdiri dari Schermerhon, van Pol, de Boer, dan Sanders sebagai sekjen. Wakil khusus Inggris untuk Asia Tenggara, Lord Inverchapel juga diganti oleh Lord Killearn.

Pada 30 September 1946 Lord Killearn mengadakan pertemuan informal dengan Sjahrir, Schermerhon dan Wright (wakil Killearn). Dalam pertemuan tersebut Schermerhon menjelaskan mengenai tujuan komisi jendral secara garis besar dan hal-hal mengenai perundingan. Sementara Sjahrir mengusulkan agar dalam perundingan selanjutnya pihak Indonesia dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Tanpa diduga usul Sjahrir tersebut disetujui oleh Schermerhon. Dengan demikian dapat dilihat adanya suatu perubahan pandangan dalam pemerintah Belanda, Soekarno-Hatta tidak dianggap lagi sebagai wakil kolaborator Jepang. Melainkan sebagai pihak dari pemerintahan Indonesia yang mandiri. Bukan dari negara “boneka” Jepang.

Disetujuinya Soekarno - Hatta sebagai pimpinan delegasi Indonesia secara langsung juga memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia adalah sebuah negara yang resmi. Hal itu dilihat dari sudut pandang persyaratan sebuah negara, yaitu memiliki wilayah tertentu, pemerintahan yang nyata yang dipimpin oleh seorang kepala negara, kabinet dengan perdana menterinya, adanya badan legislatif (dalam hal ini di Indonesia adalah KNIP), dan adanya tentara reguler⁴. Sebelum perundingan politik dimulai semua pihak setuju untuk mengadakan gencatan senjata.

⁴ A.B. Lopian dan P.J. Droogloper (ed). Hal 13-14.

Pada 7 Oktober 1946, secara formal delegasi Belanda dan delegasi Indonesia melanjutkan perundingan kembali. Delegasi Indonesia masih dipimpin oleh Sjahrir dengan anggota-anggotanya terdiri dari Moh Roem, Susanto, A.K. Gani, Amir Syarifudin, Leimena, dan Sudarsono. Delegasi Belanda terdiri dari anggota-anggota komisi jendral, van Mook dan Idenburg. Kedua delegasi sepakat untuk mengadakan gencatan senjata sebelum perundingan dimulai. Kesepakatan tersebut ditandatangani pada 7 Oktober 1946 di Jakarta.

Setelah masalah gencatan senjata terselesaikan, kemudian dilaksanakan perundingan-perundingan politik yang berlangsung selama empat kali di Jakarta. Perundingan tersebut secara bergantian mengambil tempat di kedua belah pihak. Apabila pihak Belanda menjadi tuan rumah maka dipakai Istana Rijswijk (sekarang istana negara), sebagai pemimpin sidang adalah pihak Indonesia. Sementara apabila pihak Indonesia menjadi tuan rumah maka dipakai kediaman Sjahrir di jalan Pengangsaan Timur No 56 (sekarang Jl Proklamasi), sebagai pimpinan sidang adalah pihak Belanda. Perundingan yang terakhir berlangsung pada 5 Nopember 1946. Sebagai landasan perundingan dipakai rancangan persetujuan yang merupakan gabungan antara rancangan Delegasi Indonesia dan Delegasi Belanda.

Untuk perundingan selanjutnya, atas saran Maria Ulfa yang saat itu menjabat menteri sosial yang berasal dari Kuningan, Jawa Barat, dipilih tempat di desa Linggarjati yang memiliki tempat peristirahatan yang tenang namun tidak jauh dari Jakarta.

Perundingan Linggarjati dimulai pada 11 November 1946, masing-masing pihak yang berunding berupaya mempertahankan pendapatnya. Ada dua masalah yang tidak mencapai titik temu, yaitu mengenai Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan soal kedaulatan Negara Indonesia Serikat. Persoalan pertama diajukan Indonesia sebagai upaya untuk mendesak Belanda mengakui Republik Indonesia secara de facto. Belanda menolak usulan tersebut dengan alasan bahwa pengakuan tersebut akan membuat Indonesia dan Belanda sejajar dalam hukum internasional. Soal kedua pun tidak mencapai kata sepakat karena delegasi Belanda menolak pencantuman kalimat Negara Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka.

Pada 12 Nopember malam, setelah perundingan formal hari itu berakhir, Presiden Soekarno mengundang delegasi Belanda untuk berkunjung ke kota Kuningan. Delegasi Belanda menyambut undangan tersebut. Dalam pertemuan malam itu delegasi Indonesia dihadiri oleh Soekarno, Moh Hatta, A.K.Gani, dan Amir Syarifudin. Sjahrir karena merasa kelelahan setelah seharian bersidang tidak hadir dalam pertemuan tersebut dan memilih untuk beristirahat. Selain itu, Sjahrir memandang bahwa pertemuan tersebut hanya bersifat seremonial saja. Ternyata dalam pertemuan malam itu terjadi kesepakatan antara utusan Belanda dan Indonesia. Pada awalnya Soekarno menanyakan kepada van Mook mengenai jalannya perundingan. Van Mook kemudian menjelaskan bahwa hanya satu hal saja yang belum tercapai yaitu mengenai usul delegasi Indonesia untuk mengubah kata “merdeka” di belakang kata Negara Indonesia Serikat menjadi “berdaulat”. Satu hal penting lainnya yang tidak dikemukakan oleh van Mook adalah mengenai usulan Indonesia tentang perwakilan Indonesia di luar negeri.

Pada kesempatan itu, van Mook kemudian menanyakan kepada Presiden Soekarno apakah dengan diterimanya perubahan kata “merdeka” menjadi “berdaulat” presiden dapat menyetujui rancangan perjanjian seluruhnya. Presiden Soekarno dengan antusias menyetujui untuk menerima perjanjian secara menyeluruh dengan mengesampingkan usul perwakilan Indonesia di luar negeri. Hal itu dimungkinkan karena presiden tidak menerima informasi mengenai perundingan secara lengkap.

Setelah mendapat laporan dari A.K. Gani dan Amir Syarifudin mengenai pertemuan malam itu, Sjahrir sangat kecewa. Akan tetapi, Sjahrir harus tunduk kepada keputusan Presiden Soekarno. Oleh karena itu, saat Schermerhon datang dan mengusulkan untuk mengadakan rapat pleno yang diketuai oleh Killearn, Sjahrir menyetujuinya. Rapat pleno kemudian diadakan pada pukul 10.30 malam dan kedua delegasi dinyatakan telah mencapai kesepakatan.

Pada 13 Nopember 1946 diadakan pertemuan kembali antara Indonesia dan Belanda. Dalam pertemuan tersebut, atas permintaan Soekarno, Sjahrir mengusulkan agar dibentuk badan arbitrase untuk menengahi permasalahan Indonesia dan Belanda. Usul tersebut disetujui oleh delegasi Belanda pada pertemuan selanjutnya yang berlangsung tanggal 15 Nopember 1946 di Istana Rijswijk. Pada pertemuan tersebut

naskah hasil perundingan di Linggarjati dalam bahasa Belanda diparaf oleh kedua delegasi. Pada pertemuan 18 Nopember 1946 bertempat di rumah Sjahrir diparaf naskah Linggarjati dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pokok-pokok perjanjian Linggarjati adalah;

- a. Belanda mengakui kekuasaan de facto Republik Indonesia yang meliputi wilayah Jawa, Madura, dan Sumatra.
- b. Belanda dan Indonesia sepakat untuk mendirikan negara Federasi bernama Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari Republik Indonesia, Negara Kalimantan dan Indonesia Timur.
- c. Belanda dan Indonesia mendirikan Uni Indonesia-Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda.
- d. RIS akan dibentuk selambat-lambatnya pada 1 Januari 1949 dan Uni akan membentuk organ-organnya sendiri yang mengurus kepentingan bersama dalam bidang-bidang pertahanan, hubungan luar negeri serta ekonomi dan keuangan.
- e. Kedua pihak akan mengurangi kekuatan masing-masing dan pasukan Belanda secara berangsur ditarik dari wilayah RI yang masih diduduki.
- f. RI akan mengakui tuntutan bangsa asing untuk memperoleh ganti rugi atau mempertahankan hak milik mereka di daerah-daerah yang dikuasai RI.

Persetujuan Linggarjati pada hakekatnya merupakan prinsip-prinsip dasar untuk menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda yang pada akhirnya ditandatangani kedua delegasi pada 25 Maret 1947.

Meskipun sudah diambil kata sepakat, kedua belah pihak memiliki penafsiran berbeda atas isi perjanjian Linggarjati. Pihak Indonesia memandang tidak perlu melakukan suatu tindakan apapun yang berhubungan dengan kedaulatannya menjelang terbentuknya RIS. Dalam pandangan Indonesia Uni Indonesia-Belanda tidak mempunyai kekuatan nyata yang memungkinkan untuk membuat keputusan yang menyangkut kewenangan, Pemerintah RI dan Ratu Belanda hanyalah sebagai lambang. Kedaulatan RIS dan Belanda tetap berada di tangan masing-masing.

Sementara itu, pihak Belanda berpendapat bahwa dengan persetujuan tersebut RI mengakui kedaulatan Belanda di seluruh wilayah RI sampai terbentuknya RIS pada 1 Januari 1949. Sebelum RIS terbentuk Indonesia akan diperintah oleh pemerintah peralihan dan Uni Indonesia-Belanda akan merupakan suatu Uni yang

mempunyai kekuatan nyata yang mempunyai kekuasaan seperti “super state” atas kepentingan bersama.

Pada 27 Mei 1947, Pemerintah Belanda menyampaikan nota kepada RI yang berisi:

- a. Menjelang terbentuknya RIS, Indonesia akan diperintah oleh sebuah “Pemerintah Peralihan” dimana wakil Mahkota Belanda akan mempunyai suara menentukan.
- b. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Peralihan adalah penguasaan tentang soal ekspor/impor dan devisa seluruh Indonesia.
- c. Selama masa peralihan, RI-Belanda membentuk suatu “gendermerie” bersama yang terdiri dari pasukan Belanda dan Indonesia untuk menjaga keamanan di seluruh Indonesia termasuk daerah kekuasaan RI.

Pemerintah RI menilai bahwa nota tersebut sebagai ultimatum Belanda, dan menafsirkan bahwa RI hendak dijadikan sebagai salah satu negara bagian yang sama sekali tidak berdaulat dalam RIS. Didorong untuk menyelesaikan masalah dengan jalan damai dan kompromi, maka nota Pemerintah Belanda tersebut dijawab oleh PM Sjahrir dengan konsesi-konsesi berupa pengakuan kedaulatan Belanda selama masa peralihan dan kesediaan menerima kedudukan wakil Mahkota Belanda yang mempunyai hak memutuskan dalam masa peralihan tersebut.

Sikap Sjahrir mendapat serangan dari Komite Nasional Indonesia Pusat, sehingga Sjahrir menyerahkan kabinetnya kembali kepada Presiden Soekarno. Dua hari setelah pemerintahan Sjahrir meletakkan jabatan, Amerika Serikat menyampaikan suatu gagasan dalam bentuk memoire kepada pemerintah Indonesia. Gagasan dalam memoire tersebut adalah untuk membentuk pemerintah peralihan dan mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan. Pesan atau gagasan dari Amerika Serikat tersebut sejalan dengan keinginan Belanda. Hal itu dapat dipahami karena Belanda adalah anggota NATO yang dimotori Amerika Serikat. Keberadaan Belanda dalam NATO dibutuhkan Amerika Serikat guna mengimbangi Uni Soviet yang menggalang negara-negara komunis.

Selain melalui perundingan, Belanda pun menginginkan penggunaan kekuatan militernya untuk menggagalkan kemerdekaan Indonesia. Dengan keluarnya pasukan Inggris dari Indonesia pada 30 November 1946, Belanda merasa semakin kuat kedudukannya. Sejumlah 160.000 pasukannya yang terlatih, telah dipersiapkannya

untuk memasuki wilayah Indonesia. Sebagian pasukan tersebut telah melakukan latihan-latihan dan persiapan di Malaysia dengan mempergunakan fasilitas Inggris.

Amir Sjarifudin sebagai pengganti Sjahrir yang menghadapi situasi sulit kemudian melakukan konsesi-konsesi yang lebih jauh lagi. Amir Sjarifudin menyatakan persetujuannya untuk mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan, mengakui hak wakil mahkota Belanda untuk memutuskan, serta hubungan luar negeri yang disesuaikan dengan prinsip *gendermarie* bersama dimana akan dibentuk sebuah direktorat yang berada dalam satu kepemimpinan. Akan tetapi konsesi dari Indonesia melalui Amir Sjarifudin yang oleh pihak Indonesia dipandang terlalu banyak mengalah, justru disikapi kekecewaan Belanda. Pihak Belanda menginginkan adanya *gendermarie* (gencatan senjata) yang berhak melakukan tindakannya di seluruh Indonesia termasuk wilayah Republik Indonesia.

Keinginan Belanda tersebut mendapat penolakan dari pihak Indonesia, sehingga Belanda melakukan agresi militer pada 21 Juli 1947. Belanda tidak menyebut serangannya ke Indonesia sebagai agresi, melainkan “aksi polisionil” untuk mencitrakan bahwa serangan yang mereka lakukan adalah suatu tindakan pengamanan di dalam negeri untuk menghadapi para “pengacau keamanan”.

Di dalam negeri sendiri terdapat pro dan kontra mengenai perjanjian Linggarjati, terutama mengenai sikap Indonesia yang banyak memberikan konsesi dianggap banyak merugikan kedudukan Indonesia. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa perjanjian tersebut telah memaksa Belanda untuk duduk sejajar dalam perundingan untuk pertamakali dengan Indonesia. Secara langsung maupun tidak langsung Pemerintah Belanda mengakui de facto eksistensi kedaulatan Republik Indonesia.

Indonesia pada saat yang bersamaan tetap melakukan perluasan hubungan dengan negara-negara lain. Hal itu dimaksudkan untuk memperoleh dukungan dunia internasional. Secara khusus, perdana menteri Sjahrir mengintruksikan kepada perwakilan Republik Indonesia di Amerika Serikat yang dipimpin oleh Soemitro Djohadikusumo, Charles Tambu, Sultan Hamzah, dan Soedjatmoko agar

menandingi propaganda Belanda dan bersiap untuk melobi Dewan Keamanan PBB agar melakukan persidangan apabila Belanda melakukan agresi militer.⁵

Di Singapura sejak permulaan tahun 1947 telah didirikan suatu perwakilan tetap RI yang diketuai oleh Mr. Utoyo. Singapura pada saat itu memegang peran yang sangat penting dalam strategi perjuangan Republik Indonesia, baik secara militer, politik, dan ekonomi. Adanya masyarakat Indonesia atau orang-orang asal Indonesia yang berjumlah besar membuka pintu untuk menggunakan Singapura sebagai pangkalan utama pemerintahan Republik Indonesia di luar negeri dalam mendapatkan dana perjuangan.⁶

Indonesia juga menjalin hubungan dengan India dimulai paling tidak sejak April 1946, ketika Sjahrir menawarkan untuk memberikan beras yang saat itu sedang dibutuhkan oleh rakyat India. Selain rasa kemanusiaan, tawaran tersebut sebetulnya mempunyai makna politis. Dengan diterimanya tawaran Indonesia, maka India dipandang mengakui eksistensi Republik Indonesia.

Hubungan dengan India semakin kokoh dengan adanya undangan Pandit Jawaharlal Nehru kepada Sjahrir untuk menghadiri sidang *Inter-Asian Relations Conference*. Konferensi tersebut berlangsung pada 23 Maret sampai 1 April 1947 dan merupakan suatu konferensi Asia pertama. Arti *Inter-Asian Relations Conference* sangat penting bagi Indonesia karena dihadiri oleh bangsa-bangsa di Asia. Republik Indonesia mengirimkan suatu delegasi yang besar yang terdiri dari tigapuluh orang, dengan ketua Abu Hanifah. Sjahrir bersama Agus Salim turut serta menghadiri konferensi. Pada kesempatan konferensi itu anggota-anggota delegasi Republik Indonesia melobi bangsa-bangsa di Asia untuk membantu perjuangan Indonesia apabila Belanda melakukan agresi.⁷

Sebagai negara dengan mayoritas berpenduduk Islam, Republik Indonesia pun mencari dukungan dari negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

⁵Soejatmoko. Menjelajah Dunia Diplomasi, dalam Departemen Luar Negeri. Bunga Rampai Kenangan Dalam Dinas Luar Negeri (Suka Duka Napak Tilas). Departemen Luar Negeri, 1989. hal 84.

⁶Soejatmoko. Menjelajah Dunia Diplomasi, dalam Departemen Luar Negeri. Bunga Rampai Kenangan Dalam Dinas Luar Negeri (Suka Duka Napak Tilas). Departemen Luar Negeri, 1989. hal 84-86.

⁷ Abu Hanifah, hal 52-53.

Untuk itu, Agus Salim setelah menghadiri konferensi di India kemudian melanjutkan perjalanan ke negara-negara Arab. Hasil dari perjalanan tersebut beberapa negara Arab mengakui pemerintahan Republik Indonesia tanpa dibatasi oleh peraturan-peraturan persetujuan Linggarjati. Negara-negara tersebut adalah Mesir, Irak, Syria, Lebanon, Saudi Arabia, Afghanistan, dan Yaman.

Akibat dari kesuksesan misi diplomasi Indonesia, hubungan Republik Indonesia dan Belanda menjadi buruk. Hubungan buruk itu ditandai dengan sering terjadinya insiden bersenjata. Untuk menghindari konfrontasi militer, Sjahrir kemudian memberikan konsensi-konsensi kepada Belanda.

C. Perjanjian Roem Royen

Dalam pandangan Belanda, persetujuan Renville telah mengalami kegagalan karena Moh Hatta dianggap telah menarik kembali janjinya kepada Menteri Belanda yang berkunjung ke Yogyakarta pada Desember 1948. Pelaksanaan persetujuan Renville yang ditandatangani pada awal Januari 1948 setelah berunding selama satu tahun tanpa hasil. Belanda selalu mengulur waktu, dan berupaya untuk menyerang Indonesia. Hal itu terbukti ketika Belanda melakukan agresi militer yang ke II.⁸

Pada agresi militer yang kedua ini Belanda menangkap para pemimpin Republik Indonesia. Para pemimpin Indonesia membiarkan diri mereka ditangkap dengan harapan bahwa opini dunia akan tersinggung sehingga kemenangan militer Belanda akan berbalik menjadi kekalahan diplomatik. Akan tetapi, pihak militer Indonesia tidak dapat memahami alasan menyerahnya politisi sipil kepada Belanda, sementara prajurit mengorbankan jiwa mereka demi Indonesia. Hal itu menyebabkan Jenderal Soedirman tidak percaya pada Soekarno dan perjanjian Roem – Royen. Dalam pandangan Soedirman, Soekarno tidak memiliki komitmen untuk berjuang bersama rakyat melawan Belanda⁹.

Sementara itu, Belanda menduga bahwa dengan menduduki Yogyakarta, yang pada saat itu menjadi Ibu Kota Republik Indonesia, pemimpin revolusi akan dibunuh sehingga perlawanan bangsa Indonesia kepada Belanda akan berhenti. Dugaan

⁸ Mohammad Roem. *Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan RI*. Jakarta: Gramedia. 1989. hal 8.

⁹ Ricklef.M.C. *Sejarah Indonesia Modern (edisi kesembilan)*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 1999. Hal 347.

Belanda tersebut terbukti salah, karena setelah ditangkapnya presiden dan wakil presiden, tentara dan rakyat Indonesia meneruskan perjuangan dengan cara bergerilya. Di samping itu, dunia internasional, terutama Amerika Serikat terus mendesak Belanda agar menyelesaikan sengketanya dengan Indonesia melalui jalan damai.

Berdasarkan permintaan Australia dan India, Dewan Keamanan PBB mulai membicarakan masalah RI-Belanda pada 31 Juli 1947 yang dipimpin oleh Oscar Lange (Polandia). Atas desakan sebagian besar anggota persidangan, pembahasan dalam persidangan akhirnya lebih menekankan memecahkan masalah penghentian konflik daripada mempersoalkan mengenai kehadiran delegasi Indonesia¹⁰.

Australia mengajukan suatu resolusi yang menyerukan untuk menghentikan peperangan yang terjadi di Indonesia dan mengusulkan agar kedua belah pihak yang terlibat dalam peperangan menyerahkan permasalahannya kepada arbitrase (penengah). Usul Australia tersebut selaras dengan Perjanjian Linggarjati pasal 17¹¹.

Pada persidangan DK-PBB ke-173 tanggal 1 Agustus 1947 muncul suatu sikap menentang atas resolusi yang diajukan oleh Australia di atas. Penentangan dimotori oleh Amerika Serikat, yang menolak pencantuman setiap fasal-fasal Piagam PBB maupun Linggarjati. Sebagai gantinya Amerika Serikat mengajukan suatu resolusi yang menganjurkan agar DK-PBB menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia. Usulan Amerika Serikat disetujui oleh persidangan dengan perbandingan suara setuju sebanyak 8, dan abstains 3 suara¹².

Sikap Amerika Serikat tersebut didasarkan pada kepentingan politik dan ekonomi Amerika Serikat, yaitu untuk menghindari campur tangan Uni Soviet

¹⁰ Mohammad Roem. "Debat tentang Status Republik Indonesia," dalam Panitia Peringatan Ulang Tahun Hubungan Indonesia-Mesir, Sekitar Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir Tahun 1947, Jakarta: Deparlu, 1979, hal 67-68.

¹¹ Ibid, hal 363.

¹² Panitia Penulisan Sejarah Deparlu, Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri 1945-1970, Jakarta: Deparlu, 1971, hal. 188.

dalam masalah Indonesia-Belanda. Dukungan Uni Soviet dikhawatirkan akan meningkatkan rasa solidaritas di Asia dan negara-negara Arab.¹³

Hasil dari persidangan DK-PBB ke 173 tersebut dilaporkan ke Amir Sjariffudin oleh Ketua DK-PBB, Faris El Kouri. Laporan tersebut diterima sehari kemudian oleh Amir Sjariffudin yang sedang ditahan oleh Belanda di Jakarta. Belanda selalu berupaya untuk menahan segala bentuk komunikasi antara pihak Indonesia dengan dunia luar. Termasuk komunikasi dengan PBB. Belanda berpandangan bahwa masalah yang terjadi di Indonesia adalah masalah dalam negeri Belanda.

Setelah menerima laporan dari Ketua DK-PBB, Amir Sjarifuddin segera mengirimkan balasannya kepada Ketua DK-PBB yang menyatakan keinginan pihak Indonesia untuk melaksanakan keputusan DK-PBB dan memohon agar pemahasan mengenai masalah Indonesia tetap diagendakan di dalam sidang DK-PBB. Amir Sjarifuddin juga memohon agar pihak Indonesia dilibatkan dalam sidang-sidang DK-PBB, meskipun tanpa mendapat hak suara.

Permohonan yang terakhir dari Amir Sjarifuddin mendapat dukungan yang kuat dari anggota DK-PBB. Hal itu disebabkan Belanda sering dianggap melanggar perjanjian gencatan senjata. Dalam sidang DK-PBB tanggal 12 Agustus 1947 dibahas mengenai kehadiran pihak Indonesia sebagai pihak yang bersengketa. Dalam pembahasan itu Belanda, Belgia, Inggris, dan Perancis secara keras menolak kehadiran utusan RI di sidang DK-PBB. Pihak-pihak yang menolak kehadiran Indonesia menyatakan bahwa kehadiran Indonesia melanggar pasal 32 piagam PBB¹⁴.

Pihak yang mendukung usul Indonesia adalah India, Australia, Amerika Serikat, Colombia, Polandia, Syria dan Uni Soviet. Negara-negara yang mendukung Indonesia beralasan bahwa Indonesia adalah suatu negara yang merdeka berdasarkan pengakuan de facto Belanda, bahkan Indonesia telah mendapat pengakuan de facto dan de jure dari Mesir, Syria, dan Iraq. Dengan alasan tersebut, kehadiran Indonesia dalam sidang DK-PBB tidak melanggar pasal 32 Piagam PBB.

¹³Margaret George. *Australia dan Revolusi Indonesia*. terj Hermawan Sulisty, Jakarta, Pantja Simpati 1986, hal 130.

¹⁴Mohamad Roem, "Debat tentang Status Republik Indonesia," dalam Panitia Peringatan Ulang Tahun Hubungan Indonesia-Mesir, Op.Cit., hal 72.

Patut dicatat adalah mengenai latar belakang dukungan dari Amerika Serikat terhadap Indonesia. Dukungan Amerika Serikat sebetulnya merupakan suatu diplomasi untuk mendapat dukungan dari negara-negara Asia dan Arab dalam berbagai kepentingan internasionalnya. Untuk itu Amerika Serikat melakukan suatu pencitraan anti kolonialisme dengan melakukan dukungan terhadap Indonesia.

Pada sidang DK-PBB ke-181 tanggal 12 Agustus 1947 diputuskan untuk segera mengundang wakil Indonesia dalam sidang-sidang DK-PBB selanjutnya. Keputusan sidang tersebut berarti dikesampingkannya masalah *sovereignty* atau kedaulatan suatu negara. Pada pihak lain, DK-PBB menolak diundangnya wakil-wakil “negara boneka” Borneo dan Indonesia Timur ke dalam sidang DK-PBB. Alasannya adalah penafsiran pasal 32, 37, dan 39 Piagam PBB, serta pasal 39 Provisional Rules of 39 DK-PBB¹⁵.

Pada 14 Agustus 1947 untuk pertamakalinya Indonesia dapat hadir dan menyatakannya pendapatnya secara langsung dalam sidang DK-PBB. Dalam persidangan tersebut Sjahrir sebagai salah seorang wakil resmi dari Indonesia, menyatakan pentingnya penarikan mundur pasukan Belanda ke daerah-daerah yang telah disepakati pada Oktober 1946. Sjahrir juga mendesak agar diadakan arbitrase dan dibentuk suatu Komisi Dewan Keamanan untuk mengawasi genjatan senjata sesuai isi resolusi DK-PBB tanggal 1 Agustus 1947. Dengan demikian, timbul kesan bahwa pihak Indonesia lebih menginginkan cara damai dalam penyelesaian masalahnya dengan Belanda.

Menyadari bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang sangat berperan dalam Dewan Keamanan, maka Indonesia berupaya melakukan pendekatan terhadap Amerika Serikat untuk mendapatkan suatu dukungan yang lebih kuat. Upaya itu terlihat ketika pada 14 Agustus 1947 Sjahrir, Agus Salim, dan Charles Tambu melakukan pembicaraan dengan pejabat-pejabat tinggi dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat seperti Dean Rusk, Kenneth Landon, dan Joseph Scott. Pada

¹⁵ Tujuan diajukannya Borneo dan Indonesia Timur oleh Belgia dan Belanda adalah untuk menunjukkan kepada sidang-sidang DK-PBB bahwa masalah yang terjadi di Indonesia adalah masalah dalam negeri (George MC Turnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, terj. Ismail bin Muhammad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajar Malaysia, 1980, hal 245.

kesempatan tersebut, pihak Indonesia menunjukkan sikap yang tegas terhadap upaya kemerdekaan. Apabila Dewan Keamanan tetap memberlakukan status kolonial, maka pihak Indonesia menyatakan akan tetap melakukan perlawanan sehingga Indonesia dikenal akan menjadi sebuah “jajahan yang berperang”¹⁶. Menanggapi hal tersebut, Amerika Serikat menyarankan supaya Indonesia tetap melakukan perundingan dengan Belanda.

Sementara itu, pada 19 Agustus 1947 Australia bersama Cina Nasionalis mengusulkan agar pihak Indonesia menunjuk perantara guna menyelesaikan permasalahannya dengan Belanda. Australia mengajukan usulan tersebut untuk menghindari agar permasalahan antara Belanda dan Indonesia diambil alih oleh Amerika Serikat¹⁷.

Usul yang diajukan Australia tersebut mendapat tentangan dari Uni Soviet yang pada sidang DK-PBB tanggal 25 Agustus 1947 menyatakan bahwa pembentukan komisi konsuler atau perantara tidak representatif. Uni Soviet menyarankan dibentuknya suatu komisi PBB yang beranggotakan 11 negara anggota DK-PBB. Usul tersebut diveto oleh Perancis, meskipun disetujui oleh Amerika Serikat, Australia, Brazil, Colombia, Polandia, Syria, dan Uni Soviet.

Perancis melakukan veto karena kasus yang dialami oleh Indonesia dan Belanda hampir sama dengan yang terjadi antara Perancis dan Vietnam. Apabila usulan itu diterima oleh DK-PBB maka Perancis khawatir masalah Vietnam pun akan diagendakan dan dibahas di DK-PBB.

Amerika Serikat selalu berupaya untuk tidak melibatkan Uni Soviet dalam masalah sengketa Indonesia dan Belanda. Untuk itu Amerika Serikat mengajukan resolusi 25 Agustus 1947 yang berisi penawaran jasa-jasa baik atau *good offices* dari PBB. Komisi yang diusulkan Amerika Serikat terdiri dari tiga negara anggota. Indonesia dan Belanda masing-masing diperkenankan untuk memilih satu negara untuk duduk dalam komisi tersebut. Satu negara lagi harus dipilih berdasarkan kesepakatan antara Indonesia-Belanda.

¹⁶ ARNAS, Kementerian Penerangan no 224.

¹⁷ Margaret George, Op.Cit., hal 130.

Indonesia memilih Australia sebagai negara yang dipercayainya untuk mewakili kepentingan Indonesia, sementara Belanda memilih Belgia untuk mewakili kepentingannya. Amerika Serikat dipilih oleh Indonesia dan Belanda sebagai pihak yang dapat bertindak netral. Komisi yang terdiri dari tiga negara ini untuk selanjutnya dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN).

Perundingan Indonesia-Belanda dengan perantara KTN dilaksanakan pada 8 Desember 1947 di atas geladak kapal USS Renville. Pada tanggal 26 Desember 1947 mengusulkan suatu gencatan senjata secara menyeluruh dan penyelesaian masalah politik Indonesia-Belanda. Usulan tersebut sebetulnya sangat menguntungkan Belanda karena mendapatkan kekuasaan atas wilayah-wilayah yang diklaim Indonesia. Meskipun demikian, Indonesia tetap menerima usulan tersebut. Pada 17 Januari 1948 dalam pengawasan KTN di atas kapal Renville yang sedang berlabuh di Tanjung Priok ditandatangani perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Renville.

Kekhawatiran pihak Indonesia mengenai tidak adanya lembaga yang mengawasi dan mengambil tindakan atas pelanggaran hasil perjanjian Renville, maupun perundingan-perundingan dengan Belanda sebelumnya, terbukti. Belanda memasukkan Jawa Barat, Sumatra Timur, dan Madura ke dalam wilayah kekuasaannya. Menghadapi hal itu, Indonesia mengajukan protes ke DK-PBB pada Februari 1948. Di DK-PBB Mr. Ali Sastroamidjojo menuntut supaya KTN diberi wewenang untuk mengambil tindakan atas Belanda yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati.

Usul Mr. Ali Sastroamidjojo di DK-PBB tersebut mendapat dukungan dari wakil-wakil Cina-Nasionalis, Uni Soviet, Ukraina, Syria dan Colombia. Pada pihak lain, Belanda mendapat dukungan dari Belgia, Perancis, Inggris, Argentina, Kanada, dan Amerika Serikat. Dalam hal dapat dilihat bahwa Indonesia mendapat dukungan lima suara, sementara Belanda mendapat dukungan enam suara. Negara-negara lain yang mendukung Indonesia seperti Australia, India, dan Filipina. Meskipun mendukung Indonesia, ketiga tersebut tidak memiliki hak suara, karena bukan anggota DK-PBB lagi.

Komposisi anggota DK-PBB seperti itu menguntungkan pihak Belanda. Hal itu terlihat ketika Kanada mengusulkan agar KTN tetap menjalankan tugas seperti

yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, Kanada meminta kepada pihak Indonesia-Belanda untuk mengirimkan informasi secara langsung kepada DK-PBB yang menyangkut perkembangan perundingan-perundingan yang dilakukan Indonesia-Belanda di Indonesia. Usul Kanada ini mendapat dukungan dari sebagian besar anggota DK-PBB, terbukti tujuh suara setuju dan empat negara abstain (Colombia, Sryria, Ukraina, dan Uni Soviet).¹⁸

Untuk memperlancar diplomasinya, pihak Indonesia sering melakukan kontak diplomatik dengan wakil Cina-Nasionalis, India dan Australia. Sebelum sidang DK-PBB dilaksanakan, biasanya dua hari sebelumnya pihak Indonesia membicarakan mengenai segala kemungkinan yang akan terjadi dalam persidangan dengan wakil-wakil dari negara di atas. Indonesia juga memanfaatkan kedekatan negara-negara tersebut dengan negara-negara anggota DK-PBB. India dan Australia diminta bantuannya oleh pihak Indonesia untuk melobi negara-negara Persemakmuran Inggris (*Commonwealth*). Sementara wakil dari Cina-Nasionalis diminta bantuannya untuk melobi Amerika Serikat dengan pertimbangan bahwa Cina-Nasionalis merupakan salah satu negara yang berpengaruh besar terhadap perekonomian Amerika Serikat¹⁹.

Selain itu LN Palar, pada Juli 1948 mengutus Soejatmoko yang sedang berada di New York ke Indonesia untuk mensosialisasikan hasil-hasil perundingan. Selain itu, LN Palar juga meminta pemerintah Indonesia untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan diplomasi Indonesia di DK-PBB dalam memperjuangkan kemerdekaannya.²⁰

Pihak Indonesia sebelumnya sudah mengetahui bahwa kalangan pengusaha Amerika Serikat memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk opini publik. Kalangan pengusaha Amerika Serikat juga menaruh perhatian terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka mempunyai kepentingan terhadap kekayaan alam Indonesia. Tindakan kalangan pengusaha bahkan mendahului kebijakan Pemerintah Amerika Serikat dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Mereka mengadakan

¹⁸ Department of Public Information United Nations, hal 280.

¹⁹ Surat LN Palar kepada Mohammad Hatta tanggal 30 Juli 1948. Lihat ARNAS, Arsip Djogya Documenten 1948 no 5342.

²⁰ Surat LN Palar kepada Mohammad Hatta tanggal 30 Juli 1948. Lihat ARNAS, Arsip Djogya Documenten 1948 no 5342.

perjanjian perdagangan dengan wakil Perdana Menteri Indonesia, A.K. Gani pada Januari 1948. Padahal saat itu Pemerintah Amerika Serikat menampakan gejala mendukung Belanda. Sehingga Amerika Serikat dan Belanda menentang perjanjian perdagangan tersebut karena Indonesia masih dianggap bukan suatu negara yang berdaulat. Indonesia sendiri menyangkal tuduhan tersebut melalui Sumitro Djojohadikusumo sebagai wakil perdagangan Indonesia²¹. Sumitro Djojohadikusumo memang ditugaskan untuk menggalang opini publik kalangan pengusaha Amerika Serikat.

Selain kalangan pengusaha Amerika Serikat, para diplomat Indonesia juga melihat bahwa terdapat kalangan-kalangan lain yang perlu mendapat perhatian untuk dilobi. Kalangan-kalangan yang dianggap memiliki pengaruh yang kuat bagi arah kebijakan Pemerintah Amerika Serikat adalah kalangan gereja, pergerakan wanita, buruh, dan akademisi. Penggalangan opini publik yang dilakukan para diplomat Indonesia menampakkan hasil. Pihak Indonesia sering diundang dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh kalangan-kalangan di atas. Dalam pertemuan tersebut sering diadakan perdebatan antara pihak Indonesia dengan Belanda. Indonesia selalu memenangkan perdebatan tersebut. Diplomat Indonesia berhasil menyentuh hati masyarakat Amerika Serikat dengan pidato-pidato yang merujuk dan menarik persamaan antara sejarah dan revolusi Amerika Serikat dan Indonesia. Citra positif orang-orang Belanda di mata masyarakat Amerika Serikat yang dikenal sebagai pengusaha yang jujur dan handal, dipatahkan oleh argumentasi-argumentasi para diplomat Indonesia. Masyarakat Amerika Serikat mendapatkan sisi lain mengenai Belanda dari para diplomat Indonesia.

Dukungan masyarakat Amerika Serikat terhadap Indonesia bertambah kuat karena keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam menumpas gerakan komunis yang dipimpin oleh Muso di Madiun pada 1948. Masyarakat Amerika Serikat menekan pemerintahnya untuk memperlihatkan dukungan yang lebih nyata bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Keberhasilan dalam menggalang opini publik Amerika Serikat, diikuti pula oleh keberhasilan Soemitro Djojohadikusumo dalam menggeland kalangan

²¹ Tribuana Said, hal 45.

pengusahanya. Para pengusaha Amerika Serikat yang mayoritas keturunan Yahudi menaruh perhatian bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Rosenthal, pemimpin Stein Hall. Bahkan kebutuhan finansial diplomat Indonesia disokong berkat penjualan ekspor produk-produk Indonesia yang diangkut oleh kapal-kapal Amerika Serikat dari pelabuhan Cirebon.

Atas tekanan-tekanan dari masyarakatnya, Amerika Serikat pada 19 Desember 1948 bersama-sama dengan Australia meminta agar DK PBB segera mengadakan sidang. Dalam sidang DK PBB yang berlangsung di Paris pada 22 Desember 1948, dibicarakan kembali masalah Indonesia-Belanda. Dalam sidang tersebut van Roijen, wakil dari Belanda, mengucapkan suatu pidato yang membela negerinya, sementara LN Palar, wakil dari Indonesia, menyampaikan juga pembelaannya.

Van Roijen menjelaskan alasan-alasan dilakukannya aksi militer Belanda terhadap Indonesia, dalam pandangan Belanda tindakan tersebut disebut sebagai aksi polisionil untuk memulihkan tata tertib dan keamanan di wilayah RI. Setelah tata tertib tercapai Belanda bermaksud membentuk Republik Indonesia Serikat yang merdeka sebagai sekutu yang sederajat dalam Uni Belanda-Indonesia, dengan berdasarkan kepada asas-asas politik Persetujuan Linggarjati dan Renville.

Aksi militer tersebut dilakukan karena pihak Indonesia banyak melanggar perjanjian gencatan senjata. Lebih lanjut van Roijen menuduh bahwa serangan-serangan yang dilakukan Indonesia terhadap wilayahnya merupakan tahap awal persiapan untuk melakukan pemberontakan secara besar-besaran sebelum tanggal 1 Januari 1949 ke daerah yang dikuasai Belanda.

Van Roijen menekankan bahwa DK PBB tidak berhak membicarakan masalah Indonesia dengan Belanda dengan alasan tidak sesuai dengan piagam PBB yang hanya menyangkut hubungan antara negara-negara yang mempunyai kedaulatan. Masalah yang terjadi di Indonesia adalah masalah dalam negeri Belanda sendiri dan masih dalam yurisdiksi Belanda, serta tidak akan membahayakan perdamaian dan keamanan dunia.

Sementara itu, ketua delegasi Indonesia LN Palar menyatakan tuduhan Belanda bahwa Indonesia akan melakukan serangan secara besar-besaran ke daerah yang dikuasai Belanda di Indonesia sebelum tanggal 1 Januari 1949 tidak masuk akal

dan merupakan suatu rekayasa. Mengenai aktivitas gerilya yang dilakukan tentara RI dengan bantuan rakyat secara sukarela, LN Palar menyatakan bahwa ia tidak dapat menghentikannya. Kalau perlu menurut LN Palar akan dilanjutkan terus sampai Belanda menyerah.

Pada akhir pidatonya, LN Palar mengusulkan tentang cara penyelesaian sengketa Indonesia dengan Belanda. Usulan dari pihak Indonesia adalah meminta DK-PBB segera memerintahkan gencatan senjata dan memohon agar para pemimpin RI yang ditawan Belanda segera dibebaskan. RI juga tetap memohon agar KTN diberikan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas untuk memulai lagi perundingan antara pihak yang bersengketa.

Akibat kelihaihan dari diplomasi yang dijalankan LN Palar, situasi dalam sidang tersebut berubah menjadi memihak Indonesia. Dukungan untuk Indonesia datang dari Amerika Serikat, Australia, Cina-Nasionalis, India, Syria dan Kolombia. Negara-negara pendukung Indonesia tersebut menyatakan bahwa tindakan agresi Belanda melanggar piagam PBB dan resolusi DK-PBB tahun-tahun sebelumnya. Alasan-alasan Belanda mengenai dilakukannya agresi militer dianggap sebagai rekayasa belaka.

Dalam persidangan tersebut Amerika Serikat bersama Cina-Nasionalis dan Kolombia pada 22 Desember 1948 mengajukan suatu rancangan naskah resolusi yang intinya agar menarik pasukan kedua belah pihak yang bersengketa berdasarkan resolusi 17 Januari 1948, dan mengintruksikan KTN untuk melaporkan situasi keamanan di Indonesia kepada PBB secara cepat dan lengkap.

Akan tetapi, naskah resolusi tersebut mendapat tentangan keras dari Australia, hal itu disebabkan tidak disebutkannya agar pihak Belanda menghentikan agresi militernya dan mengutuk tindakan Belanda secara resmi. Sebab lainnya adalah permintaan rancangan naskah resolusi tersebut yang meminta KTN bertanggung-jawab atas agresi Belanda, padahal KTN telah memberikan laporan kepada DK-PBB²². Akan tetapi, karena Australia tidak mempunyai hak bicara, maka Australia menitipkan usulnya ke dalam rancangan resolusi Amerika Serikat, Kolombia, dan Syria. Isi usul dari Australia adalah untuk segera membebaskan presiden dan

²² Margaret George hal 190

pemimpin lainnya yang ditahan Belanda, kemudian menginstruksikan KTN untuk mengamati dan memberi laporan kepada PBB dan meyakinkan tidak ada tindakan kekerasan individual.

Pada sidang DK PBB dalam minggu terakhir bulan Desember 1948 di Paris menghasilkan suatu resolusi untuk menghentikan tembak-menembak antar Indonesia-Belanda, dan seruan untuk membebaskan para pemimpin Indonesia yang ditahan. Dalam sidang DK PBB bulan Januari 1949 dihasilkan resolusi mengenai pelaksanaan perencanaan dari resolusi Desember 1948, rencana pemilihan umum dan penyerahan kedaulatan.

Pihak Belanda mempertahankan pendapatnya dengan menolak resolusi 28 Januari 1949, akan tetapi Amerika Serikat dan dunia internasional mendesak Belanda untuk menerima resolusi tersebut. Untuk mensiasatinya, Dr Bell ketua delegasi Belanda yang menggantikan van Mook mulai mengadakan suatu tindakan untuk menghindari dari resolusi tersebut dengan cara memikat para anggota BFO (*Bijeenkomsten voor Federal Oorlog* = Majelis Permusyawaratan Federal). Untuk mengadakan penyerahan kedaulatan. BFO dibentuk oleh Belanda pada Juli 1948 dengan maksud membentuk Negara Indonesia Serikat yang berbentuk federal dengan atau tanpa persetujuan republik.

Pada saat yang genting tersebut, Anak Agung Gede Agung yang didukung oleh sebagian dari golongan federalis menolak untuk mendirikan Negara Indonesia Serikat tanpa Republik Indonesia. Dengan demikian rencana Dr Bell tidak dapat dilaksanakan.

Cochran yang menjadi sponsor atas pertemuan Indonesia-Belanda mengusulkan agar mereka merumuskan suatu persetujuan dengan Belanda sebelum Rapat Umum, karena perdebatan tentang masalah Indonesia tidak bisa diharapkan menghasilkan dukungan yang besar untuk Indonesia. Delegasi dan para pimpinan Republik bersedia diajak berunding dan menilai Cochran berbicara untuk Amerika Serikat. Apabila tidak menerima usul Cochran ditakutkan Indonesia akan kehilangan dukungannya dari Amerika Serikat. Walaupun ada keyakinan bahwa RI tetap mampu memenangkan kemerdekaan penuh, tetapi dengan dukungan-dukungan Amerika Serikat akan mempercepat pencapaian kemerdekaan, memperkecil jumlah korban

dan tanpa resiko menjebloskan RI ke dalam krisis ekonomi dan politik akibat suatu peperangan yang lama. Akhirnya pada 17 Mei 1949, perundingan yang disponsori oleh Cochran dan dikenal dengan persetujuan Roem-Royen, secara resmi diterima oleh delegasi RI dan Belanda, dengan persetujuan ini, pemerintah RI tidak dengan sendirinya mau melaksanakan tiga tuntutan Belanda sebagai suatu prasyarat untuk diizinkan kembali ke Yogyakarta. Akan tetapi, kemudian disetujui oleh Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta untuk memberikan “jaminan pribadi” dengan tujuan menyesuaikan diri dengan Resolusi 28 Januari dan Dewan Keamanan dan pengarahannya DK tanggal 23 Maret:

1. Mengeluarkan perintah agar pasukan-pasukan bersenjataanya menghentikan perang gerilya.
2. Bekerjasama dalam mengembalikan kedamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan
3. Berpartisipasi dalam suatu Konferensi Meja Bundar di Den Haag dengan tujuan mempercepat penyerahan kedaulatan yang nyata, tanpa syarat dan penuh kepada Republik Indonesia Serikat.

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta menyatakan akan mendorong agar pemerintah Republik Indonesia mau menerima kebijakan semacam itu secepat mungkin setelah kembali ke Yogyakarta.

D. Perundingan Meja Bundar (KMB)

Pada 12 Maret 1949 guna membicarakan masalah Indonesia dan merundingkan syarat-syarat “penyerahan” kedaulatan serta pembentukan Uni Indonesia-Belanda. Pemerintah Belanda mengutus Dr. Koets sebagai Wakil Tinggi Mahkota untuk menemui Ir. Soekarno bersama beberapa pembesar RI lainnya yang ditawan di Bangka, untuk menyampaikan maksud pemerintah Belanda dan mengundang Ir. Soekarno untuk menghadiri Konferensi itu di Den Haag. Tanggal 3 Maret 1949 Presiden Soekarno mengadakan pembicaraan dengan penghubung BFO dan menegaskan mengenai perlunya kedudukan pemerintahan RI dipulihkan sebagai syarat dilangsungkannya perundingan selaras dengan Resolusi DK-PBB. Tanggal 4 Maret Presiden Soekarno menyatakan penolakannya untuk menghadiri KMB kecuali dengan syarat, yaitu:

1. Pengembalian kekuasaan RI adalah syarat mutlak untuk memulai perundingan.
2. Kedudukan dan kewajiban komisi PBB untuk Indonesia dalam membantu melaksanakan Resolusi PBB tidak akan terganggu.

Dengan adanya petunjuk dari DK-PBB dan adanya pendekatan politis antara pihak RI dan Belanda, maka pada 14 April 1949 atas inisiatif komisi PBB untuk Indonesia diadakan perundingan antara RI - Belanda. Perundingan diadakan di hotel Des Indies Jakarta dipimpin Marie Cochran (Amerika Serikat). Delegasi RI dipimpin oleh Mr. Moh. Roem (ketua) dan Mr. Ali Sastroamidjoyo (wakil ketua). Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J.H. Van Royen dengan 3 orang anggota dan 4 orang penasehat. Seminggu kemudian, perundingan tersebut mengalami jalan buntu karena J.H. Van Royen bersikeras agar pemerintahnya baru mau mengembalikan RI ke Yogyakarta setelah pemerintahan RI memerintahkan “pasukan-pasukan bersenjata menghentikan perang gerilya dan mau bekerjasama untuk mengembalikan perdamaian dan usaha keamanan serta ketertiban” dan mau menghadiri KMB di Den Haag. Sebaliknya Moh. Roem menginginkan dikembalikannya para pemimpin RI ke Yogyakarta sebelum KMB dan tidak mungkin untuk menghentikan perang gerilya jika dalam kenyataannya para anggota pemerintah itu dikucilkan, jauh satu sama lain dan hubungan dan tidak mampu bertemu di ibu kotanya.

Hasil perundingan tersebut adalah disetujuinya untuk membentuk suatu “komisi Persiapan Nasional”, yang terdiri dari wakil-wakil dari Republik dan BFO dengan tujuan “mengorganisir semua persiapan dan aktivitas yang harus dikerjakan selama atau setelah Konferensi Meja Bundar” suatu organ pusat dalam memelihara hubungan antara Republik dan BFO. Meskipun pelaksanaannya kelak tidak selalu cocok, BFO setuju bahwa negara-negara bagian pemerintah Federasi itu tidak akan memiliki angkatan bersenjata. BFO juga memperjelas dukungannya kepada tuntutan RI untuk dilaksanakannya suatu penyerahan secara nyata dan tidak bersyarat dan kedaulatan tanpa ikatan politik ataupun ekonomi.

Pada 1 Agustus 1949 akhirnya disetujui bahwa gencatan senjata antar Belanda dan Republik akan dilaksanakan secara serentak oleh kedua belah pihak pada 3 Agustus dan berlaku pada 11 Agustus di Jawa, serta pada 15 Agustus di

Sumatera. Sesudah tanggal tersebut, delegasi Republik dan delegasi BFO yang masing-masing diketuai oleh perdana menteri Hatta dan Sultan Hamid dari Kalimantan Barat, berangkat ke Den Haag, tempat diadakannya Konferensi Meja Bundar untuk membicarakan penyerahan kedaulatan pada RI yang dimulai pada 23 Agustus.

Perubahan sikap Pemerintah Belanda, sekaligus Amerika Serikat, memberikan keuntungan bagi orang-orang Republik yang ikut dalam perundingan ini. Perubahan-perubahan itu tampaknya terutama disebabkan oleh faktor yang sama seperti yang menjadi alasan utama dari perubahan sikap kalangan mayoritas anggota BFO, yaitu semakin banyak orang Belanda yang menjadi yakin bahwa kekuatan militernya tidak cukup kuat untuk mendorong suatu penyelesaian politik. Peperangan yang berkepanjangan tidak hanya berarti berlanjutnya malapetaka yang berkembang akibat peperangan semacam itu, tetapi juga suatu kelanjutan usaha yang sadar akan kebijakan bumi-hangus Republik. Penghancuran secara terencana perkebunan-perkebunan Belanda, pabrik-pabrik gula dan sebagainya. Menjadi jelas bagi banyak pengusaha Belanda bahwa bila angkatan bersenjata Belanda memang berhasil memperoleh kekuasaan penuh atas negara tersebut, menjelang saat itu diduga hanya tinggal sedikit tersisa dari penanaman modal Belanda di Indonesia yang jumlahnya satu seperempat Bilyun dolar itu. Dengan banyaknya kepentingan usaha di negeri Belanda yang menambah beban kepentingan unsur-unsur liberal, khususnya diwakili oleh partai Buruh, tekanan dalam negeri terhadap pemerintah untuk menyerahkan kedaulatan kepada RI-meskipun mungkin tidak diwakili oleh mayoritas opini umum negeri Belanda-telah begitu meningkat.

Selama periode dua bulan menjelang Konferensi Den Haag, senator-senator yang sebelumnya mendesak diputus bantuan ECA kepada Negeri Belanda, terus-menerus mendesak Departemen Luar Negeri untuk memastikan agar kemerdekaan diberikan kepada Indonesia. Pada akhirnya mulai tanggal 23 Agustus-2 November 1949 diselenggarakanlah suatu Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Moh. Hatta mendominasi pihak RI selama jalannya perundingan-perundingan yang menghasilkan pengakuan kedaulatan bagi Republik Indonesia.

Latihan

1. Buatlah kronologi singkat mengenai perundingan-perundingan yang dilaksanakan antara Indonesia dan Belanda!
2. Analisis relasi antara pertempuran atau perlawanan bersenjata dengan diplomasi!

Rangkuman

1. Rakyat Indonesia, terutama pemuda, mengadakan perlawanan spontanitas atas tindakan-tindakan militer Belanda di Indonesia.
2. Sekutu melihat laporan Belanda berbeda dengan kenyataan yang dilihatnya di Indonesia. Sekutu melihat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia mendapat dukungan aktif dari rakyatnya bukan negara buatan Jepang seperti yang digambarkan oleh Belanda.
3. Perlawanan bersenjata dibarengi dengan upaya-upaya diplomatik agar kemerdekaan Indonesia mendapat dukungan dari dunia internasional.

Tes

1. Sebutkan posisi tentara Jepang di Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan!
2. Jelaskan tugas tentara sekutu di Indonesia! Bagaimana sikap mereka setelah melihat situasi di Indonesia?
3. Sebutkan negara-negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia di dunia internasional, apa yang mereka lakukan untuk Indonesia?

Umpan Balik

Bandingkan jawaban yang sudah saudara kerjakan dengan kunci jawaban. Perhitungan jawaban menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jawaban yang benar} \times 100\%}{3} = \text{tingkat penguasaan}$$

Arti tingkat penguasaan yang saudara capai adalah:

90% -100% = Sangat Baik

80% - 89% = Baik

70% -79% = Cukup

60% - 69% = Kurang

0% - 59% = Gagal

Tindak lanjut

Apabila anda telah mencapai nilai di atas 80%, maka dilanjutkan dengan pembelajaran bab selanjutnya.

Kunci Jawaban Tes

1. Tugas tentara Jepang pasca proklamasi kemerdekaan adalah menjaga ketertiban dan keamanan di Indonesia, sampai pasukan sekutu tiba di Indonesia. Setibanya pasukan sekutu, tentara Jepang harus menyerahkan diri pada sekutu. Akan tetapi, tentara Jepang harus menghadapi serangan-serangan dari pejuang Indonesia yang berupaya merampas senjata dan mengusir mereka. Sehingga sering terjadi bentrokan antara pejuang Indonesia yang menginginkan segera mengusir Jepang dan tentara Jepang yang berupaya mematuhi perintah sekutu.
2. Tugas tentara sekutu adalah melucuti tentara Jepang, memulihkan keamanan untuk kemudian menyerahkan Indonesia kembali dalam yurisdiksi Belanda berdasarkan perjanjian Postdam 1945.
Setelah melihat kenyataan yang ada di Indonesia, sekutu mempertimbangkan untuk tetap berada di wilayah Indonesia tetapi dengan mendatangkan lebih banyak tentara dan meninggalkan Indonesia karena melihat bahwa kemerdekaan Indonesia didukung secara aktif oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekutu akhirnya memilih meninggalkan Indonesia setahun kemudian, 1946.
3. India dan Australia
India berperan dengan mengundang Sjahrir untuk menghadiri sidang *Inter-Asian Relations Conference* yang berlangsung pada 23 Maret sampai 1 April

1947 dan merupakan suatu konferensi Asia pertama. Arti *Inter-Asian Relations Conference* sangat penting bagi Indonesia karena dihadiri oleh bangsa-bangsa di Asia. Indonesia mengirimkan suatu delegasi yang besar yang terdiri dari tigapuluh orang, dengan ketua Abu Hanifah. Sjahrir bersama Agus Salim turut serta menghadiri konferensi. Pada kesempatan konferensi itu anggota-anggota delegasi Republik Indonesia melobi bangsa-bangsa di Asia untuk membantu perjuangan Indonesia apabila Belanda melakukan agresi.

Selanjutnya India berperan aktif dalam mengupayakan masalah Indonesia dibahas di forum PBB.

Australia berperan aktif dalam mengajukan masalah Indonesia ke forum PBB. Oleh karena selalu menunjukkan sikap positif terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, maka Australia dipilih Indonesia dalam komisi tiga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

ARNAS, Kementrian Penerangan no 224.

Department of Public Information United Nations.

Surat LN Palar kepada Mohammad Hatta tanggal 30 Juli 1948. Lihat ARNAS, Arsip Djogya Documenten 1948 no 5342.

Surat LN Palar kepada Mohammad Hatta tanggal 30 Juli 1948. Lihat ARNAS, Arsip Djogya Documenten 1948 no 5342.

Buku

Kahin, George MC Turnan. Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, terj. Ismail bin Muhammad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pelajar Malaysia, 1980.

Oey Hong Lie, War and Diplomacy in Indonesia 1945-50. Townsville: Comitee of South East Asian Studies James Cook University of North Queensland. 1981.

Poeponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosutanto. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka. 1990.

Roem, Mohammad. Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan RI. Jakarta: Gramedia. 1989.

- .- - - - "Debat tentang Status Republik Indonesia," dalam Panitia Peringatan Ulang Tahun Hubungan Indonesia-Mesir, Sekitar Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir Tahun 1947, Jakarta: Deparlu , 1979.
- Soejatmoko. Menjelajah Dunia Diplomasi, dalam Departemen Luar Negeri. Bunga Rampai Kenangan Dalam Dinas Luar Negeri (Suka Duka Napak Tilas). Departemen Luar Negeri, 1989.
- Suli Suleiman. "Politik Luar Negeri RI: Dari Masa ke Masa". Pusdiklat DEPLU. Jakarta 1987.